



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 018 TAHUN 2023



Audited



Untuk Periode Yang Berakhir
31 Desember 2023



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Pertanian adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Bagian Anggaran (BA 018) Tahun 2023 (Audited) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan negara pada Kementerian Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada para pimpinan dalam pengambilan keputusan serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.



Jakarta, Mei 2024
Menteri Pertanian,

Andi Amran Sulaiman



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Representasi Manajemen	iii
Pernyataan TanggungJawab	iv
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	77
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	121
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	139
F. Pengungkapan Penting Lainnya	146
VI Lampiran dan Daftar	



REPRESENTASI MANAJEMEN



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : R-82/KU.140/M/05/2024
Sifat : Sangat Segera dan Rahasia
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Representasi Tertulis Laporan Keuangan
Kementerian Pertanian Tahun 2023

Mei 2024

Yth.

Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto Kav. 31,
Jakarta 10210

Kami menyampaikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tidak hanya melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan, yakni:

1. Laporan Keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP;
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK RI;
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;
4. Rekening-rekening atas nama Pemerintah sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;

5. Kementerian Pertanian memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut;
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan;
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan;
9. Kementerian Pertanian telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2023 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan;
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern;
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern dalam penyusunan LK Kementerian Pertanian Tahun 2023;
13. Kami telah menilai efektivitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkaskan secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah; dan
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Kementerian Pertanian dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material;
15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP;
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan;

17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2023. Bersama ini kami sampaikan pula Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2023 *Audited* sebagai asersi final Kementerian Pertanian.



Menteri Pertanian,

Andi Amran Sulaiman



PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Bagian Anggaran (BA 018) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Jakarta, Mei 2024

Menteri Pertanian,

Andi Amran Sulaiman



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp688.236.858.066,00 atau mencapai 126,15% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp545.563.838.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.315.456.911.043,00 atau mencapai 96,67% dari alokasi anggaran sebesar Rp14.808.873.722.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp81.093.085.296.559,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.360.303.249.029,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp78.030.901.881.449,00; Properti Investasi sebesar Rp210.183.617.686,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp5.643.823.630,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.486.052.724.765,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp576.554.056.055,00 dan Rp80.516.531.240.504,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp600.447.388.467,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp15.253.278.955.425,00, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar -Rp14.652.831.566.958,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa

masing-masing sebesar Rp72.377.164.190,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar -Rp14.580.454.402.768,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp81.133.139.180.726,00 ditambah Defisit-LO sebesar -Rp14.580.454.402.768,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar -Rp39.208.232.127,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp14.003.054.694.673,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp80.516.531.240.504,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk sampai dengan 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN PERTANIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023		% THD	31 DESEMBER 2022
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN PNB	B.1				
Pendapatan BLU	B.1.1	61.401.752.000	87.509.643.384	142,52	75.509.453.081
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.2	484.162.086.000	600.727.214.682	124,08	630.674.197.339
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA		545.563.838.000	688.236.858.066	126,15	706.183.650.420
BELANJA PEMERINTAH PUSAT	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	2.035.612.929.000	2.012.665.304.603	98,87	2.235.033.530.507
Belanja Barang	B.4	12.209.414.063.000	11.809.516.350.806	96,72	12.766.093.092.775
Belanja Modal	B.5	563.846.730.000	493.275.255.634	87,48	645.942.308.969
JUMLAH BELANJA NEGARA		14.808.873.722.000	14.315.456.911.043	96,67	15.647.068.932.251



Jakarta, Mei 2024
Menteri Pertanian,

Andi Amran Sulaiman



NERACA

II. NERACA

KEMENTERIAN PERTANIAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	324.945.830	619.103.780
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	2.266.479
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	3.719.292.438	6.098.880.883
Kas pada Badan Layanan Umum	C.4	26.032.774.492	20.467.014.941
Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum	C.5	131.432.327.661	139.432.327.661
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.6	41.402.424.980	84.760.518.417
Uang Muka Belanja (Prepayment)	C.7	0	4.003.020
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.8	131.249.200	69.176.300
Piutang Bukan Pajak	C.9	16.040.870.339	14.714.379.286
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.10	9.889.014.663	11.337.073.488
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi			
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.11	586.350.000	372.661.858
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lancar	C.12	-16.311.867.536	-17.606.621.213
Persediaan	C.13	1.147.055.866.962	1.557.988.427.879
JUMLAH ASET LANCAR		1.360.303.249.029	1.818.259.212.779
ASET TETAP			
Tanah	C.14	71.036.443.125.565	71.600.346.406.337
Peralatan dan Mesin	C.15	6.622.466.201.161	6.702.567.581.322
Gedung dan Bangunan	C.16	6.832.953.144.759	6.613.026.927.147
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.17	712.722.433.678	705.569.673.197
Aset Tetap Lainnya	C.18	68.900.441.840	88.117.077.446
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	74.324.781.149	111.938.594.334
Akumulasi Penyusutan	C.20	-7.316.908.246.703	-7.005.087.297.492
JUMLAH ASET TETAP		78.030.901.881.449	78.816.478.962.291
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.21	210.908.041.283	0
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	-724.423.597	0
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		210.183.617.686	0

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan	C.23	5.125.449.950	12.190.727.812
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi			
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan	C.24	-2.350.935.830	-10.834.681.892
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi			
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.25	10.463.666.008	11.802.725.065
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.26	-7.594.356.498	-6.581.653.113
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		5.643.823.630	6.577.117.872
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.27	133.766.533.472	134.682.092.677
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.28	660.244.080.795	0
Aset Lain-lain	C.29	1.196.708.929.534	721.762.443.867
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.30	-504.666.819.036	-351.975.991.000
JUMLAH ASET LAINNYA		1.486.052.724.765	504.468.545.544
JUMLAH ASET		81.093.085.296.559	81.145.783.838.486
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.31	570.431.876.383	8.461.936.556
Pendapatan Diterima Dimuka	C.32	4.886.947.728	3.430.923.893
Uang Muka dari KPPN	C.33	324.945.830	619.103.780
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.34	910.286.114	132.693.531
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		576.554.056.055	12.644.657.760
JUMLAH KEWAJIBAN		576.554.056.055	12.644.657.760
EKUITAS			
Ekuitas	C.35	80.516.531.240.504	81.133.139.180.726
JUMLAH EKUITAS		80.516.531.240.504	81.133.139.180.726
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		81.093.085.296.559	81.145.783.838.486



Jakarta, Mei 2024
Menteri Pertanian,

Andi Amran Sulaiman



LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN PERTANIAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	600.447.388.467	596.715.294.488	3.732.093.979	0,63
JUMLAH PENDAPATAN		600.447.388.467	596.715.294.488	3.732.093.979	0,63
BEBAN					
Beban Pegawai	D.2	2.033.477.576.430	2.252.266.670.039	-218.789.093.609	(9,71)
Beban Persediaan	D.3	886.795.155.413	1.064.956.867.501	-178.161.712.088	(16,73)
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.326.030.259.187	3.139.896.830.334	186.133.428.853	5,93
Beban Pemeliharaan	D.5	331.382.987.078	324.418.095.597	6.964.891.481	2,15
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.925.998.619.374	1.947.668.838.497	-21.670.219.123	(1,11)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	6.092.483.740.231	6.009.501.289.152	82.982.451.079	1,38
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	656.216.315.304	695.624.931.933	-39.408.616.629	(5,67)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	894.302.408	1.356.783.695	-462.481.287	(34,09)
JUMLAH BEBAN		15.253.278.955.425	15.435.690.306.748	-182.411.351.323	(1,18)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-14.652.831.566.958	-14.838.975.012.260	186.143.445.302	(1,25)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	-83.816.284.115	-85.775.042.073	1.958.757.958	(2,28)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	7.063.175.040	10.844.045.572	-3.780.870.532	(34,87)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	90.879.459.155	96.619.087.645	-5.739.628.490	(5,94)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	156.193.448.305	257.751.120.160	-101.557.671.855	(39,40)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	173.228.245.847	312.050.226.466	-138.821.980.619	(44,49)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.15	17.034.797.542	54.299.106.306	-37.264.308.764	(68,63)
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.16	72.377.164.190	171.976.078.087	-99.598.913.897	(57,91)
SURPLUS/ (DEFISIT) - LO		-14.580.454.402.768	-14.666.998.924.173	86.544.531.405	(0,59)



Jakarta, Mei 2024
Menteri Pertanian,

Andi Amran Sulaiman



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN PERTANIAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
EKUITAS AWAL	E.1	81.133.139.180.726	81.196.032.107.834	-62.892.927.108	(0,08)
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	-14.580.454.402.768	-14.666.998.934.173	86.544.531.405	(0,59)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS					
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR					
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	8.597.293.463	-23.393.099.911	31.990.393.374	(136,75)
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	-1.140.968.000	1.039.664.632	-2.180.632.632	(209,74)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	-35.820.657.747	-14.866.570.214	-20.954.087.533	140,95
Lain-lain	E.3.4	-10.843.899.843	-387.811.180.815	376.967.280.972	(97,20)
Jumlah		-39.208.232.127	-425.031.186.308	385.822.954.181	(90,78)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	14.003.054.694.673	15.029.137.193.373	-1.026.082.498.700	(6,83)
Ditagikan ke Entitas Lain	E.4.1	14.215.138.900.212	15.574.536.228.109	-1.359.397.327.897	(8,73)
Diterima dari Entitas Lain	E.4.1	-600.727.214.682	-630.674.197.339	29.946.982.657	(4,75)
Transfer Keluar	E.4.2	-1.144.377.148.829	-1.018.066.980.034	-126.310.168.795	12,41
Transfer Masuk	E.4.2	1.132.204.104.258	1.026.082.080.284	106.122.023.974	10,34
Pengesahan Hibah Langsung	E.4.3	344.288.990.361	76.033.272.165	268.255.718.196	352,81
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	E.4.3	-18.249.879	-33.285.125	15.035.246	(45,17)
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	E.4.4	56.545.313.232	1.260.075.313	55.285.237.919	~
EKUITAS AKHIR	E.5	80.516.531.240.504	81.133.139.180.726	-616.607.940.222	(0,76)



Jakarta, Mei 2024
Menteri Pertanian,

Andi Amran Sulaiman



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Pertanian

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Entitas berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Jakarta Selatan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Visi dan Misi Kementerian Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2021-2024 adalah:

Visi

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi

- Mewujudkan ketahanan pangan.
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
- Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Pertanian yang lebih proporsional, efektif dan efisien diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, berikut merupakan kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Kementerian Pertanian:

1. Sekretariat Jenderal (Setjen) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Pertanian.
2. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian.
3. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing dan pemasaran komoditas tanaman pangan.
4. Direktorat Jenderal Hortikultura (Ditjen Horti) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing dan pemasaran komoditas hortikultura
5. Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjen Bun) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing dan pemasaran komoditas perkebunan serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan.
6. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan dan kesehatan hewan, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing dan pemasaran hasil peternakan.

7. Inspektorat Jenderal (Itjen) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.
8. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian.
9. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
10. Badan Karantina Pertanian (Barantan) mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.

Kementerian Pertanian dalam melaksanakan visi dan misinya mempunyai program Bantuan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2022. Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi:

1. Pemberian Penghargaan, dapat diberikan kepada perorangan, petani, pemuda tani, mahasiswa, siswa, dosen, widyaswara, penyuluh pertanian, petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan, petugas pengawas benih tanaman, petugas pengawas mutu benih tanaman, petugas pengawas alat dan mesin pertanian, petugas informasi pasar, petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan, pelaku agribisnis, kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani, unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA), kelembagaan ekonomi petani, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah;
2. Bantuan Operasional, dapat diberikan kepada petani, pemuda tani, petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah;
3. Bantuan Sarana/Prasarana, dapat diberikan kepada kelompok masyarakat, kelompok tani/gabungan kelompok tani, kelompok siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri, brigade alsintan, unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA), kelompok penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah dan brigade pengamat organisme pengganggu tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun (Karlabin);
4. Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dapat diberikan kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, kelompok tani/gabungan kelompok tani, brigade alsintan, unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA), kelompok penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, brigade pengamat organisme pengganggu tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun (karlabun); dan
5. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, lembaga masyarakat desa hutan, regu pengendali OPT, rumah tangga miskin petani, siswa dan alumni Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri, mahasiswa dan alumni, kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani, kelompok penangkar, kelompok usaha

bersama/kelembagaan ekonomi petani, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian di atas, sudah diterbitkan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis Bantuan Pemerintah sesuai dengan karakteristik Eselon I terkait. Peraturan tersebut dapat dijelaskan pada **Lampiran A.1**.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2023 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8/PB/PB.6/2023 tanggal 03 April 2024 perihal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2023 (*Audited*) sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 (*Audited*) untuk seluruh jenjang Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA) menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2023 (*Audited*) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kementerian Pertanian termasuk didalamnya jenjang struktural dibawah Kementerian Pertanian seperti Eselon I, dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Laporan Keuangan Kementerian Pertanian disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) laporan keuangan seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 6 Mei 2024.

Sesuai dengan buku Nota Keuangan APBN, pada Tahun Anggaran 2023 Kementerian Pertanian menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp15.318.655.827.000,00. Selama periode berjalan, Kementerian Pertanian telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, sehingga dalam Laporan Keuangan Tahun 2023 (*Audited*) jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp14.808.873.722.000,00. Adapun rincian perbandingan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Pertanian Tahun 2023 (*Audited*) yang diperoleh dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian dapat dilihat pada **Lampiran A.2.1**.

Tabel A.2.1 Pagu Anggaran dan Jumlah Satuan Kerja yang Terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan Tahun 2023 (Audited)

Tahun Anggaran	Jumlah Satker	Jenis Sumber Dana
		APBN (Rp)
2023	555	14.808.873.722.000
2022	555	16.443.954.161.000
2021	594	16.314.906.396.000

Jumlah satuan kerja di lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2023 sebanyak 555 satker (DIPA), termasuk Satker Konsolidasi yang dibentuk dalam rangka menyajikan jumlah nilai eliminasi transaksi resiprokal pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (K/L). Hal ini sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-5/PB/PB.6/2024 tanggal 16 Januari 2024 perihal Penyampaian Petunjuk Teknis Akuntansi 19: Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Rincian Satuan Kerja Kementerian Pertanian TA 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel A.2.2 Rincian Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pertanian TA 2023

No	Kode Eselon I	Nama Eselon I	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
			KP		KD		DK		TP		
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
1	1	Setjen	6	-	-	-	-	-	-	-	6
2	2	Itjen	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	3	Ditjen TP	1	-	2	-	34	-	33	-	70
4	4	Ditjen Horti	1	-	-	-	34	-	39	-	74
5	5	Ditjen Bun	1	-	4	-	33	-	41	-	79
6	6	Ditjen PKH	1	-	23	-	0	-	34	-	58
7	8	Ditjen PSP	1	-	-	-	33	-	59	-	93
8	9	BSIP	1	-	63	-	-	-	-	-	64
9	10	BPPSDMP	1	-	34	-	21	-	-	-	56
10	12	Barantan	1	-	52	-	-	-	-	-	53
11		Satker Konsolidasi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Jumlah			16	0	178	0	155	0	206	0	555

Keterangan:

M : Menyampaikan LK

TM : Tidak Menyampaikan LK

Output strategis yang telah dicapai oleh Kementerian Pertanian selama periode Tahun Anggaran 2023 dengan pagu belanja sebesar Rp14.808.873.722.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp14.315.456.911.043,00 atau 96,76%. Penjelasan Capaian Output Strategis Kementerian Pertanian, sebagai berikut:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan dan Vokasi (DL) memiliki pagu belanja sebesar Rp844.790.019.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp832.879.179.833 atau 98,59%.
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (EC) memiliki pagu belanja sebesar Rp1.825.440.428.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp1.690.088.865.680 atau 92,59%.

3. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (HA) memiliki pagu belanja sebesar Rp7.949.054.436.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp7.660.877.278.978 atau 96,37%.
4. Program Dukungan Manajemen (WA) memiliki pagu belanja sebesar Rp4.189.588.839.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp4.131.611.586.552 atau 98,67%.

Detail pagu anggaran, realisasi anggaran, target output dan pencapaian output dari masing-masing Prioritas Nasional dapat dilihat pada **Lampiran F.12**.

A.3. Basis Akuntansi

Kementerian Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Beban yang berasal dari belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (526) dan belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dan jasa (57) diakui dan disajikan sebagai beban apabila sudah diterbitkan berita acara serah terima (BAST).

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 2) Kas Lainnya di BLU digunakan menampung dana yang sepenuhnya belum mutlak menjadi penerimaan Satker BLU diantaranya adalah penerimaan penjualan layanan yang ada pada Satker BLU yang pada saat uang diterima oleh satker BLU namun pelanggan belum menerima secara penuh layanan dari satker BLU selain menampung penerimaan yang belum bisa diakui menjadi penerimaan satker BLU.
- 3) Kas pada Badan Layanan Umum merupakan rekening operasional yang berasal dari penerimaan satker BLU yang sudah mutlak menjadi penerimaan satker BLU. Kas BLU meliputi saldo uang tunai, saldo rekening dan deposito yang berada dibawah tanggung jawab bendahara BLU yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satker Badan Layanan Umum (BLU).
- 4) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- 5) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 6) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Tabel A.5.1 Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Kementerian Pertanian

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 7) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- 8) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Harga standar (kapitalisasi) apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

Pada peraturan tersebut pada Pasal 12 Akun Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

1. Belanja Tanah untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526111);

2. Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526112);
 3. Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526113);
 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526114);
 5. Belanja Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526115);
 6. Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan Kepada Pemda (526211);
 7. Belanja Barang Penunjang Kegiatan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan Kepada Pemda (526212); dan
 8. Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).
- Sedangkan pada Pasal 36 bahwa persediaan yang langsung diserahkan kepada pihak penerima, transaksi penyerahan/dijual kepada masyarakat/pemda dibuktikan dengan dokumen sumber pengeluaran persediaan untuk:

- a) Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dapat berupa:
 - a. BAST Persediaan antara pihak pelaksana pengadaan dengan penerima dan diketahui oleh satuan kerja;
 - b. BAST Persediaan antara kepala satuan kerja atau PPK dengan penerima;
 - c. BAST Persediaan antara Eselon I dengan penerima/SKPD; atau
 - d. Surat pernyataan persediaan telah diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah dari Kuasa Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk.
- b) Kantor Pusat dan Kantor Daerah dapat berupa:
 - (1) Surat Keputusan Hibah;
 - (2) BAST Persediaan antara Eselon I dengan penerima/SKPD;
 - (3) BAST Persediaan antara kepala satuan kerja/PPK dengan penerima;
 - (4) BAST Persediaan antara pihak pelaksana pengadaan dengan penerima dan diketahui oleh satuan kerja; atau
 - (5) Surat pernyataan persediaan telah diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah dari Kuasa Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk.

Disamping itu, Pasal 43 menjelaskan bahwa seluruh pelaporan persediaan pada tanggal pelaporan dicatat berdasarkan *opname* fisik. Persediaan dilakukan untuk mengetahui jumlah Persediaan dan kondisi catatan dalam pembukuan pengelolaan Persediaan yang belum dipakai. *Opname* fisik Persediaan sebagaimana dimaksud dilakukan secara sensus per semester atau periode laporan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-1984/PB/2017 Tanggal 21 Februari 2017, Akun Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526) berupa uang yang meliputi:

- Belanja Tanah untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang (526121)
- Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang (526122)
- Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang (526123)
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang (526124)

- Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Uang (526312)

Hal ini dipertegas melalui Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 pada Pasal 17 menyebutkan, mekanisme pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah berupa uang yang meliputi:

- (1) Pencairan dana Bantuan Pemerintah dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
- (2) Pencairan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan Kegiatan.
- (3) Pencairan dana Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat dilakukan melalui mekanisme UP, TUP, dan LS ke rekening penerima bantuan.
- (4) Pencairan dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang yang nilai bantuannya di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pencairan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a) Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana Bantuan Pemerintah setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; dan
 - b) Pembayaran Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana Bantuan Pemerintah, dapat dilakukan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen).
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya dapat dicairkan jika pertanggungjawaban pembayaran tahap I telah diinput ke dalam aplikasi Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian.

Sedangkan dalam Pasal 19, dinyatakan:

- (1) Penerima dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai dan paling lambat pada tanggal 31 Desember, meliputi:
 - a. Berita Acara Serah Terima, yang memuat:
 1. Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 2. Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
 3. Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan
 - b. Foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan memuat *geo tagging*; dan
 - c. Memasukkan pertanggungjawaban bantuan uang ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian meliputi dokumen BAST, Surat Keputusan Penerima, rekening penerima, jenis barang, dan kuitansi pertanggungjawaban paling lambat 30 September 2023 atau paling lambat *audited*.
 - d. Dalam hal daerah penerima Bantuan Pemerintah merupakan *remote area* yang tidak terdapat sinyal telekomunikasi, foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat tidak memuat *geo tagging*.

- (2) Dalam hal Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang merupakan bantuan dalam keadaan tertentu yang ditetapkan pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) huruf h, harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK yang diinput dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal Bantuan Pemerintah diterima.

Sedangkan dalam Pasal 20, 21 dan 22, dinyatakan:

- (1) Memasukkan pertanggungjawaban bantuan uang ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian meliputi dokumen BAST, Surat Keputusan Penerima, rekening penerima, jenis barang, dan kuitansi pertanggungjawaban paling lambat 31 Desember tahun berjalan atau paling lambat *audited*.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK dan dilakukan input pada aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.
- (3) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.
- (4) PPK mengesahkan berita acara serah terima setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Sedangkan dalam Pasal 23, mekanisme pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah berupa barang adalah:

- (1) Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk Barang meliputi perencanaan, pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan pertanggungjawaban.
- (2) Perencanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dilakukan oleh masing-masing Satker yang mengelola DIPA Kegiatan.
- (3) Perencanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dilakukan melalui kegiatan penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL).
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dilakukan oleh masing-masing satker yang mengelola DIPA kegiatan.
- (5) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dilakukan oleh penyedia barang sampai ke penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan kontrak.

Selain itu dalam Pasal 28 dinyatakan bahwa:

- (1) Pemeriksaan dan serah terima barang dilakukan setelah penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatanganan kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.
- (2) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dilakukan terhadap jumlah, kriteria, dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.
- (3) Hasil pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh PPK dan penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan spesifikasi teknis barang, meliputi merek, nomor seri barang, dan karakteristik barang lainnya;
 - a. dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan; dan
 - b. dibuatkan dokumen Berita Acara Penerimaan barang oleh PPK.

Pasal 30 menyatakan bahwa:

- (1) Penyedia barang melakukan input dokumen BAST yang dilengkapi dengan

foto/video/film basil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan memuat *geo tagging* ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian paling lambat 2 (dua) minggu pada saat Bantuan Pemerintah diserahkan di titik hagi.

- (2) Dalam hal daerah penerima Bantuan Pemerintah merupakan remote area yang tidak terdapat sinyal telekomunikasi, foto/video/film basil pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak memuat *geo tagging*.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sekaligus atau realisasi sisa pembayaran tahap akhir bagi pembayaran yang dilakukan dengan termin hanya dapat dilakukan apabila dokumen BAST telah diinput pada aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian.
- (4) Bantuan pemerintah berupa barang yang telah selesai diinput ke dalam aplikasi BAST bantuan Pemerintah dilakukan pemindahtanganan melalui mekanis hibah.

b. Aset Tetap

- 1) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 3) Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- 4) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- 5) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca.
- 6) Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca.
- 7) Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan.

c. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap

didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 90/PMK.06/2015 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Tabel A.5.2. Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Kementerian Pertanian belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan BMN) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 788/Kpts/PL.310/11/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertanian, sebagai berikut.

Tabel A.5.3. Pendelegasian Kewenangan BMN

Kegiatan		Pengelola Barang		
		KPKNL	Kanwil DJKN	PKNSI
		Tanah dan Bangunan		
		sd 5 M	>5 sd 10 M	>10 sd 25 M
Jenis dan Nilai BMN		Selain Tanah dan Bangunan		
		sd 2,5	>2,5 sd 5 M	>5 sd 10M
a.	Mendandatangani surat pernyataan, surat keterangan, dan naskah dinas lain terkait PSP BMN	Satker	Satker	Satker
b.	Mengusulkan sewa	Satker	Eselon I	Sekjen
c.	Penetapan pelaksana sewa dan penandatangan perjanjian sewa	Satker	Satker	Satker

Kegiatan		Pengelola Barang		
		KPKNL	Kanwil DJKN	PKNSI
Jenis dan Nilai BMN		Tanah dan Bangunan		
		sd 5 M	>5 sd 10 M	>10 sd 25 M
		Selain Tanah dan Bangunan		
		sd 2,5	>2,5 sd 5 M	>5 sd 10M
d.	Mengusulkan pinjam pakai	Satker	Eselon I	Sekjen
e.	Penandatanganan pinjam pakai	Eselon I	Eselon I	Eselon I
f.	Mengusulkan KSP	Satker	Eselon I	Sekjen
g.	Pemilihan Mitra KSP dan penandatanganan perjanjian Kerjasama	Satker	Satker	Satker

e. Properti Investasi

Pemerintah telah menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi (PSAP 17) yang penerapannya mulai berlaku efektif Tahun 2022. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

1) Identifikasi

Untuk menentukan apakah suatu BMN yang dicatat sebagai pos aset tetap tanah dan/atau pos aset tetap gedung dan bangunan memenuhi properti investasi, dapat dilakukan penilaian karakteristik kondisinya memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- BMN tanah yang intensi dalam jangka panjang (lebih dari 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan) untuk memperoleh kenaikan nilai, dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan untuk pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain (antar entitas pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah) dalam jangka pendek (dalam 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan). Intensi ini dapat berdasarkan kepada dokumentasi formal penatausahaan BMN, asersi manajemen dalam laporan keuangan atau informasi yang dipersamakan.
- BMN tanah namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan BMN, asersi manajemen atau informasi yang dipersamakan. BMN tanah yang oleh pengguna barang pada kementerian negara/lembaga belum ditentukan penggunaannya dalam jangka pendek, yaitu dalam 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan, sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan untuk pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain (antar entitas pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah).
- BMN gedung dan bangunan yang disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dipersamakan.
- BMN gedung dan bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi sesuai dengan dokumentasi formal penatausahaan BMN, asersi manajemen atau informasi yang dipersamakan.
- BMN properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan BMN, asersi manajemen dalam laporan keuangan atau informasi yang dipersamakan.

Suatu BMN yang dicatat sebagai tanah dan/atau gedung dan bangunan tidak memenuhi kriteria properti investasi memperhatikan karakteristik kondisinya memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a) BMN properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan untuk pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan untuk pelayanan kepada masyarakat. misalnya BMN properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan BMN. asersi manajemen dalam laporan keuangan atau informasi yang dipersamakan.
- b) Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dipersamakan.
- c) BMN properti yang secara substansinya digunakan sendiri. termasuk property yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri. properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri. dan property yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan BMN. asersi manajemen dalam laporan keuangan atau informasi yang dipersamakan.
- d) BMN properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian atau dokumen yang dipersamakan.
- e) BMN properti yang dimiliki untuk bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar. misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar. Dalam hal ini. identifikasi tunggal terhadap BMN properti dengan tarif sewa di bawah harga pasar tidak menjadikan BMN properti tersebut tidak memenuhi kriteria property investasi.
- f) BMN properti yang dimiliki untuk tujuan strategis berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan BMN. asersi manajemen dalam laporan keuangan atau informasi yang dipersamakan.
- g) BMN properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai tetapi sesekali disewakan kepada pihak lain berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan BMN. asersi manajemen dalam laporan keuangan atau informasi yang dipersamakan. Misalkan pemerintah memiliki BMN properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
- h) BMN Properti yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan BMN. asersi manajemen dalam laporan keuangan atau informasi yang dipersamakan.
- i) Untuk BMN properti yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. jika :
 - Masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual terpisah dan ditatausahakan BMN-nya tidak secara terpisah; atau
 - Masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah dan ditatausahakan BMN-nya secara terpisah. namun tidak memenuhi kriteria signifikansi properti investasi yaitu :
 - ❖ Luasan area bagian yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai kurang dari 3:4 (< 75%) atau luasan area yang

digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah lebih dari 1:4 ($> 25\%$); atau

- ❖ Intensitas BMN yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari pihak eksternal dengan perbandingannya kurang dari 3:4 ($< 75\%$) atau intensitas BMN dengan perbandingan lebih dari 1:4 ($> 25\%$) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

2) Analisis

Berdasarkan hasil identifikasi karakteristik tanah dan/atau bangunan apakah memenuhi kriteria Properti Investasi atau tidak. didapatkan beberapa tanah dan/atau bangunan yang memenuhi kriteria Properti Investasi. Hal tersebut didasarkan pada penggunaan tanah dan/atau bangunan yang secara pemanfaatannya digunakan untuk mendapatkan pendapatan sewa. dengan luasan yang disewakan lebih dari 75% luasan dari masing-masing NUP tanah dan/atau bangunan tersebut. Tanah dan/atau bangunan tersebut juga tidak digunakan dalam kegiatan pemerintahan ataupun dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tanah dan/atau bangunan tersebut juga tidak digunakan untuk bantuan sosial ataupun digunakan untuk tujuan strategis dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi.

3) Deklarasi

Sesuai dengan PMK Nomor 231/PMK.05/2022 properti yang diperoleh sebelum tahun 2022 dan memenuhi kriteria karakteristik pengakuan properti investasi. maka BMN properti dimaksud diakui sebagai properti investasi secara prospektif. yaitu nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/ atau pos Aset Lainnya. tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

f. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

g. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- 4) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.5.4. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

5) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

h. Aset Hewan Ternak dan Tanaman

- 1) Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 (*Audited*) masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.
- 2) Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.
- 3) Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 (*Audited*), kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B.1 PENDAPATAN**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp688.236.858.066,00 atau 126,15% dari estimasi pendapatan sebesar Rp545.563.838.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel B.1 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per Eselon I

Eselon I	Nilai Estimasi (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)	% Realisasi
SETJEN	14.464.326.000	18.248.413.562	126,16
ITJEN	15.000.000	148.650.007	991,00
DITJEN TP	6.078.227.000	13.772.836.783	226,59
DITJEN HORTI	719.016.000	2.182.382.035	303,52
DITJEN BUN	1.481.217.000	8.532.534.639	576,05
DITJEN PKH	112.984.567.000	205.649.594.368	182,02
DITJEN PSP	513.550.000	15.748.197.769	3066,54
BSIP	35.099.948.000	24.786.286.435	70,62
BPPSDMP	14.207.987.000	18.567.356.293	130,68
BKP	0	2.219.733.214	~
BARANTAN	360.000.000.000	378.380.872.961	105,11
JUMLAH	545.563.838.000	688.236.858.066	126,15

Pendapatan pada Badan Ketahanan Pangan (saat belum berubah numenklatur menjadi Badan Pangan Nasional) periode Tahun 2023 (Audited) berupa Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp116.850,00 dan Pengembalian Belanja Barang Anggaran Tahun Yang Lalu sebesar Rp2.219.616.364,00.

Rincian Estimasi pendapatan dan realisasi pendapatan berdasarkan kode akun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel B.1.1 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Kode Akun	Uraian	Nilai Estimasi (Rp)	Pendapatan Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Pendapatan Netto (Rp)	% Realisasi
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	61.401.752.000	79.561.835.479	0	79.561.835.479	129,58
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	542.168.200	0	542.168.200	-
4249	Pendapatan BLU Lainnya	0	7.405.639.705	0	7.405.639.705	-
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	57.045.551.000	61.019.575.240	0	61.019.575.240	106,97
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	44.954.699.000	65.435.982.931	0	65.435.982.931	145,56
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	320.969.100.000	321.362.983.377	9.539.550	321.353.443.827	100,12
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	22.044.234.000	14.569.625.743	0	14.569.625.743	66,09
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	38.994.967.000	56.290.130.444	0	56.290.130.444	144,35

Kode Akun	Uraian	Nilai Estimasi (Rp)	Pendapatan Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Pendapatan Netto (Rp)	% Realisasi
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	5.000.000	2.996.805.750	0	2.996.805.750	59.936,12
4258	Pendapatan Denda	29.429.000	6.786.159.340	0	6.786.159.340	23.059,43
4259	Pendapatan Lain-Lain	119.106.000	72.278.736.407	3.245.000	72.275.491.407	60.681,65
	Jumlah	545.563.838.000	688.249.642.616	12.784.550	688.236.858.066	126,15

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada **Lampiran B.1.1**

Pendapatan dengan nilai yang signifikan terdapat pada Eselon I Ditjen PKH dan Barantan dimana satker-satker dengan nilai pendapatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel B.1.2 Satker Barantan dengan Pendapatan Signifikan

No	Satker	Nilai Estimasi (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)
1	BKP Kls I Semarang	10.715.000.000	14.000.849.108
2	BBKP Surabaya	38.635.000.000	87.557.027.459
3	BBKP Belawan	13.528.200.000	18.245.163.857
4	BKP Kls I Balikpapan	4.676.000.000	6.660.861.113
5	BKP Kls I Bandar Lampung	13.180.000.000	16.886.500.088
6	BBKP Tanjung Priuk	51.783.200.000	117.268.266.927
7	BKP Kls II Cilegon	11.835.000.000	10.275.560.767
8	SKP Kls I Cilacap	1.360.000.000	1.750.027.350
	JUMLAH	145.712.400.000	272.644.256.669

Tabel B.1.3 Satker Ditjen PKH dengan Pendapatan Signifikan

No	Satker	Nilai Estimasi (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)
1	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali	1.150.800.000	2.776.759.791
2	Balai Embrio Ternak Cipelang	1.000.961.000	1.969.389.921
3	Balai Besar Veteriner Denpasar	950.000.000	4.018.040.040
4	Balai Veteriner Medan	501.000.000	1.843.044.290
5	Balai Veteriner Banjarbaru	475.003.000	870.218.125
6	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor	1.124.220.000	1.955.425.312
7	Balai Veteriner Wates Yogyakarta	1.900.000.000	6.349.675.351
	JUMLAH	7.101.984.000	19.782.552.830

Tabel B.1.4 Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Pendapatan	Realisasi Pendapatan Bruto 31 Desember 2023 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Pendapatan Netto 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi Pendapatan Netto 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	79.561.835.479	0	79.561.835.479	68.071.590.828	11.490.244.651
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	542.168.200	0	542.168.200	3.121.880.210	(2.579.712.010)
Pendapatan BLU Lainnya	7.405.639.705	0	7.405.639.705	4.315.982.043	3.089.657.662
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan	61.019.575.240	0	61.019.575.240	66.973.454.185	(5.953.878.945)

Uraian Pendapatan	Realisasi Pendapatan Bruto 31 Desember 2023 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Pendapatan Netto 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi Pendapatan Netto 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN					
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	65.435.982.931	0	65.435.982.931	49.445.237.775	15.990.745.156
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	321.362.983.377	9.539.550	321.353.443.827	315.999.316.302	5.354.127.525
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	14.569.625.743	0	14.569.625.743	30.284.907.408	(15.715.281.665)
Pendapatan Jasa Lainnya	56.290.130.444	0	56.290.130.444	61.261.724.667	(4.971.594.223)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	2.996.805.750	0	2.996.805.750	3.806.797.464	(809.991.714)
Pendapatan Denda	6.786.159.340	0	6.786.159.340	21.158.056.858	(14.371.897.518)
Pendapatan Lain-Lain	72.278.736.407	3.245.000	72.275.491.407	81.744.702.680	(9.469.211.273)
Jumlah	688.249.642.616	12.784.550	688.236.858.066	706.183.650.420	(17.946.792.354)

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp17.946.792.354,00) atau turun (2,54%) dibandingkan 31 Desember 2022. Apabila dilihat secara detail per akun terdapat peningkatan maupun penurunan nilai pendapatan. Hal tersebut dapat dijelaskan antara lain:

1. Meningkatnya Pendapatan Jasa Layanan Umum merupakan pelayanan BLU pada Ditjen PKH kepada masyarakat berupa semen beku pada satker BIB Lembang dan BBIB Singosari, dan Vaksin pada satker Pusat Veteriner Farma..
2. Menurunnya Pendapatan Hasil Kerjasama BLU berupa kerjasama dalam penggunaan lahan yang dimiliki oleh satker Pusvetma.
3. Meningkatnya Pendapatan BLU Lainnya merupakan pendapatan yang didapatkan dari jasa perbankan atas penyimpanan dana BLU di Bank.
4. Menurunnya Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan merupakan pendapatan dari penjualan, pengelolaan dan pemanfaatan BMN.
5. Meningkatnya Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum merupakan pendapatan yang berasal dari penerbitan izin dan pengujian laboratorium, sertifikasi serta kalibrasi.
6. Meningkatnya Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan dipengaruhi terjadinya peningkatan lalu lintas komoditas pertanian di pintu pemasukan dan pengeluaran (Ekspor, Impor dan antar area).
7. Menurunnya Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi.
8. Menurunnya Pendapatan Jasa Lainnya.
9. Menurunnya Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan berupa Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat serta Terhadap Pihak Ketiga.
10. Menurunnya pendapatan denda.
11. Menurunnya pendapatan lain-lain yang merupakan penerimaan kembali belanja atas tahun anggaran sebelumnya, terutama penerimaan kembali atas belanja barang tahun anggaran yang lalu.

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi PNPB per mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.1.2.**

B.1.1 Pendapatan BLU :

Realisasi Pendapatan BLU untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp87.509.643.384,00 dan Rp75.509.453.081,00. Realisasi Pendapatan BLU untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp87.509.643.384,00 atau 142,52% dari estimasi pendapatan BLU sebesar Rp61.401.752.000,00. Realisasi pendapatan BLU untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp12.000.190.303,00 atau 15,89% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2022. Berikut rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan BLU untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.

Tabel B.1.1.1 Perbandingan Pendapatan BLU untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Pendapatan	Nilai Estimasi 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi Pendapatan Netto 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi Pendapatan Netto 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	61.401.752.000	79.561.835.479	68.071.590.828	11.490.244.651
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	542.168.200	3.121.880.210	(2.579.712.010)
Pendapatan BLU Lainnya	0	7.405.639.705	4.315.982.043	3.089.657.662
Jumlah	61.401.752.000	87.509.643.384	75.509.453.081	12.000.190.303

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

1. Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar Rp79.561.835.479,00,00 merupakan pelayanan BLU pada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada masyarakat berupa semen beku pada satker BIB Lembang dan BBIB Singosari, dan Vaksin pada satker Pusat Veteriner Farma.
2. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU sebesar Rp542.168.200,00 yaitu pada Satker BLU PUSVETMA berupa kerjasama dalam penggunaan lahan yang dimiliki oleh satker Pusvetma.
3. Pendapatan BLU Lainnya sebesar Rp7.405.639.705,00 merupakan pendapatan yang didapatkan dari jasa perbankan atas penyimpanan dana BLU di Bank.

Selanjutnya, dapat dijelaskan realisasi pendapatan BLU sebesar Rp87.509.643.384,00 yang terdiri dari beberapa satker yakni sebagai berikut.

Tabel B.1.1.2 Rincian Pendapatan BLU Per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Es.1	Kode Satker	Nama Satker	Akun	Nama Akun	Nilai Estimasi 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi Pendapatan Netto 31 Desember 2023 (Rp)
01806	237551	Pusat Veteriner Farma Surabaya	424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	38.025.000	3.259.061.000
01806	237551	Pusat Veteriner Farma Surabaya	424118	Pendapatan Penyediaan Barang	-	1.383.720.838
01806	237551	Pusat Veteriner Farma Surabaya	424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	14.400.977.000	17.508.942.058
01806	237551	Pusat Veteriner Farma Surabaya	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	-	542.168.200

Es.1	Kode Satker	Nama Satker	Akun	Nama Akun	Nilai Estimasi 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi Pendapatan Netto 31 Desember 2023 (Rp)
01806	237551	Pusat Veteriner Farma Surabaya	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	2.278.565.510
01806	239001	Balai Inseminasi Buatan Lembang	424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	19.962.750.000	-
01806	239001	Balai Inseminasi Buatan Lembang	424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	-	27.777.849.787
01806	239001	Balai Inseminasi Buatan Lembang	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	927.144.876
01806	239001	Balai Inseminasi Buatan Lembang	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	-	20.979.000
01806	239001	Balai Inseminasi Buatan Lembang	424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU	-	27.000.000
01806	411956	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	26.961.150.000	18.933.942.900
01806	411956	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran	7.650.000	109.260.000
01806	411956	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	31.200.000	10.589.058.896
01806	411956	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	3.490.524.047
01806	411956	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	-	661.426.272
	TOTAL				61.401.752.000	87.509.643.384

B.1.2 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya :

Realisasi Pendapatan PNBPN untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp600.727.214.682,00 dan Rp630.674.197.339,00. Realisasi Pendapatan PNBPN untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp600.727.214.682,00 atau 124,08% dari estimasi pendapatan sebesar Rp481.162.086.000,00. Realisasi pendapatan PNBPN untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp29.946.982.657,00) atau turun(4,75%) dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2022.

Tabel B.1.2.1 Perbandingan Pendapatan PNBPN untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Pendapatan	Nilai Estimasi 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi Pendapatan Netto 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi Pendapatan Netto 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan	57.045.551.000	61.019.575.240	66.973.454.185	(5.953.878.945)
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	44.954.699.000	65.435.982.931	49.445.237.775	15.990.745.156
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	320.969.100.000	321.353.443.827	315.999.316.302	5.354.127.525
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	22.044.234.000	14.569.625.743	30.284.907.408	(15.715.281.665)
Pendapatan Jasa Lainnya	38.994.967.000	56.290.130.444	61.261.724.667	(4.971.594.223)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	5.000.000	2.996.805.750	3.806.797.464	(809.991.714)
Pendapatan Denda	29.429.000	6.786.159.340	21.158.056.858	(14.371.897.518)
Pendapatan Lain-Lain	119.106.000	72.275.491.407	81.744.702.680	(9.469.211.273)
Jumlah	484.162.086.000	600.727.214.682	630.674.197.339	(29.946.982.657)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBP Lainnya per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

1. Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan sebesar Rp321.353.443.827,00 yang berasal dari pelayanan jasa sertifikasi tindak karantina (Hewan dan Tumbuhan) yang berasal dari SIMPONI Barantan sebanyak 1.619.403 Kwitansi atas billing yang disetor ke kas negara dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.
2. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi merupakan pendapatan dari pelayanan jasa pendidikan, budaya, riset dan teknologi.
3. Pendapatan Jasa Lainnya, penerimaan paling besar terdapat pada Badan Karantina Pertanian berupa Pendapatan yang berasal dari Perjalanan pemeriksaan Tindak Karantina ke tempat/gudang pemasukan dan pengeluaran pengguna jasa karantina pertanian yang telah ditetapkan dan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp48.932.265.016,00. Sesuai surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-748/MK.02/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian/Lembaga, besaran penggunaan dana PNBPN untuk masing-masing Eselon I sebagai berikut.
 - Satuan Kerja Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Pangan dan Perizinan Pertanian, Setjen, Penggunaan dana PNBPN paling tinggi sebesar 58,00%
 - Ditjen TP, Penggunaan dana PNBPN paling tinggi sebesar 66,05%
 - Ditjen Bun, Penggunaan dana PNBPN paling tinggi sebesar 80,00%
 - Ditjen PKH, Penggunaan dana PNBPN paling tinggi sebesar 67,00%
 - BSIP, Penggunaan dana PNBPN paling tinggi sebesar 95,00%
 - BPPSDMP, Penggunaan dana PNBPN paling tinggi sebesar 86,00%
 - Barantan, Penggunaan dana PNBPN paling tinggi sebesar 70,00%
4. Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan yang berasal dari angsuran dan pelunasan TP/TGR.
5. Pendapatan Denda merupakan penerimaan yang berasal dari denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
6. Pendapatan lain-lain dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel B.1.2.2 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-lain

Kode Akun	Uraian	Nilai Estimasi (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)	% Realisasi
4259	Pendapatan Lain-lain			
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	9.723.000	2.029.906.697	20.877,37
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	109.383.000	67.079.459.470	61.325,31
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	0	3.055.131.015	-
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran yang Lalu	0	500.000	-
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	25.424.700	
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	8.443.020	-
425997	Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan	0	34.031.500	
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	42.595.005	-
	Jumlah Pendapatan	119.106.000	72.275.491.407	60.681,65

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

1. Realisasi akun Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu secara signifikan terdapat pada Eselon I Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen PKH, Ditjen PSP dan BKP.
2. Pada Ditjen PSP Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (425912) sebesar Rp13.187.621.629,00 merupakan pengembalian atas belanja barang tahun anggaran yang lalu, diantaranya berasal dari kegiatan bantuan pemerintah TA 2022, pengembalian perjalanan dinas tahun anggaran yang lalu, serta pengembalian belanja barang dan jasa tahun anggaran yang lalu.
3. Pada BKP Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (425912) sebesar Rp2.219.616.364,00, berasal dari kegiatan perjalanan dinas,
4. Pada Ditjen Tanaman Pangan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (425912) sebesar Rp5.442.314.836,00, diantaranya berasal dari kegiatan pelepasan stock Cadangan Beras Pemerintah (CBP), serta pengadaan Inari Mesin Pengereng Gabah Tipe Sirkulasi.
5. Pada Ditjen PKH Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (425912) sebesar Rp42.094.820.231,00 berupa Kelebihan belanja operasional penandaan dan pendataan ternak akibat double input pembayaran pada Aplikasi SAKTI sebesar Rp396.966.250,00 Kelebihan Pembayaran TA 2022 sebesar Rp167.590.000,00 Kelebihan pembayaran TA 2021 dan 2022 sebesar Rp119.462.574,00. Pengembalian atas pengadaan bantuan ternak TA 2022 yang gagal dilaksanakan sebesar Rp2.355.054.422,00. Pengembalian atas kelebihan pembayaran kompensasi PMK sebesar Rp1.237.574.376,00 Pengembalian Kelebihan Pengadaan Vaksin PMK sebesar Rp3.291.682.974.300,00. Pengembalian belanja perjalanan tahun 2022 sebesar Rp647.315.911,00,00. Pengembalian Uang Muka Pengadaan Sapi Indukan Tahun 2022 sebesar Rp574.771.650,00

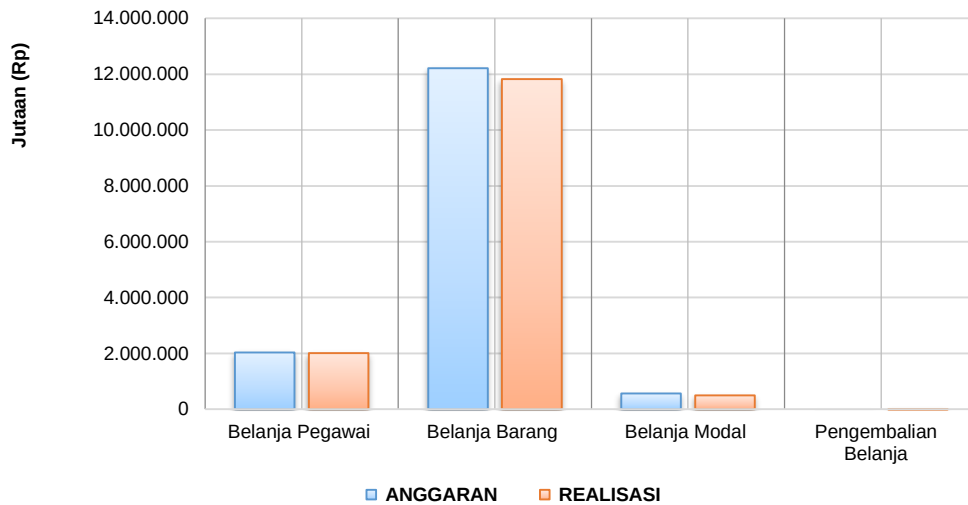
B.2. BELANJA

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.315.456.911.043,00 atau 96,67% dari anggaran belanja sebesar Rp14.808.873.722.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel B.2.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

Uraian	Periode yang berakhir 31 Desember 2023				% Real Anggaran
	Anggaran (Rp)	Realisasi bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	
Belanja Pegawai	2.035.612.929.000	2.013.679.450.028	1.014.145.425	2.012.665.304.603	98,87
Belanja Barang	12.209.414.063.000	11.821.712.667.004	12.196.316.198	11.809.516.350.806	96,72
Belanja Modal	563.846.730.000	493.350.919.569	75.663.935	493.275.255.634	87,48
Jumlah	14.808.873.722.000	14.328.743.036.601	13.286.125.558	14.315.456.911.043	96,67

Komposisi anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Gambar B.2.



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk periode Tahun Anggaran 2023 ditunjukkan pada Tabel B.2.2.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

Uraian Program Kementerian Pertanian	Anggaran (Rp)	Realisasi bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi netto (Rp)	% Realisasi
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	844.790.019.000	836.459.954.136	3.580.774.303	832.879.179.833	98,59
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.825.440.428.000	1.691.202.218.807	1.113.353.127	1.690.088.865.680	92,59
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	7.949.054.436.000	7.665.715.256.434	4.837.977.456	7.660.877.278.978	96,37
Program Dukungan Manajemen	4.189.588.839.000	4.135.365.607.224	3.754.020.672	4.131.611.586.552	98,62
Jumlah	14.808.873.722.000	14.328.743.036.601	13.286.125.558	14.315.456.911.043	96,67

Berdasarkan pada tabel B.2.2 di atas, berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan program pada **Lampiran B.2**.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp14.315.456.911.043,00 apabila dibandingkan dengan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp15.647.068.932.251,00 mengalami penurunan sebesar (Rp1.331.612.021.208,00) atau (8,51%). Hal ini disebabkan secara signifikan dipengaruhi oleh:

1. adanya proses revisi anggaran menyesuaikan dengan kebijakan prioritas pengelolaan kegiatan dan anggaran pemerintah pusat;
2. adanya penghematan/pemotongan anggaran berupa pemblokiran anggaran (*Automatic Adjustment*);
3. Tahun 2023 BKP telah menjadi entitas tersendiri bernama BAPANAS sehingga berpengaruh terhadap anggaran dan realisasi Kementerian Pertanian.

Berikut rincian Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.

**Tabel B.2.3 Perbandingan Realisasi Belanja untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2023 (Rp)	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Belanja Pegawai	2.035.612.929.000	2.012.665.304.603	2.280.067.871.000	2.235.033.530.507	(222.368.225.904)
Belanja Barang	12.209.414.063.000	11.809.516.350.806	13.474.559.625.000	12.766.093.092.775	(956.576.741.969)
Belanja Modal	563.846.730.000	493.275.255.634	689.326.665.000	645.942.308.969	(152.667.053.335)
Jumlah	14.808.873.722.000	14.315.456.911.043	16.443.954.161.000	15.647.068.932.251	(1.331.612.021.208)

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.012.665.304.603,00 dan Rp2.235.033.530.507,00. Realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp222.368.225.904,00) atau (9,95%) dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi karena adanya peralihan/mutasi pegawai dari Kementerian Pertanian Badan Pangan Nasional (Bapanas). Jumlah Pegawai Kementerian Pertanian tahun 2022 sebanyak 14.842 orang, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 14.418 orang.

Jumlah dan komposisi pegawai per eselon 1 berdasarkan jabatan pegawai dapat dilihat pada **Lampiran B.3.1**.

**Tabel B.3.1. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian Belanja Pegawai	Realisasi Bruto 31 Desember 2023 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	1.013.904.042.026	683.419.165	1.013.220.622.861	1.154.756.557.904	(141.535.935.043)
Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	1.941.472.650	0	1.941.472.650	1.943.772.775	(2.300.125)
Belanja Gaji & Tunjangan Non PNS	0	0	0	580.454.000	(580.454.000)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	3.057.024.850	0	3.057.024.850	126.496.800	2.930.528.050
Belanja Lembur	49.618.159.600	2.068.300	49.616.091.300	48.114.919.650	1.501.171.650
Belanja Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	945.158.750.902	328.657.960	944.830.092.942	1.029.511.329.378	(84.681.236.436)
Jumlah	2.013.679.450.028	1.014.145.425	2.012.665.304.603	2.235.033.530.507	(222.368.225.904)

Tabel B.3.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per Eselon I

Eselon I	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian Belanja	Realisasi Netto	% Realisasi
SETJEN	1.029.014.573.000	1.018.408.200.771	351.385.184	1.018.056.815.587	98,94
ITJEN	20.922.074.000	20.103.964.333	20.902.622	20.083.061.711	95,99
DITJEN TP	41.224.291.000	40.010.416.210	25.046.213	39.985.369.997	96,99
DITJEN HORTI	23.327.399.000	23.316.874.811	371	23.316.874.440	99,95

Eselon I	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian Belanja	Realisasi Netto	% Realisasi
DITJEN BUN	55.078.590.000	53.104.024.061	17.562.620	53.086.461.441	96,38
DITJEN PKH	134.837.778.000	133.770.276.850	22.890.676	133.747.386.174	99,19
DITJEN PSP	23.370.261.000	22.286.281.955	11.450.756	22.274.831.199	95,31
BSIP	271.940.635.000	269.346.716.853	488.095.068	268.858.621.785	98,87
BPPSDMP	133.286.759.000	132.556.900.583	35.456.230	132.521.444.353	99,43
BARANTAN	302.610.569.000	300.775.793.601	41.355.685	300.734.437.916	99,38
Jumlah	2.035.612.929.000	2.013.679.450.028	1.014.145.425	2.012.665.304.603	98,87

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 per mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.3.2**

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.809.516.350.806,00 dan Rp12.766.093.092.775,00. Rincian Realisasi Belanja Barang untuk masing - masing Eselon I disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.4.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per Eselon I

Eselon I	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian Belanja	Realisasi Netto	% Realisasi
SETJEN	301.887.412.000	299.923.565.526	233.573.806	299.689.991.720	99,27
ITJEN	106.528.249.000	105.312.520.233	1.134.255.157	104.178.265.076	97,79
DITJEN TP	3.357.460.095.000	3.175.602.884.450	1.737.506.605	3.173.865.377.845	94,53
DITJEN HORTI	875.965.781.000	851.615.569.330	48.701.113	851.566.868.217	97,21
DITJEN BUN	808.552.977.000	769.813.020.489	124.512.626	769.688.507.863	95,19
DITJEN PKH	1.923.073.695.000	1.876.279.189.172	2.443.854.049	1.873.835.335.123	97,44
DITJEN PSP	2.662.455.328.000	2.614.851.628.556	2.281.600.563	2.612.570.027.993	98,13
BSIP	561.745.647.000	530.229.188.801	273.501.627	529.955.687.174	94,34
BPPSDMP	950.468.025.000	941.677.152.833	3.830.504.917	937.846.647.916	98,67
BARANTAN	661.276.854.000	656.407.947.614	88.305.735	656.319.641.879	99,25
Jumlah	12.209.414.063.000	11.821.712.667.004	12.196.316.198	11.809.516.350.806	96,72

Untuk perbandingan realisasi belanja barang akun detail untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.4.2 Perbandingan Realisasi Belanja Barang akun Detail untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Belanja Barang	Realisasi Bruto 31 Desember 2023 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Belanja Barang Operasional	541.999.047.706	191.413.871	541.807.633.835	540.716.103.560	1.091.530.275
Belanja Barang Non Operasional	1.906.065.521.879	613.750.844	1.905.451.771.035	2.116.889.208.649	(211.437.437.614)
Belanja Kontribusi	661.512.000	0	661.512.000	944.945.922	(283.433.922)

Uraian Belanja Barang	Realisasi Bruto 31 Desember 2023 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Belanja Barang Persediaan	409.414.668.299	33.400	409.414.634.899	2.099.683.318.993	(1.690.268.684.094)
Belanja Jasa	534.770.913.924	575.215.226	534.195.698.698	602.784.788.053	(68.589.089.355)
Belanja Pemeliharaan	304.776.962.033	354.146.401	304.422.815.632	286.559.936.262	17.862.879.370
Belanja Perjalanan DN	1.904.678.210.292	6.962.724.257	1.897.715.486.035	1.924.417.757.967	(26.702.271.932)
Belanja Perjalanan LN	24.137.836.571	323.402.266	23.814.434.305	20.770.787.434	3.043.646.871
Belanja Barang BLU	78.907.430.134	0	78.907.430.134	53.550.484.170	25.356.945.964
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	2.284.396.774.529	1.416.127.733	2.282.980.646.796	2.306.385.757.342	(23.405.110.546)
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	444.635.000	0	444.635.000	2.710.380.434	(2.265.745.434)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	3.831.459.154.637	1.759.502.200	3.829.699.652.437	2.810.679.623.989	1.019.020.028.448
Jumlah	11.821.712.667.004	12.196.316.198	11.809.516.350.806	12.766.093.092.775	(956.576.741.969)

Realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp956.576.741.969,00) atau (7,49%) dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan secara signifikan dipengaruhi oleh menunggu proses kesiapan kontrak dan ketersediaan barang (*e-katalog*) yang lebih lama. Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 per mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.4.1**.

Berikut ini disajikan rincian anggaran dan realisasi belanja barang kelompok akun detail :

Tabel B.4.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang akun Detail untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

Uraian Belanja Barang	Anggaran	Realisasi Netto	% Realisasi
Belanja Barang Operasional	547.004.204.000	541.807.633.835	99,05
Belanja Barang Non Operasional	1.980.901.266.000	1.905.451.771.035	96,19
Belanja Kontribusi	676.098.000	661.512.000	97,84
Belanja Barang Persediaan	414.350.417.000	409.414.634.899	98,81
Belanja Jasa	556.530.318.000	534.195.698.698	95,99
Belanja Pemeliharaan	308.516.804.000	304.422.815.632	98,67
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.965.129.174.000	1.897.715.486.035	96,57
Belanja Perjalanan Luar Negeri	24.935.925.000	23.814.434.305	95,50
Belanja Barang BLU	81.300.994.000	78.907.430.134	97,06
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	2.305.251.157.000	2.282.980.646.796	99,03
Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	447.513.000	444.635.000	99,36
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	4.024.370.193.000	3.829.699.652.437	95,16
Jumlah	12.209.414.063.000	11.809.516.350.806	96,72

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Jumlah realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp6.116.300.564.166,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp3.175.629.933,00 sehingga realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) neto adalah sebesar Rp6.113.124.934.233,00 atau 96,57% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp6.330.068.863.000,00.

Dari jumlah realisasi belanja MAK 526, dapat dikelompokkan untuk belanja bantuan pemerintah berupa barang sebesar Rp5.317.009.065.665,00 dan belanja bantuan pemerintah berupa uang sebesar Rp796.115.868.568,00.

Tabel B.4.4 Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Eselon 1

Eselon I	Banper Uang		Banper Barang		Total	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Ditjen TP	36.888.965.000	36.493.481.000	2.822.799.318.000	2.666.880.090.105	2.859.688.283.000	2.703.373.571.105
Ditjen Horti	132.178.120.000	131.985.970.010	474.719.280.000	458.876.270.761	606.897.400.000	590.862.240.771
Ditjen Bun	6.058.287.000	5.813.945.000	430.763.731.000	423.352.233.302	436.822.018.000	429.166.178.302
Ditjen PKH	660.000.000	615.000.000	289.203.581.000	283.905.186.789	289.863.581.000	284.520.186.789
Ditjen PSP	600.557.959.000	586.299.815.650	1.494.145.247.000	1.477.457.913.661	2.094.703.206.000	2.063.757.729.311
BPPSDMP	35.201.014.000	34.907.656.908	6.893.361.000	6.537.371.047	42.094.375.000	41.445.027.955
Total	811.544.345.000	796.115.868.568	5.518.524.518.000	5.317.009.065.665	6.330.068.863.000	6.113.124.934.233

Rincian Jenis Bantuan Pemerintah berdasarkan program dapat dilihat pada **Lampiran B.4.2**.

Penjelasan alokasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda masing-masing Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Ditjen TP

Tahun 2023 adalah tahun keempat masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah satu agenda pembangunan RPJMN IV adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas melalui peningkatan inovasi dan investasi pangan dan pertanian.

Peran subsektor Tanaman Pangan semakin strategis karena mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi, ekspor, dan peningkatan penggunaan fasilitas KUR untuk pengembangan usaha pertanian.

Dalam rangka memperkuat keberhasilan subsektor Tanaman Pangan, Program dan anggaran Ditjen Tanaman Pangan 2023 dialokasikan untuk mendukung program Utama Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil Tanaman Pangan.

Dari sasaran Strategis Kementerian Pertanian, dijabarkan ke dalam Sasaran Program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai berikut :

- Meningkatnya ketersediaan pangan strategis, peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai
- Meningkatnya ketersediaan pangan lokal non beras, peningkatan produksi aneka umbi, dan kacang

- Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI
- Meningkatnya nilai tambah Komoditas Tanaman Pangan dan
- Meningkatnya daya saing komoditas tanaman pangan

Dalam pelaksanaan sasaran strategis, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memberikan Bantuan Pemerintah berupa Benih, Saprodi, Alsintan Panca Panen serta bantuan penanganan OPT dan DPI kepada kelompok tani sesuai Calon Lokasi Calon Penerima (CPCL) yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK.).

Realisasi belanja bantuan pemerintah (526) terdiri dari bentuk barang sebesar Rp2.666.880.090.105,00 atau 94,48% dan transfer uang 36.493.481.000,00 atau 98,93% dari total pagu banpem Rp2.859.688.283.000,00 terdapat pada **Lampiran B.4.3.**

Pada Ditjen Tanaman Pangan terdapat usulan jurnal koreksi BPK RI sebesar Rp12.490.412.970,00 atas pelaksanaan pengadaan barang untuk belanja bantuan pemerintah pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan belum sesuai ketentuan dan terdapat pembayaran atas kontrak yang tidak selesai sebesar Rp597.057.000,00.

2. Ditjen Hortikultura

Anggaran Belanja bantuan pemerintah (526) pada Ditjen Hortikultura untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp606.897.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp590.862.240.771,00 atau 97,36% dari total pagu terdiri dari realisasi bantuan pemerintah bentuk barang sebesar Rp474.719.280.000,00 dan belanja bantuan pemerintah bentuk uang sebesar Rp132.178.120.000,00 Rincian belanja bantuan pemerintah dalam bentuk barang dan uang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel B.4.5 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Ditjen Hortikultura Tahun 2023

KEGIATAN	JENIS BANTUAN	PAGU	REALISASI	%
PENINGKATAN PRODUKSI SAYURAN DAN TANAMAN OBAT	BARANG	199.443.433.000	185.168.690.439	92,84
	UANG	86.753.000.000	86.633.012.800	99,86
PERLINDUNGAN HORTIKULTURA	BARANG	22.844.384.000	22.778.061.236	99,71
	UANG	-	-	0,00
PENINGKATAN USAHA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA	BARANG	-	-	0,00
	UANG	-	-	0,00
PERBENIHAN HORTIKULTURA	BARANG	139.710.220.000	138.907.943.900	99,43
	UANG	-	-	0,00
PENINGKATAN PRODUKSI BUAH DAN FLORIKULTURA	BARANG	56.484.648.000	56.170.507.106	99,44
	UANG	9.350.000.000	9.344.413.400	99,94
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA	BARANG	56.236.595.000	55.851.068.080	99,31
	UANG	36.075.120.000	36.008.543.810	99,82
JUMLAH	BARANG	474.719.280.000	458.876.270.761	96,66
	UANG	132.178.120.000	131.985.970.010	99,85
TOTAL KESELURUHAN		606.897.400.000	590.862.240.771	97,36

Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura yang masuk ke dalam bantuan pemerintah terdiri dari :

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas didukung oleh kegiatan:

- a. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat berupa :
 - Sarana pengembangan kawasan pada kawasan bawang merah, kawasan aneka cabai, kawasan bawang putih, kawasan kentang, kawasan sayuran lain, kawasan tanaman obat, dan kawasan jahe, kawasan sayuran dan tanaman obat mendukung Food Estate, serta Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat mendukung Korporasi
 - Prasarana Bidang Pertanian dalam bentuk Prasarana Budidaya Sayuran dan Tanaman Obat
 - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (Pekarangan Pangan Lestari / Pekarangan Hortikultura Lestari)
- b. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura berupa :
 - Sarana pengembangan kawasan pada kawasan pisang, manggis, durian, mangga, kelengkeng, alpukat, jeruk, buah lain, kawasan buah dan florikultura mendukung Food Estate, kawasan buah dan florikultura mendukung korporasi, kawasan krisan, anggrek, serta florikultura lain
 - Prasarana Bidang Pertanian dalam bentuk Prasarana Budidaya Buah dan Florikultura
- c. Perbenihan Hortikultura berupa :
 - Sarana pengembangan kawasan pada benih sumber batang hortikultura, benih sebar batang hortikultura, benih sebar umbi/rimpang, benih hortikultura lainnya, perbenihan mendukung Food Estate.
 - Prasarana Bidang Pertanian dalam bentuk Prasarana Perbenihan Hortikultura
- d. Perlindungan Hortikultura pada Sarana Pengembangan Kawasan Area Pengendalian OPT Hortikultura, Area Penanganan DPI Hortikultura, dan Perlindungan Hortikultura mendukung Food Estate.

2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri didukung oleh kegiatan :

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang terdiri dari :

- a. Sarana bidang pertanian antara lain sarana pascapanen hortikultura, sarana pengolahan hortikultura, sarana pemasaran hortikultura
- b. Prasarana bidang pertanian antara lain prasarana pascapanen hortikultura dan prasarana pengolahan hortikultura
- c. Promosi Produk Hortikultura
- d. Sarana Pengembangan Kawasan antara lain Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mendukung Korporasi serta Food Estate, serta *Horticulture Development of Drylands Area Project*

Jenis bantuan pemerintah pada kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi bantuan sarana/prasarana, rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan, bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan pengguna anggaran (PA), serta pemberian penghargaan.

Penjabaran bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah pada kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura untuk jenis Bantuan yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA (Pengguna Anggaran) sebagaimana diatur

dalam Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2023 pada pasal 2 ayat 3 dan 4 meliputi:

1. Bantuan benih dan bantuan budidaya tanaman dengan jenis bantuan: (a) Bantuan sarana produksi pengembangan Kawasan/Kampung (b) Fasilitasi benih hortikultura
 2. Bantuan perlindungan tanaman dan dampak perubahan iklim (DPI) dengan jenis bantuan: (a) Bantuan bahan pengendali OPT Hortikultura ramah lingkungan (b) Fasilitasi penanganan DPI
 3. Bantuan Promosi dengan jenis bantuan: Dukungan penyerapan produk hortikultura
- Sedangkan kegiatan bantuan pemerintah pada lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi :

1. Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat pada Tahun 2023 dilakukan melalui pendekatan kampung dan kawasan. Pendekatan kampung sayuran dan tanaman obat dilaksanakan dalam 1 (satu) wilayah administratif desa/kampung yang sama dengan luasan minimal 5 (lima) dan/atau 10 (sepuluh) hektar sesuai kriteria teknis budidaya. Pengembangan kampung sayuran dan tanaman obat merupakan salah satu model pengembangan kawasan dengan pendekatan terintegrasi yang memperhatikan kesesuaian agroekosistem, masyarakat antusias merawat tanaman serta komitmen tinggi dari pimpinan daerah setempat sehingga dapat dibangun kawasan hortikultura skala ekonomi. Arah pengembangan kampung sayuran dan tanaman obat diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan produk segar maupun olahan dalam negeri dan ekspor. Pengembangan kampung dan kawasan untuk komoditas bawang merah dan bawang putih dilakukan melalui metode ekstensifikasi dan intensifikasi. Metode ekstensifikasi adalah budidaya bawang pada lahan baru atau secara intensifikasi di lahan eksisting melalui indeks peningkatan pertanaman.

Eksistensi Kampung STO ditandai dengan berbagai penciri diantaranya lahan budidaya yang terkonsolidasi dalam satu wilayah setingkat Desa/Kelurahan, tumbuh dan berkembangnya unit-unit usaha dalam kelembagaan Kampung STO salah satunya berbentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis produk sayuran dan tanaman obat, kelembagaan yang lebih kuat, modern dan profesional serta adanya penanda berupa papan nama identitas Kampung STO yang merupakan fasilitasi bantuan pemerintah dari Direktorat Jenderal Hortikultura.

Salah satu kegiatan bantuan pemerintah dari Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)/Pekarangan Hortikultura Lestari (PHL) merupakan pemberdayaan kelompok masyarakat untuk budidaya tanaman hortikultura melalui kegiatan perbenihan, demplot, pertanaman dan penanganan pascapanen. Kegiatan P2L/PHL dapat dilakukan pada lahan pekarangan / lahan tidur dan/ atau lahan kosong yang tidak produktif, dan/ atau lahan di sekitar rumah/ bangunan tempat tinggal/ fasilitas publik, serta lingkungan lainnya dengan batas kepemilikan yang jelas seperti asrama, pondok pesantren, rusun dan rumah ibadah, dan lainnya. Kegiatan P2L / PHL dilaksanakan dengan komponen kegiatan yang terdiri dari sarana perbenihan, demplot, pertanaman dan sarana pascapanen/pemasaran.

Pada periode Semester II TA 2023, realisasi belanja bantuan pemerintah pada kegiatan peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat sebesar Rp271.801.703.239,00 atau 94,97% dari pagu anggaran sebesar Rp286.196.433.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel B.4.6 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah
Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat**

KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KEUANGAN		FISIK			BENTUK BANTUAN
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET	REALISASI	SATUAN	
1771CAI	Sarana Pengembangan Kawasan	63.668.739.000	63.663.112.827	1.368	1.368	Ha	Kawasan Sayuran lainnya: (Sayuran Daun dan Bawang Bombay) Benih bermutu. Pupuk anorganik. Pupuk organik. Pupuk hayati. Dolomit. Pembenah tanah. Mulsa Pekarangan Pangan Lestari / Pekarangan Hortikultura Lestari : Sarana Perbenihan. Demplot . Pertanian. Sarana Pascapanen
1771CBK	Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup	23.703.000.000	23.583.012.800	123	123	unit	Prasarana Budidaya Sayuran dan Tanaman Obat : Green House. Kubung Jamur. Hidroponik
1771RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	198.824.694.000	184.555.577.612	18.865	18.865	Ha	Kawasan Bawang Merah Pupuk anorganik. Pupuk organik. Pupuk hayati. Dolomit. Mulsa. Sungkup plastik <u>Kemitraan Champion :</u> Soil Block utk Produksi Seedling TSS. Pembenah Tanah. Sarana Pengendali Dampak Perubahan Iklim (Sungkup Plastik. Irigasi Sederhana. Sprinkler)
							Kawasan Aneka Cabai : Benih bermutu. Mulsa. Pupuk organik. Pupuk anorganik. Soil block <u>Kemitraan Champion :</u> Seedling asal Soil block. pembenah tanah. Sarana Pengendali Dampak Perubahan Iklim (Rain Shelter. Irigasi Sederhana. Sprinkler. Pompa Air). Power Sprayer
							Kawasan Tanaman Obat dan Jahe : Pupuk Organik. Pupuk Anorganik. Pupuk Hayati. Pembenah tanah
							Kawasan Bawang Putih : Pupuk anorganik. Pupuk organik. Pupuk hayati. Mulsa. Pembenah Tanah. Dolomit
							Kawasan Kentang :
							Pupuk anorganik. Pupuk organik. Pupuk hayati. Dolomit. Pembenah Tanah

KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KEUANGAN		FISIK			BENTUK BANTUAN
		PAGU	REALISASI	TARGET	REALISASI	SATUAN	
		(Rp)	(Rp)				
							Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat mendukung Food Estate : (Kentang. Bawang Merah. Bawang Putih. Bawang Bombay. Aneka Cabai. Tanaman Obat. Sayuran daun) Benih bermutu. Pupuk anorganik. Pupuk organik. Pupuk hayati. Dolomit. Pembenah tanah. Mulsa
							Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat mendukung Korporasi : (Bawang Merah. Aneka Cabai. Tanaman Obat. Sayuran daun. Jamur) Benih bermutu. Pupuk anorganik. Pupuk organik. Pupuk hayati. Dolomit. Pembenah tanah. Mulsa
TOTAL		286.196.433.000	271.801.703.239				

2. Kegiatan Perlindungan Hortikultura

Kegiatan bantuan pemerintah pada Direktorat Perlindungan Hortikultura berupa Area Pengendalian OPT Hortikultura dan Area Penanganan DPI Hortikultura yang dilaksanakan oleh Pusat dan UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Dinas Pertanian Provinsi, serta Pengendalian Hortikultura mendukung Food Estate berupa Fasilitas Pengendalian OPT, Fasilitas Bantuan Sarana Prasarana Klinik PHT, dan Fasilitas Bantuan Sarana Prasarana Penanganan DPI.

Pelaksanaan kegiatan Area Pengendalian OPT Hortikultura dilaksanakan dengan melakukan persiapan, fasilitas pengendalian OPT Hortikultura, fasilitas bantuan sarpras klinik PHT/ PPAH, Informasi Data Keadaan Serangan dan Pelaporan OPT, dan Pendampingan dan pengawalan. Sedangkan pelaksanaan kegiatan Area Penanganan DPI Hortikultura dilaksanakan dengan melakukan Inventarisasi Data/persiapan, Fasilitas bantuan sarana prasarana penanganan DPI, dan pendampingan dan pengawalan.

Komponen bantuan pemerintah kegiatan perlindungan hortikultura adalah sebagai berikut :

1. Area Pengendalian OPT Hortikultura berupa: Fasilitas Pengendalian OPT, Fasilitas Bantuan Sarana Prasarana Klinik PHT
2. Area Penanganan DPI Hortikultura berupa: Fasilitas Bantuan Sarana Prasarana Penanganan DPI
3. Perlindungan Hortikultura Mendukung Food Estate berupa: Fasilitas Pengendalian OPT, Fasilitas Bantuan Sarana Prasarana Klinik PHT, dan Fasilitas Bantuan Sarana Prasarana Penanganan DPI

Realisasi belanja bantuan pemerintah pada kegiatan perlindungan hortikultura sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp22.778.061.23,00 atau 99,71% dari pagu anggaran sebesar Rp22.844.384.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel B.4.7 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah
Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hortikultura**

KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KEUANGAN		FISIK			BENTUK BANTUAN
		PAGU	REALISASI	TARGET	REALISASI	SATUAN	
		(Rp)	(Rp)				
1773QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (Penerapan PHT)	43.200.000	143.164.792	120	123	kelompok masyarakat	
1773RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	22.801.184.000	22.734.896.444	10.485	10.579	Ha	Area Pengendalian OPT : Agens Hayati. Pestisida Nabati. Perangkap OPT. atraktan. feromon sex. sarana klinik PHT Area Penanganan DPI :
							Sarana antisipasi dan mitigasi DPI (pompa/embung/irigasi tetes/ sumur/ biopori/dll)
							Perlindungan mendukung Food Estate : Pestisida Nabati. APH. Perangkap OPT. atraktan. feromon sex. sarana klinik PHT. sarana antisipasi dan mitigasi DPI
TOTAL		22.844.384.000	22.778.061.236				

3. Kegiatan Perbenihan Hortikultura

Komponen Bantuan Pemerintah pada kegiatan Perbenihan Hortikultura antara lain :

- Benih Sumber Batang Hortikultura berupa perbanyakan benih
- Benih Sebar / Umbi Rimpang, Benih Sebar Batang, dan Benih Hortikultura Lainnya berupa penyediaan benih
- Sarana Prasarana Benih Hortikultura berupa Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Benih Hortikultura

Kegiatan berupa Benih Sebar Umbi/Rimpang Hortikultura, Benih Sebar Batang Hortikultura, Benih Hortikultura Lainnya, serta Prasarana Perbenihan Hortikultura. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura bekerjasama dengan BBH, Penangkar dibawah binaan BPSB, dan instansi terkait yang ditunjuk.

Penyediaan benih umbi/rimpang seperti benih bawang merah, bawang putih, kentang, dan sayuran lainnya dan tanaman obat diperlukan untuk peningkatan ketersediaan benih unggul bermutu. Sedangkan penyediaan benih batang dan benih hortikultura lainnya dalam mendukung pengembangan kawasan hortikultura diperlukan dalam jumlah cukup. Produksi benih bermutu memerlukan prasarana yang tepat dan mampu menunjang proses produksi dan memperkuat produsen benih dalam menghasilkan benih unggul. Sedangkan fasilitasi prasarana perbenihan hortikultura dimaksudkan untuk mendukung terlaksananya

proses produksi komoditas. Fasilitasi ini ditargetkan kepada BBH dan penangkar/produsen benih yang memproduksi benih hortikultura. Realisasi belanja bantuan pemerintah pada kegiatan perbenihan hortikultura per 31 Desember 2023 sebesar Rp138.907.943.900,00 atau 99,43% dari pagu anggaran sebesar Rp139.710.220.000,00. Bentuk bantuan pemerintah pada kegiatan perbenihan adalah sebagai berikut :

Tabel B.4.8 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Kegiatan Perbenihan Hortikultura

KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KEUANGAN		FISIK			BENTUK BANTUAN
		PAGU	REALISASI	TARGET	REALISASI	SATUAN	
		(Rp)	(Rp)				
4581CAG	Sarana Bidang Pertanian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	157.030.000	156.352.000	670.313	667.313	batang	Benih Sumber Batang Hortikultura : (Pisang. Jeruk. Durian. Mangga. Lengkeng. Alpukat. Salak. Nanas) TRANSFER UANG SESUAI RUK
4581CAI	Sarana Pengembangan Kawasan	7.120.486.000	7.119.482.500	50	50	unit	Benih Hortikultura Lainnya : Fasilitasi Benih Hortikultura
4581PDC	Sertifikasi Produk	59.650.000	59.429.400	10	5.853	unit	Sertifikat Benih Hortikultura
4581RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	132.373.054.000	131.572.680.000	73.576	73.757	Batang	Benih Sebar Umbi /Rimpang Hortikultura : (Kentang. Bawang Putih. Bawang Merah) TRANSFER UANG SESUAI RUK (HORTIKULTURA - Bawang Putih. benih bawang merah TSS dan umbi. benih rimpang. benih kentang) BENIH SEBAR
TOTAL		139.710.220.000	138.907.943.900				

4. Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

Kegiatan peningkatan produksi buah dan florikultura dilaksanakan melalui pendekatan kampung buah dan florikultura. Pendekatan kampung buah dilaksanakan dalam 1 (satu) wilayah administratif desa dengan luasan :

- minimal 10 ha dalam hamparan dan atau kumulatif luasan lahan parsial antara lain untuk buah mangga, manggis, jeruk, durian, lengkeng, alpukat, pisang, dan salak;
- minimal 5 ha untuk buah nanas dan melon
- 200 m² untuk florikultura yang dibudidayakan dalam Green House

d. 5.000 m² untuk florikultura yang tidak dibudidayakan dalam Green House
Bantuan benih yang masuk ke dalam koponen pengembangan kampung Buah dan Florikultura hanya untuk kawasan :

- a. Buah lain : melon, papaya dan buah lain
- b. Florikultura : krisan, anggrek dan florikultura lain

Selain kawasan tersebut, penyediaan benih dialokasikan pada Direktorat Perbenihan Hortikultura.

Sampai dengan periode Laporan Keuangan per 31 Desember 2023, realisasi belanja bantuan pemerintah pada kegiatan peningkatan produksi buah dan florikultura sebesar Rp65.514.920.506,00 atau 99,51% dari pagu anggaran sebesar Rp65.834.648.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel B.4.9 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KEUANGAN		FISIK			BENTUK BANTUAN
		PAGU	REALISASI	TARGET	REALISASI	SATUAN	
		(Rp)	(Rp)				
5886CAI	Sarana Pengembangan Kawasan	35.499.253.000	35.335.694.925	93.431	99.031	m ²	Kawasan Pisang :
							Pupuk Anorganik. Pupuk Organik. Pupuk Hayati yang mengandung trichoderma. Pembenah Tanah
							Kawasan Jeruk :
							Pupuk Organik. Pupuk Anorganik. Dolomit. Pupuk Hayati yang mengandung trichoderma. Pembenah Tanah
							Kawasan Buah Lain : (Melon. salak. Nanas. Stroberi. Anggur. Buah Lain)
							Benih. Pupuk Organik. Pupuk Anorganik. Pot Tray Semai benih. Kalsium karbida. KNO3. Dolomit. Planter Bag 100L. Ajir. Pembenah Tanah
5886CBK	Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.000.000.000	1.000.000.000	5	5	Unit	Kawasan Florikultura : (Melati Ekstensifikasi dan Intensifikasi. Dracena Ekstensifikasi. Sedap malam Ekstensifikasi. Tanaman Hias Daun Ekstensifikasi dan Intensifikasi)
							Benih. Pupuk Anorganik. Malsa. Shading House. rak. pot/polybag. Shading Net
							Prasarana Budidaya Buah dan Florikultura : Green House. Sarana Digitalisasi Kampung Buah dan Florikultura
5886RAI	Sarana Pengembangan Kawasan			9.6	9.604		Kawasan Durian. Mangga. Kelengkeng. Alpukat. Manggis :

KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KEUANGAN		FISIK			BENTUK BANTUAN
		PAGU	REALISASI	TARGET	REALISASI	SATUAN	
		(Rp)	(Rp)				
		29.335.395.000	29.179.225.581			m ²	Pupuk Organik. Dolomit. Pupuk Anorganik. Pupuk Hayati yang mengandung Trichoderma. Pembenah Tanah
							Kawasan Krisan : Green House Besi/Galvanis. Sarana Pengairan. Sarana Penyinaran. Jaring Penyangga
							Kawasan Anggrek : Green House Besi/Galvanis. Rak. Shading Net
TOTAL		65.834.648.000	65.514.920.506				

5. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura diberikan dalam rangka penumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Hortikultura. Bantuan yang diberikan secara utuh agar dapat terbentuk suatu UMKM hortikultura produk segar maupun olahan.

Komponen bantuan pemerintah pada kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yaitu :

1. Fasilitas bantuan pada :
 - a. Sarana pascapanen hortikultura
 - b. Sarana pengolahan hortikultura
 - c. Sarana pemasaran hortikultura,
 - d. Prasarana pascapanen hortikultura
 - e. Prasarana pengolahan hortikultura
 - f. Prasarana pemasaran hortikultura
 - g. Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura mendukung korporasi
 - h. Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura mendukung Food Estate

Sampai dengan periode Laporan Keuangan per 31 Desember 2023, realisasi belanja bantuan pemerintah pada kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura sebesar Rp91.859.611.890,00 atau 99,51% dari pagu anggaran sebesar Rp92.311.715.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel B.4.10 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KEUANGAN		FISIK			BENTUK BANTUAN
		PAGU	REALISASI	TARGET	REALISASI	SATUAN	
		(Rp)	(Rp)				
5887CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.525.000.000	1.446.188.518	66	66	unit	Sarana Pemasaran : Bantuan Sarana Pasar Lelang/Pasar Tani berupa Papan Nama. Mesin penghitung uang. Pengeras suara (TOA). Layar monitor informasi harga. Sealer packaging. Plastik wrapping. Tenda. meja dan kursi. serta pembelian produk hortikultura

KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KEUANGAN		FISIK			BENTUK BANTUAN
		PAGU	REALISASI	TARGET	REALISASI	SATUAN	
		(Rp)	(Rp)				
5887RAG	Sarana Bidang Pertanian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	51.604.215.000	51.300.350.402	551	551	unit	Sarana Pascapanen : Motor Roda 3. Keranjang Panen. Timbangan duduk digital. Sarana Pencucian. Meja peniris. Meja sortasi. Peralatan Grading. Roller conveyor. Blower. Catatan: Komponen peralatan disesuaikan dengan jenis komoditas yang ditangani
							Sarana Pengolahan : a) Aneka Cabai: Mesin Penggiling Cabai kering. Mesin Penggiling bumbu. Mesin Pengereng Tipe Rak. Deep Drying. Mesin Continuous Sealer. Timbangan digital. Freezer. Meja Stainless;
							b) Bawang: Mesin perajang bawang. Spinner. Mesin Pengupas bawang. Deep penggoreng bawang. Mesin Continuous Sealer. Timbangan digital. Freezer. Meja Stainless;
							c) Hortikultura lainnya: Mesin Vacuum Frying. Mesin Pengiris Multiguna. Mesin Continuous Sealer. Timbangan digital. Freezer. Meja Stainless
5887RBK	Prasarana Bidang Pertanian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	39.182.500.000	39.113.072.970	184	186	unit	Prasaran Pascapanen : Bangsal pascapanen; yang dilengkapi dengan identitas bangsal pascapanen (prasasti). Kamera CCTV. Pengemas. produk dan label/branding
							Prasarana Pengolahan :
							Pengereng tenaga surya (solar dryer dome) dilengkapi dengan rak jemur berbahan food grade. lantai semen permanen. identitas bangunan (papan nama) dan CCTV
TOTAL		92.311.715.000	91.859.611.890				

3. Ditjen Bun

Anggaran Belanja bantuan pemerintah (526) pada Ditjen Bun untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp436.822.018.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp429.166.178.302,00 atau 98,25% dari total pagu, terdiri dari realisasi bantuan pemerintah bentuk barang sebesar Rp423.352.233.302,00 dan belanja bantuan pemerintah bentuk uang sebesar Rp5.813.945.000,00.

Rincian alokasi Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda adalah sebagai berikut.

Tabel B.4.11 Rincian alokasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Ditjen Bun

KEGIATAN	BARANG		UANG		Total DIPA	Total BELANJA	%
	DIPA	BELANJA	DIPA	BELANJA			
1777 Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	224.841.450.000	219.321.569.279	2.049.410.000	2.049.410.000	226.890.860.000	221.370.979.279	97,57
1779 Penguatan Perlindungan Perkebunan	24.937.683.000	24.851.370.842	567.750.000	555.750.000	25.505.433.000	25.407.120.842	99,61
5888 Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah	69.603.617.000	68.368.367.850	200.000.000	200.000.000	69.803.617.000	68.568.367.850	98,23
5889 Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	104.291.271.000	104.093.951.576			104.291.271.000	104.093.951.576	99,81
5890 Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	7.089.710.000	6.716.973.755	3.241.127.000	3.008.785.000	10.330.837.000	9.725.758.755	94,14
Grand Total	430.763.731.000	423.352.233.302	6.058.287.000	5.813.945.000	436.822.018.000	429.166.178.302	98,25

Rincian Belanja MAK 526 untuk kegiatan-kegiatan Lingkup Ditjen Bun sebagai berikut:

a. Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar

KEGIATAN	DIPA	REALISASI	%
1777 Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	226.890.860.000	221.370.979.279	97,57
BARANG	224.841.450.000	219.321.569.279	97,54
1777.CAI Sarana Pengembangan Kawasan	5.042.000.000	4.904.900.000	97,28
PUSAT	5.042.000.000	4.904.900.000	97,28
1777.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	219.799.450.000	214.416.669.279	97,55
ACEH	418.000.000	416.790.000	99,71
BALI	662.500.000	601.960.000	90,86
BBPPTP AMBON	16.922.650.000	16.616.967.500	98,19
BBPPTP MEDAN	30.941.330.000	30.424.761.000	98,33
BBPPTP SURABAYA	40.487.305.000	38.926.386.100	96,14
BPTP PONTIANAK	4.739.500.000	4.580.557.500	96,65
GORONTALO	1.052.000.000	1.044.100.000	99,25
KAB. KEPULAUAN MERANTI	5.490.000.000	5.482.786.250	99,87
KAB. KOLAKA	2.904.000.000	2.870.290.000	98,84
KAB. KOLAKA UTARA	1.245.000.000	1.234.500.000	99,16
KAB. LUWU TIMUR	266.000.000	264.900.000	99,59
KAB. TOLI-TOLI	721.000.000	682.834.900	94,71
KAB. WAJO	1.905.750.000	1.860.190.000	97,61
KALIMANTAN SELATAN	1.806.000.000	1.796.400.000	99,47
MALUKU UTARA	3.037.500.000	3.024.834.500	99,58
PAPUA	7.259.540.000	7.217.525.229	99,42
PAPUA BARAT	2.296.000.000	2.296.000.000	100,00
PUSAT	85.444.875.000	82.978.211.500	97,11

KEGIATAN	DIPA	REALISASI	%
RIAU	3.870.000.000	3.858.517.000	99,70
SULAWESI SELATAN	924.000.000	901.780.000	97,60
SULAWESI UTARA	1.874.500.000	1.816.100.000	96,88
KAB. KOLAKA TIMUR	5.532.000.000	5.520.277.800	99,79
UANG	2.049.410.000	2.049.410.000	100,00
1777.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	2.049.410.000	2.049.410.000	100,00
PAPUA	1.201.410.000	1.201.410.000	100,00
PAPUA BARAT	848.000.000	848.000.000	100,00

Tabel B.4.12 Pagu dan Realisasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar

KEGIATAN	DIPA	BELANJA	%
1777 Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	226.890.860.000	221.370.979.279	97,57
BARANG	224.841.450.000	219.321.569.279	97,54
1777.CAI Sarana Pengembangan Kawasan	5.042.000.000	4.904.900.000	97,28
1777.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	219.799.450.000	214.416.669.279	97,55
UANG	2.049.410.000	2.049.410.000	100,00
1777.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	2.049.410.000	2.049.410.000	100,00

Tabel B.4.13 Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar

KEGIATAN	ITEM	REALISASI FISIK	SAT
1777 - Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	Knapsack Sprayer	896	BUAH
	Pembenah Tanah Organik Cair	74.800	LITER
	Pupuk Hayati Padat	3.570	KG
	Pupuk NPK	752.500	KG
	Pupuk Organik	1.809.500	KG
	Benih Kakao	270.000	BTG
	Benih Karet Siap tanam	350.000	BTG
	Benih Siap Tanam	6.254.000	BTG
	Benih Siap Tanam	327.800	KG
	Pupuk NPK	10.000	LTR
	Pupuk Organik	507.000	BTG
	Pupuk Organik	75.000	LTR

b. Penguatan Perlindungan Perkebunan

KEGIATAN	DIPA	REALISASI	%
1779 Penguatan Perlindungan Perkebunan			
BARANG	24.937.683.000	24.851.370.842	99,65
1779.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	

KEGIATAN	DIPA	REALISASI	%
1779.PDC Sertifikasi Produk	2.176.761.000	2.160.985.972	99,28
BALI	179.170.000	173.920.470	97,07
BANTEN	145.609.000	145.600.000	99,99
BBPPTP MEDAN	153.750.000	153.095.000	99,57
BBPPTP SURABAYA	133.750.000	133.220.000	99,60
BENGKULU	191.250.000	190.632.226	99,68
D.I. YOGYAKARTA	144.773.000	144.495.794	99,81
JAMBI	148.750.000	147.959.250	99,47
JAWA BARAT	192.294.000	192.151.644	99,93
JAWA TENGAH	491.725.000	490.265.000	99,70
NUSA TENGGARA BARAT	80.850.000	77.322.000	95,64
SUMATERA BARAT	167.820.000	165.305.000	98,50
SUMATERA SELATAN	147.020.000	147.019.588	100,00
1779.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	22.760.922.000	22.690.384.870	99,69
ACEH	90.775.000	90.775.000	100,00
BALI	452.775.000	441.993.975	97,62
BANGKA BELITUNG	18.000.000	18.000.000	100,00
BBPPTP SURABAYA	5.881.700.000	5.869.153.000	99,79
BPTP PONTIANAK	18.000.000	16.100.000	89,44
D.I. YOGYAKARTA	341.000.000	338.154.769	99,17
JAWA BARAT	370.475.000	362.451.626	97,83
JAWA TENGAH	393.805.000	390.715.000	99,22
KALIMANTAN SELATAN	326.625.000	316.635.000	96,94
NUSA TENGGARA BARAT	341.475.000	325.802.500	95,41
PUSAT	13.823.217.000	13.818.147.300	99,96
RIAU	211.500.000	211.379.700	99,94
SULAWESI BARAT	326.475.000	326.077.000	99,88
SULAWESI TENGGARA	109.600.000	109.600.000	100,00
SULAWESI UTARA	55.500.000	55.400.000	99,82
UANG	567.750.000	555.750.000	97,89
1779.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	567.750.000	555.750.000	97,89
ACEH	23.375.000	23.375.000	100,00
BALI	87.000.000	87.000.000	100,00
BANGKA BELITUNG	20.000.000	20.000.000	100,00
BBPPTP SURABAYA	23.500.000	23.500.000	100,00
BPTP PONTIANAK	27.000.000	27.000.000	100,00
D.I. YOGYAKARTA	27.500.000	27.500.000	100,00
JAWA BARAT	22.500.000	22.500.000	100,00
JAWA TENGAH	74.250.000	74.250.000	100,00
KALIMANTAN SELATAN	59.500.000	47.500.000	79,83
MALUKU UTARA	75.000.000	75.000.000	100,00
NUSA TENGGARA BARAT	10.500.000	10.500.000	100,00

KEGIATAN	DIPA	REALISASI	%
RIAU	27.500.000	27.500.000	100,00
SULAWESI BARAT	10.500.000	10.500.000	100,00
SULAWESI TENGAH	10.625.000	10.625.000	100,00
SULAWESI TENGGARA	42.000.000	42.000.000	100,00
SULAWESI UTARA	27.000.000	27.000.000	100,00

Rincian realisasi belanja untuk kegiatan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel B.4.14 Pagu dan Realisasi Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan

KEGIATAN	DIPA	BELANJA	%
1779 Penguatan Perlindungan Perkebunan	25.505.433.000	25.407.120.842	99,61
BARANG	24.937.683.000	24.851.370.842	99,65
1779.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-
1779.PDC Sertifikasi Produk	2.176.761.000	2.160.985.972	99,28
1779.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	22.760.922.000	22.690.384.870	99,69
UANG	567.750.000	555.750.000	97,89
1779.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	567.750.000	555.750.000	97,89

Tabel B.4.15 Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan

KEGIATAN	ITEM	REALISASI FISIK	SAT
1779 Penguatan Perlindungan Perkebunan	Handy Talky	146	unit
	Pompa Pemadam karlabun	348	unit
	Pestisida Nabati	19.667	LITER

c. Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah

KEGIATAN	DIPA	REALISASI	%
5888 Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah	69.803.617.000	68.568.367.850	98,23
BARANG	69.603.617.000	68.368.367.850	98,23
5888.CAI Sarana Pengembangan Kawasan	4.011.411.000	3.967.419.500	98,90
JAMBI	346.200.000	343.750.000	99,29
JAWA TIMUR	70.425.000	60.325.000	85,66
PUSAT	3.357.486.000	3.333.486.000	99,29
SULAWESI SELATAN	237.300.000	229.858.500	96,86
5888.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	65.592.206.000	64.400.948.350	98,18
BANGKA BELITUNG	1.280.000.000	1.257.000.000	98,20
BBPPTP AMBON	18.687.600.000	18.687.120.000	100,00
GORONTALO	182.000.000	181.350.000	99,64
JAWA TIMUR	2.691.500.000	1.873.725.000	69,62
KAB. WAJO	24.000.000	23.700.000	98,75
MALUKU	224.280.000	224.100.000	99,92
MALUKU UTARA	500.000.000	497.250.000	99,45
NUSA TENGGARA BARAT	470.000.000	435.000.000	92,55

KEGIATAN	DIPA	REALISASI	%
PAPUA BARAT	157.200.000	157.200.000	100,00
PUSAT	37.963.111.000	37.661.668.350	99,21
SULAWESI SELATAN	1.480.000.000	1.480.000.000	100,00
SULAWESI UTARA	1.751.715.000	1.747.935.000	99,78
SUMATERA UTARA	180.800.000	174.900.000	96,74
UANG	200.000.000	200.000.000	100,00
5888.CAI Sarana Pengembangan Kawasan	-	-	
PUSAT	-	-	
5888.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	200.000.000	200.000.000	100,00
PAPUA BARAT	200.000.000	200.000.000	100,00

Tabel B.4.16 Pagu dan Realisasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah

KEGIATAN	DIPA	BELANJA	%
5888 Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah	69.803.617.000	68.568.367.850	98,23
BARANG	69.603.617.000	68.368.367.850	98,23
5888.CAI Sarana Pengembangan Kawasan	4.011.411.000	3.967.419.500	98,90
5888.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	65.592.206.000	64.400.948.350	98,18
UANG	200.000.000	200.000.000	100,00
5888.CAI Sarana Pengembangan Kawasan	-	-	-
5888.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	200.000.000	200.000.000	100,00

Tabel B.4.17 Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah

KEGIATAN	ITEM	REALISASI FISIK	SAT
5888 Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah	APK	1	pkt
	Benih	1.167.750	Batang
	Pestisida	125	LITER
	Pupuk Organik	12.536	KG
	Pupuk organik (pabrikan)	1.532.575	KG
	Benih	1.400.000	Batang
	Benih	1.500	gram
	Pembenah Tanah	34.800	LITER
	Pupuk KNO3	3.400	KG
	Pupuk Majemuk	1.653.000	KG
	Pupuk NPK Non/Rendah Clor	6.800	KG
	Pupuk Organik	140.000	KG
	Pupuk Silika	43.500	KG
	Pembuatan lubang tanam dan pemupukan	1.600	HOK

d. Pasca Panen Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan

KEGIATAN	DIPA	REALISASI	%
5889 Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	104.291.271.000	104.093.951.576	99,81
BARANG	104.291.271.000	104.093.951.576	99,81
5889.PDA Standarisasi Produk	81.500.000	81.474.000	99,97
SULAWESI BARAT	81.500.000	81.474.000	99,97
5889.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	64.032.890.000	63.904.819.402	99,80
ACEH	160.800.000	154.400.000	96,02
BALI	332.200.000	318.900.000	96,00
BENGKULU	251.800.000	244.020.000	96,91
D.I. YOGYAKARTA	91.000.000	90.985.000	99,98
GORONTALO	557.200.000	556.232.000	99,83
JAMBI	151.100.000	150.793.500	99,80
JAWA BARAT	250.000.000	246.450.000	98,58
JAWA TENGAH	171.400.000	165.495.000	96,55
KAB. BANDUNG	200.000.000	198.900.000	99,45
KAB. KEPULAUAN MERANTI	900.000.000	900.000.000	100,00
KALIMANTAN SELATAN	91.000.000	89.900.000	98,79
KALIMANTAN TIMUR	82.000.000	79.740.000	97,24
LAMPUNG	201.943.000	196.150.000	97,13
MALUKU UTARA	477.200.000	476.778.000	99,91
NUSA TENGGARA BARAT	80.400.000	78.120.000	97,16
NUSA TENGGARA TIMUR	186.803.000	186.800.000	100,00
PAPUA	593.000.000	587.104.752	99,01
PAPUA BARAT	490.000.000	490.000.000	100,00
PUSAT	57.771.444.000	57.725.121.250	99,92
SULAWESI SELATAN	251.800.000	249.149.900	98,95
SULAWESI TENGGARA	80.000.000	76.800.000	96,00
SULAWESI UTARA	319.000.000	317.100.000	99,40
SUMATERA BARAT	171.400.000	167.980.000	98,00
SUMATERA UTARA	171.400.000	157.900.000	92,12
5889.RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	40.176.881.000	40.107.658.174	99,83
BALI	130.000.000	126.524.718	97,33
BENGKULU	170.000.000	170.000.000	100,00
GORONTALO	370.000.000	367.059.596	99,21
JAMBI	335.000.000	334.720.500	99,92
JAWA BARAT	274.000.000	271.347.750	99,03
JAWA TENGAH	340.000.000	337.980.000	99,41
KAB. BANDUNG	32.678.161.000	32.640.389.000	99,88
KALIMANTAN BARAT	180.000.000	179.797.500	99,89
KALIMANTAN SELATAN	140.000.000	139.350.000	99,54
LAMPUNG	277.000.000	276.675.000	99,88
NUSA TENGGARA TIMUR	127.000.000	126.923.000	99,94

KEGIATAN	DIPA	REALISASI	%
PAPUA	720.000.000	718.201.698	99,75
PAPUA BARAT	730.000.000	730.000.000	100,00
SULAWESI SELATAN	2.940.720.000	2.924.472.155	99,45
SULAWESI TENGAH	170.000.000	169.830.000	99,90
SULAWESI UTARA	170.000.000	169.912.000	99,95
SUMATERA BARAT	280.000.000	279.538.700	99,84
SUMATERA UTARA	145.000.000	144.936.557	99,96

Rincian realisasi belanja untuk kegiatan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel B.4.18 Pagu dan Realisasi Kegiatan Pasca Panen Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan

KEGIATAN	DIPA	BELANJA	%
5889 Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	104.291.271.000	104.093.951.576	99,81
BARANG	104.291.271.000	104.093.951.576	99,81
5889.PDA Standarisasi Produk	81.500.000	81.474.000	99,97
5889.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	64.032.890.000	63.904.819.402	99,80
5889.RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	40.176.881.000	40.107.658.174	99,83

Tabel B.4.19 Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan Kegiatan Pasca Panen Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Kegiatan	Item	Realisasi Fisik	Sat
5889 Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) Dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Grinder	9	Unit
	Huller	9	Unit
	Mesin Pamarut	2	Unit
	Mesin Pemeras	2	Unit
	Mesin Penepung	2	Unit
	Pulper	9	Unit
	Roaster	9	Unit
	Sealer	9	Unit
	Unit Pengering Portable	4	Unit
	Sarana Fasilitas Pengolahan Kopi 1 Unit	1	Unit
	Sarana Fasilitas Pengolahan Kopi 11 Unit	11	Unit
	Sarana Fasilitas Pengolahan Sagu 2 Unit	2	Unit
	Asam Formiat	504.033	Botol
	Sarana Fasilitas Pengolahan Karet	1.033.158	Liter

e. Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan

KEGIATAN	DIPA	REALISASI	%
5890 Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	10.330.837.000	9.725.758.755	94,14
BARANG	7.089.710.000	6.716.973.755	94,74
5890.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	5.725.810.000	5.377.447.774	93,92
ACEH	72.221.000	72.220.650	100,00

KEGIATAN	DIPA	REALISASI	%
BALI	143.624.000	136.988.100	95,38
BANTEN	20.594.000	20.568.400	99,88
BENGKULU	15.372.000	15.372.000	100,00
D.I. YOGYAKARTA	55.053.000	54.734.400	99,42
GORONTALO	500.631.000	489.506.053	97,78
JAMBI	207.862.000	207.485.600	99,82
JAWA BARAT	888.450.000	882.003.804	99,27
JAWA TENGAH	257.417.000	186.387.000	72,41
JAWA TIMUR	41.750.000	37.376.000	89,52
KAB. KEPULAUAN MERANTI	249.653.000	247.926.250	99,31
KAB. TOLI-TOLI	25.707.000	16.467.500	64,06
KAB. WAJO	38.653.000	38.653.000	100,00
KALIMANTAN BARAT	15.010.000	14.936.160	99,51
KALIMANTAN SELATAN	248.813.000	213.664.000	85,87
KALIMANTAN TIMUR	58.975.000	57.414.750	97,35
KALIMANTAN UTARA	7.478.000	7.470.522	99,90
KEPULAUAN RIAU	125.306.000	117.020.600	93,39
LAMPUNG	109.135.000	97.651.140	89,48
MALUKU	262.157.000	261.030.775	99,57
MALUKU UTARA	645.232.000	624.040.000	96,72
NUSA TENGGARA BARAT	462.842.000	395.870.000	85,53
NUSA TENGGARA TIMUR	114.934.000	114.934.000	100,00
PAPUA	76.358.000	75.922.310	99,43
PAPUA BARAT	168.673.000	168.673.000	100,00
RIAU	151.031.000	96.032.649	63,58
SULAWESI BARAT	34.358.000	34.358.000	100,00
SULAWESI SELATAN	136.970.000	136.970.000	100,00
SULAWESI TENGAH	198.453.000	196.968.501	99,25
SULAWESI TENGGARA	162.107.000	150.359.000	92,75
SULAWESI UTARA	121.992.000	121.666.740	99,73
SUMATERA BARAT	42.888.000	42.799.670	99,79
SUMATERA SELATAN	20.852.000	5.626.000	26,98
SUMATERA UTARA	45.259.000	38.351.200	84,74
5890.RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.363.900.000	1.339.525.981	98,21
BBPPTP SURABAYA	1.363.900.000	1.339.525.981	98,21
UANG	3.241.127.000	3.008.785.000	92,83
5890.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	1.781.457.000	1.719.455.000	96,52
ACEH	22.525.000	22.525.000	100,00
BALI	29.400.000	25.200.000	85,71
BANTEN	11.200.000	11.200.000	100,00
BENGKULU	9.900.000	9.900.000	100,00
D.I. YOGYAKARTA	20.000.000	20.000.000	100,00

KEGIATAN	DIPA	REALISASI	%
GORONTALO	76.720.000	76.720.000	100,00
JAMBI	76.465.000	76.465.000	100,00
JAWA BARAT	259.400.000	259.400.000	100,00
JAWA TENGAH	91.800.000	91.800.000	100,00
JAWA TIMUR	10.500.000	10.500.000	100,00
KAB. KEPULAUAN MERANTI	12.540.000	12.540.000	100,00
KAB. TOLI-TOLI	2.750.000	2.750.000	100,00
KAB. WAJO	12.000.000	12.000.000	100,00
KALIMANTAN BARAT	12.200.000	12.200.000	100,00
KALIMANTAN SELATAN	76.450.000	66.675.000	87,21
KALIMANTAN TIMUR	27.500.000	27.500.000	100,00
KALIMANTAN UTARA	10.800.000	10.800.000	100,00
KEPULAUAN RIAU	42.504.000	40.020.000	94,16
LAMPUNG	17.370.000	17.370.000	100,00
MALUKU	106.900.000	106.900.000	100,00
MALUKU UTARA	208.675.000	183.175.000	87,78
NUSA TENGGARA BARAT	72.400.000	64.400.000	88,95
NUSA TENGGARA TIMUR	39.550.000	39.550.000	100,00
PAPUA	45.675.000	45.675.000	100,00
PAPUA BARAT	71.875.000	71.875.000	100,00
RIAU	32.780.000	32.780.000	100,00
SULAWESI BARAT	16.200.000	16.200.000	100,00
SULAWESI SELATAN	99.998.000	99.955.000	99,96
SULAWESI TENGAH	40.800.000	40.800.000	100,00
SULAWESI TENGGARA	61.000.000	61.000.000	100,00
SULAWESI UTARA	113.100.000	113.100.000	100,00
SUMATERA BARAT	17.000.000	17.000.000	100,00
SUMATERA SELATAN	22.500.000	10.500.000	46,67
SUMATERA UTARA	10.980.000	10.980.000	100,00
5890.RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.459.670.000	1.289.330.000	88,33
BBPPTP AMBON	117.200.000	107.800.000	91,98
BBPPTP SURABAYA	1.342.470.000	1.181.530.000	88,01

Tabel B.4.20 Pagu dan Realisasi Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan

KEGIATAN	DIPA	BELANJA	%
5890 Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	10.330.837.000	9.725.758.755	94,14
BARANG	7.089.710.000	6.716.973.755	94,74
5890.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	5.725.810.000	5.377.447.774	93,92
5890.RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.363.900.000	1.339.525.981	98,21
UANG	3.241.127.000	3.008.785.000	92,83
5890.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	1.781.457.000	1.719.455.000	96,52
5890.RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.459.670.000	1.289.330.000	88,33

Tabel B.4.21 Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan

KEGIATAN	ITEM	REALISASI FISIK	SAT
5890 - Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Ajir	75.512	BTG
	Alat Pertanian Kecil	6	pkt
	Apk	2	pkt
	Bahan Pagar	9	pkt
	Bahan Tanaman Untuk Pohon Pelindung	500	BTG
	Benih Karet Siap Tanam Klon Anjuran	8.800	BTG
	Benih Siap Tanam	1.100	BTG
	Benih Unggul Kelapa Siap Tanam	374	BTG
	Benih Unggul Seraiwangi Siap Tanam	108.000	BTG
	Benih Unggul Siap Tanam	374	BTG
	Benih Unggul Vanili Siap Tanam	7.600	BTG
	Biaya Pembuatan Nurseri Sederhana	95	HOK
	Biaya Pemeliharaan Dan Pemupukan	30	HOK
	Dolomit	228	KG
	Dolomit / Kiserit	480	KG
	Dolomite	1.258	KG
	Fungisida	106	LTR
	Generator	6	pkt
	Gerobak Dorong	11	unit
	Hand Sprayer	1	BUAH
	Herbisida	1.649.426	LTR
	Insektisida	3.784.347	L
	Insektisida Aph DII	14	KG/LT
	Insentif Pemeliharaan Dan Pemupukan	5.779	HOK
	Insentif Pemeliharaan Penyiangan Pemupukan Dan Pengendalian Opt	560	HOK
	Insentif Pemeliharaan Dan Pemupukan	202	HOK
	Insentif Pemupukan	20	HOK
	Insentif Pemupukan Dan Pemeliharaan	755	HOK
	Insentif Pemupukan Tenaga Kerja	50	HOK
	Insentif pemeliharaan Dan Pemupukan	150	HOK
	Insetif Pemupukan Dan Pemeliharaan	100	HOK
	Instalasi Listrik	5	pkt
	Intensif Pemeliharaan Dan Pemupukan	30	HOK
	Kcl	34.891.859	KG
	Kieserit/Dolomit	5.428.159	KG
	Knapsack Sprayer	68	BUAH
	Knapsack/Hansdprayer	6	unit
	Metarhizium	40	KG
	Monitoring Dan Pengendalian Opt	16	HOK
	Npk	11.866	KG
	Papan Nama	8	pkt

KEGIATAN	ITEM	REALISASI FISIK	SAT
	Pemagaran	75	HOK
	Pemangkasan	50	HOK
	Pemasangan Sulur	30	HOK
	Pemberian Pupuk Kandang	240	HOK
	Pemberian Pupuk Organik	100	HOK
	Pembersihan Lahan [Orang X Hari X Ha]	100	HOK
	Pembersihan Piringan Dan Pemupukan	20	HOK
	Pembuatan Bedeng Semai	2	HOK
	Pembuatan Jalan Dan Drainase Dalam Blok	105	HOK
	Pembuatan Jalan Drainase Dalam Blok	20	HOK
	Pembuatan Lubang Tanam	862	HOK
	Pembuatan Lubang Tanam Pelindung Dan Lubang Tanam Kopi	80	HOK
	Pembuatan Pagar	50	HOK
	Pembukaan Lahan	755	HOK
	Pemeliharaan	1.200	HOK
	Pemeliharaan Dan Pemupukan	430	HOK
	Pemeliharaan Dan Pengendalian Hama Penyakit	12	HOK
	Pemeliharaan Dan Pengendalian Hama Penyakit	20	HOK
	Pemeliharaan Kebun	55	HOK
	Pemeliharaan Dan Pengendalian Hama Penyakit	25	HOK
	Pemindahan Benih Dan Pengaturan [Orang X Hari X Ha]	1.325	HOK
	Pemindahan Bibit Dan Pengaturan Polibag	9	HOK
	Pemindahan Bibit Dan Pengaturan Polibag Kelapa Dalam Tambahan	100	HOK
	Pemindahan Dan Penyortiran Benih	48	HOK
	Pemupukan	1.457	HOK
	Pemupukan (Pembersihan Piringan)	20	HOK
	Pemupukan [Orang X Hari X Ha]	150	HOK
	Pemupukan Anorganik	325	HOK
	Pemupukan Dan Pemeliharaan	1.620	HOK
	Penanaman Breeder Seed Pada Kebun Induk	60	HOK
	Penanaman	400	HOK
	Penanaman Benih Seraiwangi	450	HOK
	Penanaman Benih Vanili	150	HOK
	Penanaman Dan Penyulaman	20	HOK
	Penanaman Kopi	100	HOK
	Penanaman Tanaman Penegak	100	HOK
	Penanaman/Penyisipan	192	HOK
	Penerimaan Benih [Rang X Hari X Ha]	150	HOK
	Penerimaan Bibit	5	HOK
	Penerimaan Bibit Kelapa Dalam Tambahan	40	HOK
	Pengairan	360	HOK
	Pengairan [Orang X Hari X Ha]	400	HOK
	Pengajiran	56	HOK
	Pengendalian Hama Dan Penyakit	532	HOK

KEGIATAN	ITEM	REALISASI FISIK	SAT
	Pengendalian Hama Dan Penyakit Opt	205	HOK
	Pengendalian Hama Penyakit	189	HOK
	Pengendalian Opt	293	HOK
	Pengendalian Opt Bibit Kelapa Dalam Tambahan	33	HOK
	Pengisian Polibag	20	HOK
	Pengisian Polibag [Orang X Hari X Ha]	844	HOK
	Pengolahan Lahan Dan Pengajiran	230	HOK
	Pengolahan Tanah	474	HOK
	Penunasan/Pewiwilan	10	HOK
	Penyemaian	8	HOK
	Penyemaian [Orang X Hari X Ha]	1.000	HOK
	Penyemaian Kelapa Dalam Tambahan	106	HOK
	Penyiangan	1.617	HOK
	Penyiangan [Orang X Hari X Ha]	560	HOK
	Penyiangan Bibit Kelapa Dalam Tambahan	130	HOK
	Penyiapan Lahan Untuk Penanaman Breeder Seed Pada Kebun Induk	60	HOK
	Penyiraman	110	HOK
	Penyiraman Bibit	6	HOK
	Penyiraman Bibit Kelapa Dalam Tambahan	150	HOK
	Penyopakan Dan Perlakuan Benih	5	HOK
	Penyopakan Dan Perlakuan Benih Kelapa Dalam Tambahan	52	HOK
	Penyulaman	158	HOK
	Peralatan Pendukung	2.704.000	LTR
	Persiapan Lahan	72	HOK
	Pestisida	8	LT
	Pohon Pelindung/Tiang Panjat Vanili	6.300	BTG
	Pompa Air	2	unit
	Pompa Air Dan Instalasi Air	1	pkt
	Pompa Air Dan Instalasinya	4	pkt
	Pompa Pendorong	2	Unt
	Pompa Penyedot	1	unit
	Pondok Jaga	4	unit
	Pondok Jaga Dan Gudang Pabrik	1	unit
	Pupuk Bokashi / Organik	4.500	KG
	Pupuk Kcl	2.231	KG
	Pupuk Kieserite	181	KG
	Pupuk Kiserit	40	KG
	Pupuk Npk	13.331	KG
	Pupuk Organik	118.766	KG
	Pupuk Organik (Kandang)	1.000	KG
	Pupuk Organik (Pabrikan)	7.120	KG
	Pupuk Organik Cair	595	LTR
	Pupuk Organik/Hayati	20	KG

KEGIATAN	ITEM	REALISASI FISIK	SAT
	Pupuk Sp	2.160	KG
	Pupuk Sp /Tsp	130	KG
	Pupuk Tsp/Sp	180	KG
	Pupuk Urea	4.531	KG
	Seleksi Benih	39	HOK
	Seleksi Bibit	4	HOK
	SP 36	4.179.903	KG
	Tahap Pelaksanaan Land Clearing	1	Ha
	Tahap Pelaksanaan Pembangunan Nursery	1	Unt
	Tahap Pengawasan Land Clearing	1	Paket
	Tahap Pengawasan Pembangunan Nursery	1	Paket
	Tahap Perencanaan Land Clearing	1	Paket
	Tahap Perencanaan Pembangunan Nursery	1	Paket
	TSP	1.162	KG
	Upah Pekerjaan Produksi Benih Tambahan	580	HOK
	Upah Pemupukan	32	HOK
	Upah Penanaman	180	HOK
	Upah Pengaturan Polibag Dalam Bedengan	50	HOK
	Upah Pengisian Polibag	296	HOK
	Upah Penyambungan	310	HOK
	Upah Penyemaian	20	HOK
	Upah Penyemaian Genjah	15	HOK
	Upah Penyiangan Genjah	40	HOK
	Upah Penyiraman	152	HOK
	Upah Penyiraman Genjah	30	HOK
	Upah Penyopakan Dan Perlakuan Benih Genjah	15	HOK
	Upah Persiapan Lahan Dan Persemaian	32	HOK
	Upah Persiapan Media	45	HOK
	Upah Produksi Benih	3.896	HOK
	Upah Seleksi Benih	6	HOK
	Upah Seleksi Benih Genjah	6	HOK
	Upah Sortasi Dan Perendaman	6	HOK
	Upah Tenaga Harian Produksi Benih Tebu Sbp	871	HOK
	Upah Tenaga Pengiriman	121	HOK
	Urea	14.769.353	KG

4. Ditjen PKH

Anggaran Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp289.863.581.000,00 sedangkan realisasi Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp284.520.186.789,00 atau 98,16 % dari jumlah pagu anggaran MAK 526.

Berdasarkan akun belanja bantuan pemerintah MAK 526 tersebut terdiri dari dua jenis bantuan pemerintah (banpem) yaitu Banpem Barang (akun 526112, 526113, 526115, 526222, dan 526311) serta Banpem Uang (akun 526122 dan 526123). Realisasi belanja

Banpem Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp283.905.186.789,00 atau 98,17 % dari pagu Banpem Barang sebesar Rp289.203.581.000,00 dan realisasi belanja Banpem Uang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp615.000.000,00 atau 93,18 % dari pagu Banpem Uang sebesar Rp660.000.000,00.

Rincian pagu dan realisasi belanja banpem MAK 526 TA 2023 pada kegiatan utama Ditjen PKH yaitu pada tabel berikut:

Tabel B.4.22 Pagu dan Realisasi Belanja 526 Ditjen PKH Tahun 2023

NO	URAIAN KEGIATAN	BARANG		UANG		TOTAL	
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
1	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	5.671.714.000	5.299.453.110			5.671.714.000	5.299.453.110
2	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	5.420.100.000	4.782.009.000			5.420.100.000	4.782.009.000
3	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	269.917.357.000	265.749.857.096	660.000.000	615.000.000	270.577.357.000	266.364.857.096
4	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.998.410.000	2.995.813.082			2.998.410.000	2.995.813.082
5	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	5.196.000.000	5.078.054.501			5.196.000.000	5.078.054.501
	JUMLAH	289.203.581.000	283.905.186.789	660.000.000	615.000.000	289.863.581.000	284.520.186.789

a. Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak (1783)

Pada Tahun Anggaran 2023 Ditjen PKH melalui kegiatan utama berupa Peningkatan Produksi Pakan Ternak dialokasikan sebesar Rp5.671.714.000,00 dan sudah direalisasikan sebesar Rp5.299.453.110,00 atau 93,44%, adapun kegiatan dalam rangka peningkatan Produksi Pakan Ternak dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel B.4.23 Pagu dan Realisasi Belanja 526 Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak

URAIAN	PAGU	REALISASI NETTO	% REALISASI	TARGET VOLUME	REALISASI VOLUME	% VOLUME
Pengembangan Hijauan Pakan Sapi Potong	3.448.927.000	3.333.911.710	96,67	966.331	966.331	100,00
Pengembangan Padang Pengembalaan Sapi Potong	367.000.000	365.966.000	99,72	2	2	100,00
Pengembangan Hijauan Pakan Sapi Perah	338.000.000	237.600.000	70,30	127.019	127.019	100,00
Pengembangan Laboratorium Pakan Daerah	685.287.000	543.799.100	79,35	22	22	100,00
Pengembangan Bank Pakan di UPT Daerah	832.500.000	818.176.300	98,28	1.814	1.814	100,00
TOTAL	5.671.714.000	5.299.453.110	93,44	1.095.188	1.095.188	100,00

b. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (1784)

Pada Tahun Anggaran 2023 Ditjen PKH melalui kegiatan utama berupa Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dialokasikan sebesar Rp5.420.100.000,00 dan sudah direalisasikan sebesar Rp4.782.009.000,00 atau 88,23%, dari target volume sebesar 1.949 dan sudah realisasi volume sebesar 1.949 atau 100,00%.

c. Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak (1785)

Pada Tahun Anggaran 2023 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui kegiatan utama berupa Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak dialokasikan sebesar Rp270.577.357.000,00 dan sudah direalisasikan sebesar Rp266.364.857.096,00 atau 98,44%, kegiatan utama dalam rangka Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak dapat sajian dalam tabel sebagai berikut :

Tabel B.4.24 Pagu dan Realisasi Belanja 526 Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak

NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	% REALISASI	TARGET VOLUME	REALISASI VOLUME	% VOLUME
Fasilitasi alat dan bahan IB	12.861.041.000	12.476.583.370	97,01	191.362	191.328	99,98
Pengadaan N2 cair	15.448.261.000	14.990.728.424	97,04	952.845	1.028.645	107,96
Penguatan Wilayah Sumber Bibit / Uji Performance	235.000.000	234.350.000	99,72	103	103	100,00
Penguatan Pelaksanaan Uji Zuriat	768.000.000	713.788.050	92,94	16.231	16.231	100,00
Bantuan Sapi Perah	11.128.183.000	10.979.471.835	98,66	17.765	17.765	100,00
Bantuan Kambing Perah	355.000.000	337.600.000	95,10	78	78	100,00
Bantuan Sapi Potong	163.830.673.000	161.389.488.000	98,51	11.617	11.422	98,32
Bantuan Kerbau	4.136.000.000	4.077.795.452	98,59	12.241	12.241	100,00
Bantuan Kambing Potong/Domba	33.593.281.000	33.224.944.215	98,90	14.000	14.000	100,00
Bantuan Ayam Lokal	6.273.494.000	6.252.550.000	99,67	182.000	182.000	100,00
Bantuan Itik	6.415.946.000	6.318.749.250	98,49	304.123	304.123	100,00
Bantuan Babi	15.532.478.000	15.368.808.500	98,95	456.683	456.683	100,00
TOTAL	270.577.357.000	266.364.857.096	98,44	2.159.048	2.234.619	103,50

d. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner (1786)

Pada Tahun Anggaran 2023 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui kegiatan utama berupa Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dialokasikan sebesar Rp2.998.410.000,00 dan sudah direalisasikan sebesar Rp2.995.813.082,00 atau 99,91%

Tabel B.4.25 Pagu dan Realisasi Belanja 526 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	% REALISASI	TARGET VOLUME	REALISASI VOLUME	% VOLUME
Sarana RPH-Ruminansia	2.718.410.000	2.716.179.082	99,92	131	131	100,00
Sarana Penanganan Madu	80.000.000	79.780.000	99,73	1	1	100,00
Prasarana Laboratorium Kesmavet	200.000.000	199.854.000	99,93	1	1	100,00
TOTAL	2.998.410.000	2.995.813.082	99,91	133	133	100,00

e. Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak (5891)

Pada Tahun Anggaran 2023 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui kegiatan utama berupa Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dialokasikan sebesar Rp5.196.000.000,00 dan sudah direalisasikan sebesar Rp5.078.054.501,00 atau 97,73%

Tabel B.4.26 Pagu dan Realisasi Belanja 526 Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak

NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	% REALISASI	TARGET VOLUME	REALISASI VOLUME	% VOUME
Sarana Pengolahan Telur	60.000.000	59.700.000	99,50%	1	1	100,00
Sarana Pengolahan Susu	120.000.000	119.326.999	99,44%	42	42	100,00
Sarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak	1.350.000.000	1.343.596.199	99,53%	5.486	5.486	100,00
Sarana dan Sertifikasi Pupuk Organik	202.000.000	199.599.125	98,81%	80.100.006	80.100.006	100,00
Sarana Pasar Ternak	100.000.000	98.165.000	98,17%	23.795.002	23.795.002	100,00
Sarana Penguatan Pemasaran Hasil Ternak	50.000.000	49.573.433	99,15%	17	17	100,00
Sarana Tata Niaga	100.000.000	99.975.000	99,98%	4	4	100,00
Prasarana Pengolahan Telur	100.000.000	98.090.000	98,09%	3	3	100,00
Prasarana Pengolahan Susu	200.000.000	198.195.013	99,10%	6	6	100,00
Prasarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak	1.365.000.000	1.285.398.351	94,17%	144	144	100,00
Prasarana dan Sertifikasi Pupuk Organik	194.000.000	186.841.055	96,31%	43.157.924	43.157.924	100,00
Prasarana Pasar Ternak	780.000.000	765.278.566	98,11%	178.945.402	178.945.402	100,00
Prasarana Tata Niaga	450.000.000	449.671.760	99,93%	6	6	100,00
Prasarana Penguatan Pemasaran Hasil Ternak	125.000.000	124.644.000	99,72%	3	3	100,00
TOTAL	5.196.000.000	5.078.054.501	97,73%	326.004.046	326.004.046	100,00

5. Ditjen PSP

Belanja bantuan pemerintah lingkup Ditjen PSP Pertanian per 31 Desember 2023 memiliki pagu sebesar Rp2.094.703.206.000,00 dan realisasi netto sebesar Rp2.063.757.729.311,00 atau 98,52%. Bantuan pemerintah yang disalurkan oleh Ditjen PSP terdiri dari bantuan uang dan bantuan barang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel B.4.27 Pagu dan Realisasi Belanja 526 Ditjen PSP Tahun 2023

Jenis Bantuan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Barang	1.494.145.247.000	1.477.457.913.661	98,88
Uang	600.557.959.000	586.299.815.650	97,63
Total	2.094.703.206.000	2.063.757.729.311	98,52

Kegiatan belanja bantuan pemerintah yang dilaksanakan di Ditjen PSP terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut.

Tabel B.4.28 Pagu dan Realisasi Belanja 526 per Kegiatan Ditjen PSP

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Jenis Bantuan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1794	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Uang	183.074.220.000	182.253.854.000	99,55
		Barang	25.500.000.000	25.269.350.400	99,10
		Jumlah	208.574.220.000	207.523.204.400	99,50
1795	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	Uang	195.283.739.000	182.245.961.650	93,32
		Barang	3.826.000.000	35.775.000	0,94
		Jumlah	199.109.739.000	182.281.736.650	30,50

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Jenis Bantuan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1796	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Barang	684.957.388.000	683.913.012.292	99,85
1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Barang	20.000.000	19.600.000	98,00
3993	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Uang	222.200.000.000	221.800.000.000	99,95
		Barang	779.841.859.000	768.220.175.969	98,51
		Jumlah	1.002.041.859.000	990.020.175.969	98,80
Total			2.094.703.206.000	2.063.757.729.311	98,52

A. Banpem Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian (1794)

Bantuan pemerintah bentuk uang pada kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian terealisasi sebesar Rp182.253.854.000,00 atau 99,55% dari pagu sebesar Rp183.074.220.000,00 yang terdiri dari:

Tabel B.4.29 Rekapitulasi Belanja 526 bentuk Uang pada Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian

No	Uraian	KW	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Integrasi UPPO dan Biogas (Upland)	KP	10.000.000.000	10.000.000.000
	Demplot Gizi dan Pemberdayaan Perempuan		4.750.000.000	4.700.000.000
	Penerapan Adaptive Research (Upland)		11.000.000.000	10.628.050.000
	Pembangunan Embung Pertanian (geo membran)		20.000.000.000	20.000.000.000
	Rehabilitasi Embung Pertanian mendukung tanaman pangan/hortikultura/perkebunan/ peternakan		2.000.000.000	2.000.000.000
	Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim		17.200.000.000	17.189.742.000
	Pembangunan irigasi perpipaan/perpompaan		16.000.000.000	16.000.000.000
	Gerakan Nasional Penanganan Dampak El Nino (Irigasi Air Tanah Dalam, Irigasi Air Tanah Dangkal, Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim)		14.200.000.000	14.065.000.000
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier		76.200.000.000	76.200.000.000
2	Survey Investigasi dan Desain Pengembangan Irigasi Pertanian	DK	1.069.920.000	1.068.920.000
3	Demplot Penerapan Teknologi Pertanian (Upland)	TP	1.000.000.000	1.000.000.000
	Demplot Penerapan Teknologi Pertanian Komoditas Bawang Merah (Upland)		849.000.000	849.000.000
	Demplot Penerapan Teknologi Pertanian Komoditas Bawang Putih (Upland)		800.000.000	800.000.000
	Demplot Penerapan Teknologi Pertanian Komoditas Kentang (Upland)		400.000.000	398.520.000
	Demplot Penerapan Teknologi Pertanian Komoditas Kopi (Upland)		200.000.000	200.000.000
	Demplot Penerapan Teknologi Pertanian Ternak (Upland)		100.000.000	100.000.000
	Demplot Rumah Pangan Lestari (Upland /Nutrition Awareness)		4.500.000.000	4.250.000.000
	Demplot Pemberdayaan Wanita dan Nutrition Awareness		800.000.000	800.000.000
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier		900.000.000	900.000.000
	Pekerjaan Konstruksi Irigasi Perpompaan		689.300.000	689.300.000
	Pembangunan Embung		360.000.000	360.000.000
	Survey dan Investigasi Design Air		56.000.000	55.322.000
	Total			183.074.220.000

Bantuan pemerintah bentuk barang pada kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian terdapat pada satker kantor pusat Ditjen PSP (633656 KP) memiliki realisasi sebesar Rp25.269.350.400,00 atau 99,10% dari pagu sebesar Rp25.500.000.000,00 per 31 Desember 2023.

Tabel B.4.30 Rekapitulasi Belanja 526 bentuk Barang pada Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian

No	Uraian	Kw	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pengadaan pemasangan dan pengiriman geo membran (Pembangunan Embung Pertanian)	KP	22.000.000.000	21.826.515.800
2	Pengadaan pemasangan dan pengiriman geo membran (Rehabilitasi Embung Pertanian)		3.500.000.000	3.442.834.600
Total			25.500.000.000	25.269.350.400

B. Banpem Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian (1795).

Bantuan pemerintah bentuk uang pada kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian terealisasi sebesar Rp182.245.961.650,00 atau 93,32% dari pagu sebesar Rp195.283.739.000,00 yang terdiri dari:

Tabel B.4.31 Rekapitulasi Belanja 526 bentuk Uang pada Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian

No.	Uraian	Kw	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Konservasi dan Rehabilitasi pembangunan screenhouse untuk lembaga Non Pemerintah	KP	12.000.000.000	11.800.000.000
	Konservasi dan rehabilitasi Pilot Project Mendukung Kegiatan PSP		49.000.000.000	47.638.000.000
	Jalan Usaha Tani (JUT)		92.800.000.000	92.800.000.000
2	Penyusunan Peta Geospasial Perluasan Sawah (TA 2016-2019)	DK	3.680.204.000	3.680.124.000
3	Perbaikan infrastruktur optimasi lahan kering	TP	3.331.410.000	3.330.712.650
	Konstruksi Optimasi Lahan Kering		2.274.000.000	2.274.000.000
	Konstruksi Optimasi Lahan Kering (Food Estate)		3.979.500.000	-
	Konstruksi Pada Areal Lahan Kering		3.577.750.000	3.577.750.000
	Konstruksi pada Areal Perkebunan		6.045.000.000	5.824.000.000
	Pengolahan Lahan Optimasi Lahan Rawa		180.000.000	180.000.000
	Pengolahan lahan Optimasi Lahan Rawa (Food Estate)		270.000.000	270.000.000
	Penyiapan Lahan Kering dan Perbaikan Infrastruktur		2.131.875.000	2.131.875.000
	Perbaikan Infrastruktur Optimasi Lahan Rawa		680.000.000	680.000.000
	Perbaikan Infrastruktur Optimasi Lahan Rawa (Food Estate)		15.334.000.000	8.059.500.000
Total			195.283.739.000	182.245.961.650

Bantuan pemerintah bentuk barang pada kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian terealisasi sebesar Rp35.775.000,00 atau 0,94% dari pagu sebesar Rp3.896.000.000,00 yang terdiri dari:

Tabel B.4.32 Rekapitulasi Belanja 526 bentuk Barang pada Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian

No.	Uraian	Kw	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pengolahan lahan Optimasi Lahan Rawa (Food Estate) pada satker Dinas TPH dan Peternakan Prov Kalteng	TP	3.789.000.000	-
2	Kegiatan pengawasan konstruksi lahan rawa TA 2022 (Dinas Pangan TPH Prov Riau)		37.000.000	35.775.000
Total			3.896.000.000	35.775.000

C. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian (1796)

Bantuan pemerintah bentuk barang pada kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian terdapat pada satker pusat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (633656 KP) terealisasi sebesar Rp683.913.012.292,00 atau 99,85% dari pagu sebesar Rp684.957.388.000,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel B.4.33 Rekapitulasi Belanja 526 Bentuk Barang Direktorat Alat dan Mesin Pertanian

Kode	Kegiatan/Output	Target			Realisasi Kontrak (OS)				Realisasi Keuangan	
		Volume	Satuan	Anggaran	Volume	%	Anggaran	%	Anggaran	%
1796.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	23.081	unit	684.957.388.000	23.081	100,00	683.913.013.292	99,85	683.913.012.292	99,85
RAG.001	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	20.306	unit	641.043.013.000	20.306	100,00	640.130.935.292	99,86	640.130.934.292	99,86
526112	Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	20.306	unit	641.043.013.000	20.306	100,00	640.130.935.292	99,86	640.130.934.292	99,86
	Bantuan Traktor Roda 4 Tanaman Pangan	1.076	unit	379.989.400.000	1.076	100,00	379.955.483.142	99,99	379.955.483.142	99,99
	Bantuan Traktor Roda 2	5.504	unit	168.895.744.000	5.504	100,00	168.676.132.700	99,87	168.676.131.700	99,87
	Bantuan Pompa Air	2.753	unit	57.964.415.000	2.753	100,00	57.809.792.000	99,73	57.809.792.000	99,73
	Bantuan Hand Sprayer	10.266	unit	10.091.478.000	10.266	100,00	10.089.412.850	99,98	10.089.412.850	99,98
	Bantuan Kendaraan Roda 3	572	unit	20.861.698.000	572	100,00	20.857.769.500	99,98	20.857.769.500	99,98
	Bantuan Pompa Air (Gernas Penanggulangan El Nino)	135	unit	3.240.000.000	135	100,00	2.742.345.100	84,64	2.742.345.100	84,64
	Selisih			278.000					-	0,00
RAG.002	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Hortikultura	2.775	unit	43.914.375.000	2.775	100,00	43.782.078.000	99,70	43.782.078.000	99,70
526112	Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	2.775	unit	43.914.375.000	2.775	100,00	43.782.078.000	99,70	43.782.078.000	99,70
	Bantuan Cultivator	2.775	unit	43.914.375.000	2.775	100,00	43.782.078.000	99,70	43.782.078.000	99,70

D. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya (1797)

Bantuan pemerintah bentuk barang pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya terealisasi sebesar Rp19.600.000,00 atau 98,00% dari pagu sebesar Rp20.000.000,00 yang merupakan pengadaan satu unit laptop/tablet pada satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung (129120 TP).

E. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida (3993)

Bantuan pemerintah dalam bentuk uang pada kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida terealisasi sebesar Rp221.800.000.000,00 atau 99,95% dari pagu sebesar Rp222.200.000.000,00 yang merupakan kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pada satker kantor pusat Ditjen PSP (633656 KP). Bantuan pemerintah kegiatan UPPO sebesar Rp200.000.000,00 per unit yang ditransfer kepada kelompok tani dengan dua tahap pembayaran (Tahap I sebesar 70% dan Tahap II sebesar 30%).

Tabel B.4.34 Realisasi Penerima Bantuan UPPO s.d 31 Desember 2023

Tahap Transfer	Nilai Bantuan per Penerima (Rp)	Jumlah Penerima Bantuan (Orang/Poktan)	Total (Rp)
70%	140.000.000	-	-
100%	200.000.000	1.109	221.800.000.000
Total		1.109	221.800.000.000

Bantuan pemerintah dalam bentuk barang pada kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida terealisasi sebesar Rp768.220.175.969,00 atau 98,51% dari pagu sebesar

Rp779.841.859.000,00 yang terdapat pada satker kantor pusat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (633656 KP) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel B.4.35 Realisasi Belanja 526 Bentuk Barang pada Fasilitas Pupuk dan Pestisida (3993)

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	13.113.000.000	13.107.454.000	99,96
2	Pupuk Hayati Cair/Pupuk Organik Cair/Pupuk Organik Padat	73.316.700.000	73.316.418.900	99,99
3	Pupuk Organik Cair/Pupuk Hayati Cair/Pupuk Organik Padat/Pupuk Hayati Padat/Pembenah Tanah	463.180.369.000	451.838.016.969	97,55
4	Penyediaan Pupuk Silika (SiO ₂) Mendukung Produksi Tanaman Pangan	56.619.927.000	56.619.925.500	99,99
5	Dekomposer Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	19.486.080.000	19.485.922.600	99,99
6	Penyediaan Asam Humat Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	30.300.000.000	30.284.004.000	99,95
7	Pengadaan Herbisida Mendukung Pengamanan Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan	40.272.000.000	40.035.527.000	99,41
9	Pengadaan Pestisida Alami Mendukung Pengamanan Produksi Tanaman Pangan	54.418.000.000	54.405.168.000	99,98
10	Penyediaan Pupuk Magnesium (Mg) Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	29.135.602.000	29.127.739.000	99,97
11	Sisa Anggaran	181.000	-	-
	Total	779.841.859.000	768.220.175.969	98,52

Berikut ini merupakan rincian realisasi pengadaan pupuk hayati cair/pupuk organisasi cair/pupuk organik padat :

Tabel B.4.36 Rincian Realisasi Pengadaan Pupuk Hayati Cair/Pupuk Organik Cair/Pupuk Organik Padat

NO	NAMA PENYEDIA	NO KONTRAK	NILAI
1	PT. SOLUSI LINGKUNGAN INDUSTRI NUSANTARA	01/PROD/PPK-PSP.05/KONTRAK/04/2023 tgl 13 April 2023	9.945.639.900
2	CV. SUMBER ALAM BAROKAH	02/PROD/PPK-PSP.05/KONTRAK/04/2023 tgl 17 April 2023	14.976.427.200
3	PT. ECO AGRO MANDIRI	03/PROD/PPK-PSP.05/KONTRAK/04/2023 tgl 17 April 2023	9.977.690.400
4	PT. BIO KONVERSI INDONESIA	04/PROD/PPK-PSP.05/KONTRAK/05/2023 tgl 02 Mei 2023	18.785.691.400
5	PT. BINA AGROSIWI MANDIRI	05/PROD/PPK-PSP.05/KONTRAK/05/2023 tgl 04 Mei 2023	9.823.380.000
6	CV. MULTI GUNA	06/PROD/PPK-PSP.05/KONTRAK/05/2023 tgl 16 Mei 2023	9.807.590.000
	TOTAL		73.316.418.900

F. Kegiatan Bantuan Pemerintah Yang Belum Selesai Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran

Berdasarkan tata kelola bantuan pemerintah dalam bentuk uang sesuai Keputusan Ditjen PSP nomor 44/KPTS/RC.210/B/11/2022 tanggal 22 November 2022 perihal Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa penerima bantuan pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan fisik selesai atau pada akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban bantuan berupa BAST meliputi laporan jumlah dana yang diterima, dana yang dipergunakan, sisa dana, foto pelaksanaan kegiatan serta

pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Berdasarkan tarikan data MPO per tanggal 26 April 2024 masih terdapat kegiatan bantuan pemerintah tahun 2023 yang belum diselesaikan fisiknya dan belum dilengkapi dengan dokumen BAST senilai Rp5.383.000.000 pada satker pusat Ditjen PSP (633656.KP). Adapun rincian kegiatan bantuan pemerintah yang belum selesai fisiknya sampai dengan periode penyusunan laporan keuangan *audited* berupa kegiatan konservasi dan rehabilitasi pilot project mendukung kegiatan PSP, kegiatan jalan usaha tani (JUT), dan kegiatan pupuk menuju pertanian organik (UPPO) dapat dilihat pada **Lampiran B.4.4**.

6. BPPSDMP

Anggaran belanja Bantuan Pemerintah (526) pada BPPSDMP untuk Periode 31 Desember 2023 dengan pagu sebesar Rp41.635.062.805,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp190.034.850,00 sehingga realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda (MAK 526) netto adalah sebesar Rp41.445.027.955,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp42.094.375.000,00 Rincian belanja Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang dan uang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel B.4.37 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah per 31 Desember 2023 BPPSDMP

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)
Belanja 526 Bentuk Barang	6.893.361.000	6.537.371.047	0	6.537.371.047
Belanja 526 Bentuk Uang	35.201.014.000	35.097.691.758	190.034.850	34.907.656.908
Jumlah	42.094.375.000	41.635.062.805	190.034.850	41.445.027.955

Kegiatan Bantuan Pemerintah BPPSDMP meliputi 22 Satker terdiri dari 1 Satker Pusat, 10 Balai Pelatihan Pertanian, 8 Politeknik Pembangunan Pertanian dan 3 SMK-PP. Kegiatan Bantuan Pemerintah tersebut meliputi Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran P4S, Bantuan Operasional PWMP, Bantuan Sarana Praktik Siswa SMKPP, Modal Usaha Bagi peserta Implementasi PWMP, Bantuan Usaha Inkubasi Bisnis untuk Tenant, Pengembangan Fasilitas BDSP, Hibah Kompetitif, Start Up Package Bagi Cocoa Doctor serta Peningkatan Kapasitas Pengajar SMK PP.

Rincian realisasi keuangan dan fisik belanja bantuan pemerintah pada BPPSDMP sebagai berikut :

Tabel B.4.38 Realisasi Keuangan dan Fisik Belanja Bantuan Pemerintah BPPSDMP Tahun 2023

Kegiatan	Bentuk Bantuan	Keuangan		Fisik			Bentuk Bantuan
		Pagu	Realisasi	Target	Real	Sat	
Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran P4S	Barang	2.931.150.000	2.930.152.000	100	100	Paket	Kursi, meja, laptop, screen projector, printer, spound system, mesin pencacah rumput, mesin sealer, pompa air, genset, Lemari Buku, screen tripod, modem router wifi, rak etalase, papan nama, tinta pigment, karpet kain, lasser pointer, stavolt, pit composter, tungku non tiki biochar, mesin tepung, mesin penggerak dongfang, mesin jahit karung, Sepatu Boots, Pam Sprayer Elektrik,

Kegiatan	Bentuk Bantuan	Keuangan		Fisik			Bentuk Bantuan
		Pagu	Realisasi	Target	Real	Sat	
Kendaraan Roda Dua	Barang	350.000.000	-	10	0	Paket	Kendaraan Roda Dua
Bantuan Sarana Praktik Siswa SMK PP	Barang	2.605.411.000	2.603.061.047	13,124	12921	Orang	Grinder, unci sok, kulkas, sentinel air, showcase, ph meter, peralatan laboratorium bagi SMK PP (Vacuum frying, pencacah kompos, bakery Proofer, planetary mixer, showcase, microwave,
Pengembangan Fasilitas BDSP	Barang	1.006.800.000	1.004.158.000	52	52	Paket	Printer, Laptop, proyektor, Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK), Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS), Perangkat Uji Pupuk (PUP), PH Meter Takemura DM-5, Tandon Air , Mesin Perajang, Mesin Pengemas, Mesin Cacah Rumput Mini ,Mesin Pengupas Kopi Kering/Huller Kopi, Mesin Sangrai Kopi (roasting), Mesin Penepung Kopi, Timbangan, Alat Ukur Kualitas Air , Mesin Cacah Rumput, Continuous Sealer , Chopper Model , Vaccum Sealer , Cup Sealer , Spinner , Freezer , Panci, Mesin Pembuat Dodol, Mesin Perontok/Pemipil Jagung , Alat Tetas Ayam
Bantuan Operasional PWMMP	Uang	6.345.000.000	6.320.000.000	295	298	Kelompok	Bantuan uang utk KSTM sebesar @ Rp. 15.000.000,- dan PWMMP alumni sebesar @ Rp. 25.000.000,-.
Modal Usaha PMWP Bagi Peserta Implementasi	Uang	890.000.000	839.657.500	100	98	Kelompok	Benih jagung, Pupuk urea, Pupuk Dasar, Pestisida, ZA, Pupuk Phonska, Herbisida Sistemik, Herbisida, Sabit, Asahan, Domba jantan, Sapu Lidi, Ember, Ampas Tahu, Obat-obatan, Selektif, BBM traktor, Sepatu Bot, Sarung tangan, Cutter, Gunting, Chopper, Blander, Kompor Gas, Tabung gas LPG, Wadah Bumbu, Talenan,
Bantuan Usaha Inkubasi Bisnis Untuk Tenant	Uang	780.000.000	778.704.500	12	12	Paket	Gula aren, Kapulagam Mulsa, Nutrisi Pupuk Kandangm pestisida, Benih, Pembelian Alat Potong Bulu Domba, Konsentrat, Mesin Pencacah Rumput, Tong 20 Buah, Jerigen, Karung, Botol
Hibah Kompetitif	Uang	26.770.734.000	26.570.913.908	757	961	Orang	Pupuk kandang, PUPUK NPK, Pestisida, Ajir Bambu, Sprayer Elektrik, Alat Kocor, Tandon Air, Drum Air, Tali, Rafia, Sprinkler, Piva Power, Bibit, pupuk Urea, Racun, Alat Tanam jagung, Bibit Jagung, Benih Cabe, Selang Irigasi, Ajir, Nutrisi A, Nutrisi B, Fungsi Untrakol, Polly bag
Start Up Packages Bagi Cocoa Doctor	Uang	225.280.000	208.381.000	44	41	Orang	Plastik, Kayu, selang, jaring, polibag, paku, skop, baut, parang, lori, gergaji
Pengembangan Fasilitas TEFA SMK	Uang	190.000.000	190.000.000	1	1	unit	Mobil Pick Up
Jumlah		42.094.375.000	41.445.027.955				

Belanja Non Operasional Namun Direalisasikan Sebagai Bantuan yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Salah satu realisasi kegiatan yang dibiayai dengan Belanja Non Operasional adalah Kegiatan Asuransi Usaha Tani. Realisasi Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Asuransi Usaha Tani per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp47.199.920.000,00 atau 99,99% dari pagu sebesar Rp47.200.064.000,00 Kegiatan Asuransi Usaha Tani yang dilaksanakan oleh Ditjen PSP ada dua yaitu Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).

Kementerian Pertanian melalui Ditjen PSP melaksanakan kegiatan Asuransi Usaha Tani bekerja sama dengan PT Jasindo. PT Jasindo ditugaskan oleh Kementerian BUMN untuk melaksanakan penugasan pemerintah dalam hal Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) melalui Surat Menteri BUMN No S-586/MBU/09/2015 tanggal 21 September 2015 kepada Direksi PT Jasindo tentang Penugasan Pemerintah kepada BUMN sebagai Pelaksana Asuransi Usaha Tani Padi dan Surat Penugasan Menteri BUMN No S-314/MBU/05/2016 tanggal 26 Mei 2016 kepada Direksi PT Jasindo tentang Penugasan Pemerintah kepada BUMN sebagai Pelaksana Asuransi Pertanian dengan sebelumnya Menteri Pertanian menyampaikan surat kepada Menteri BUMN meminta perusahaan BUMN yang dapat menjadi perusahaan penanggung asuransi pertanian. Program AUTP dilaksanakan sejak tahun 2015, sedangkan program AUTS/K dilaksanakan sejak tahun 2016.

Anggaran dan realisasi kegiatan asuransi usaha tani sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. B.4.39 Anggaran dan Realisasi Kegiatan Asuransi Usaha Tani untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

Kegiatan	Anggaran		Realisasi	
	Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)
AUTP	305.555 Ha	44.000.064.000	305.555 Ha	43.999.920.000
AUTS/K	20.000 ekor	3.200.000.000	20.000 ekor	3.200.000.000
Total		47.200.064.000		47.199.920.000

a. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

AUTP merupakan salah satu program yang dikembangkan untuk mewujudkan peranan pemerintah dalam aspek perlindungan dan pemberdayaan petani. Dasar hukum dari kegiatan ini adalah Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09/Kpts/SR.210/B/11/2022 tanggal 22 November 2022. Bantuan premi AUTP dilakukan melalui pembayaran bantuan premi dari pemerintah sebesar Rp 144.000/ha/musim tanam (80%) dari premi yang harus dibayar sebesar Rp180.000/hektar/musim tanam sehingga petani lahan hanya membayar 20% atau Rp36.000/Ha/musim tanam untuk masa pertanggungan satu musim tanam dengan uang pertanggungan sebesar Rp6.000.000/Ha/musim tanam.

Pada periode sampai dengan 31 Desember 2023, capaian jumlah Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) tercapai 305.558,12 Ha dari target seluas 305.555 Ha. Sedangkan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp43.999.920.000,00 atau 99,97% dari anggaran sebesar Rp44.000.064.000,00 Selain itu, terdapat juga realisasi polis (fisik) AUTP sebesar 3,12 ha atau sebesar Rp449.280 yang tidak dibayarkan melalui APBN.

a. Syarat klaim AUTP

Ganti-rugi diberikan kepada Tertanggung apabila terjadi banjir, rob, kekeringan dan atau serangan OPT yang mengakibatkan kerusakan tanaman padi yang dipertanggungkan dengan kondisi persyaratan:

- 1) Umur padi sudah melewati 10 hari setelah tanam (HST).
- 2) Umur padi sudah melewati 30 hari setelah tebar pada sistem tanam benih langsung (teknologi tabela).
- 3) Umur padi sudah melewati 30 hari setelah pemotongan (HSP)/Panen pada tanaman utama dan tumbuh tunas baru pada sistem padi salibu.
- 4) Intensitas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ dan luas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ pada setiap luas petak alami.

b. Kriteria Peserta AUTP

- 1) Petani yang tergabung dalam kelompok tani atau gabungan kelompok tani
- 2) Petani pemilik dan/atau penggarap yang melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran per musim tanam (MT).
- 3) Petani pemilik dan/atau penggarap lahan sawah yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- 4) Diutamakan petani yang mendapatkan bantuan pemerintah (KUR, Saprasi, Saprodi, dan lain-lain).

c. Kriteria Lokasi

Program AUTP dilaksanakan pada:

- 1) Lahan beririgasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa dan irigasi sederhana.
- 2) Lahan rawa pasang surut atau lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi dengan baik.
- 3) Lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air permukaan atau air tanah yang memadai untuk melakukan kegiatan menanam padi.

d. Data klaim AUTP tersaji pada **Lampiran B.4.5.**

b. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)

Asuransi Usaha Tani/Ternak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai kedaulatan pangan sebagai bagian integral dari kedaulatan nasional. Dasar hukum kegiatan ini yaitu Keputusan Menteri Pertanian Nomor 10/Kpts/SR.210/B/11/2022 tanggal 22 November 2022. Hal ini dilatarbelakangi fakta bahwa pangan, termasuk didalamnya produk pangan asal ternak merupakan kebutuhan dasar warga negara yang harus dijamin ketersediaannya oleh Pemerintah. Dalam rangka penguatan skala ekonomi dan kelembagaan peternak, Pemerintah mengupayakan serangkaian kebijakan, antara lain melalui Ditjen PSP yaitu memfasilitasi Asuransi Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) yang diharapkan dapat menjamin keberlangsungan usaha dan memungkinkan sapi dapat digunakan sebagai agunan bila memerlukan pinjaman uang untuk modal.

Bantuan premi Asuransi Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dilakukan melalui pembayaran bantuan premi dari pemerintah (APBN) sebesar 80% atau sebesar Rp160.000/ekor/tahun dari premi yang harus dibayar sebesar Rp200.000/ekor/tahun sehingga peternak hanya membayar 20% atau Rp40.000,00/ekor/tahun untuk masa pertanggungan satu tahun dengan uang pertanggungan sebesar Rp10.000.000/ekor/tahun.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, kegiatan Asuransi Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) terealisasi sebesar Rp3.200.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar

Rp3.200.000.000,00 Adapun rincian realisasi kegiatan AUTS/K yang memiliki syarat yakni.

a. Syarat klaim AUTS/K

Ganti rugi dapat diberikan oleh Tertanggung kepada Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Terjadi kematian atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan.
- 2) Kematian ternak sapi/kerbau terjadi dalam jangka waktu pertanggungan.
- 3) Potong paksa dapat dilakukan jika ada surat keterangan dari Dokter Hewan / Dokter Hewan berwenang / Dokter Hewan Pemerintah / Paramedik Veteriner (Petugas Kesehatan Hewan) di bawah penyeliaan Dokter Hewan, dengan besaran ganti rugi 50% (lima puluh persen) dari harga pertanggungan.
- 4) Jika sapi/kerbau hilang karena kecurian, maka penggantian klaim kepada Tertanggung dikurangi risiko sendiri (*deductible*) sebesar 30% dari Harga Pertanggungan.

b. Kriteria Peserta

- 1) Peternak yang tergabung dalam Kelompok Ternak/Gabungan Kelompok Ternak/Koperasi Ternak
- 2) Peternak yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- 3) Peternak sapi/kerbau yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan
- 4) Sapi/kerbau betina minimal berumur 1 (satu) tahun, masih produktif dan dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari petugas kesehatan hewan atau instansi terkait yang membidangi Kesehatan Hewan bahwa ternak layak menjadi Peserta AUTS/K.
- 5) Foto ternak sapi/kerbau yang telah menggunakan identitas.
- 6) Sapi/kerbau yang didaftarkan menjadi peserta AUTS/K paling banyak 15 (lima belas) ekor per peternak.

c. Data Klaim AUTS/K tersaji pada **Lampiran B.4.6.**

B.5 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp493.275.255.634,00 dan Rp645.942.308.969,00. Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp152.667.053.335,00) atau (23,63%) dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan alokasi belanja prioritas selain pagu belanja modal tanah. maupun peralatan dan mesin untuk mendukung kegiatan operasional kantor.

**Tabel B.5.1 Perbandingan Belanja Modal untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	Realisasi Bruto 31 Desember 2023 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Belanja Modal Tanah	3.106.444.900	0	3.106.444.900	4.818.927.250	(1.712.482.350)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	265.289.470.474	12.868.241	265.276.602.233	305.372.033.613	(40.095.431.380)

Uraian	Realisasi Bruto 31 Desember 2023 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	203.802.023.516	62.795.694	203.739.227.822	254.015.649.661	(50.276.421.839)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.228.418.520	0	6.228.418.520	27.204.461.956	(20.976.043.436)
Belanja Modal Lainnya	3.888.108.460	0	3.888.108.460	44.062.596.707	(40.174.488.247)
Belanja Modal BLU	11.036.453.699	0	11.036.453.699	10.468.639.782	567.813.917
Jumlah	493.350.919.569	75.663.935	493.275.255.634	645.942.308.969	(152.667.053.335)

Tabel B.5.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Per Eselon I

Eselon I	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian Belanja	Realisasi Netto	% Realisasi
Setjen	8.115.914.000	8.060.815.796	0	8.060.815.796	99,32
Itjen	3.580.205.000	3.504.085.395	999	3.504.084.396	97,87
Ditjen TP	10.558.569.000	10.538.321.303	60.000	10.538.261.303	99,81
Ditjen Horti	7.864.775.000	7.583.619.239	11.841.586	7.571.777.653	96,27
Ditjen Bun	167.240.483.000	107.364.602.372	0	107.364.602.372	64,20
Ditjen PKH	200.439.036.000	191.629.644.015	0	191.629.644.015	95,60
Ditjen PSP	5.588.709.000	5.521.471.770	0	5.521.471.770	98,80
Balitbang	39.171.522.000	38.822.652.804	0	38.822.652.804	99,11
BPPSDMP	31.138.738.000	30.948.301.805	20.085.800	30.928.216.005	99,32
Barantan	90.148.779.000	89.377.405.070	43.675.550	89.333.729.520	99,10
Jumlah	563.846.730.000	493.350.919.569	75.663.935	493.275.255.634	87,48

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran B.5**.

B.5.1 BELANJA MODAL TANAH

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.106.444.900,00 dan Rp4.818.927.250,00. Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp1.712.482.350,00) atau (35,54%) dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan alokasi belanja prioritas selain pagu belanja modal tanah.

Tabel B.5.1.1 Perbandingan Belanja Modal Tanah untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Belanja Modal Tanah	Realisasi Bruto 31 Desember 2023 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Tanah	2.467.760.800	0	2.467.760.800	4.300.878.750	(1.833.117.950)
Pembebasan Tanah	232.145.000	0	232.145.000	0	232.145.000

Uraian Belanja Modal Tanah	Realisasi Bruto 31 Desember 2023 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000
Pembuatan Sertifikat Tanah	2.000.000	0	2.000.000	13.850.000	(11.850.000)
Pengukuran dan Pematangan Tanah	398.539.100	0	398.539.100	467.235.500	(68.696.400)
Biaya Pengukuran Tanah	0	0	0	36.963.000	(36.963.000)
Jumlah	3.106.444.900	0	3.106.444.900	4.818.927.250	(1.712.482.350)

Tabel B.5.1.2 Realisasi Belanja Modal Tanah per Eselon I untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

Eselon I	Anggaran	Realisasi Netto (Rp)
DITJEN TP	240.145.000	240.145.000
DITJEN PKH	199.929.000	198.539.100
BARANTAN	2.668.969.000	2.667.760.800
Jumlah	3.109.043.000	3.106.444.900

B.5.2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp265.276.602.233,00 dan Rp305.372.033.613,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp40.095.431.380,00) atau (13,13%) dibandingkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan alokasi belanja prioritas selain belanja modal peralatan dan mesin untuk mendukung kegiatan operasional kantor.

Tabel B.5.2.1 Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Belanja Modal Peralatan/Mesin	Realisasi Bruto 31 Desember 2023 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Peralatan dan Mesin	263.889.517.103	12.868.241	263.876.648.862	303.729.569.131	(39.852.920.269)
Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	0	0	0	240.020.000	(240.020.000)
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	79.535.000	0	79.535.000	0	79.535.000
Perjalanan	48.737.441	0	48.737.441	55.647.012	(6.909.571)
Penambahan Nilai	1.271.680.930	0	1.271.680.930	1.346.797.470	(75.116.540)
Jumlah	265.289.470.474	12.868.241	265.276.602.233	305.372.033.613	(40.095.431.380)

Tabel B.5.2.2 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Eselon I Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

Eselon I	Anggaran	Realisasi Netto (Rp)
SETJEN	7.287.747.000	7.238.843.356
ITJEN	2.392.336.000	2.352.284.674
DITJEN TP	9.462.795.000	9.442.792.463
DITJEN HORTI	3.766.745.000	3.499.444.127
DITJEN BUN	81.817.871.000	79.011.505.880
DITJEN PKH	83.054.710.000	78.486.269.255
DITJEN PSP	5.192.709.000	5.126.417.770
BSIP	13.597.382.000	13.547.620.497
BPPSDMP	16.130.213.000	15.950.349.032
BARANTAN	51.146.295.000	50.621.075.179
Jumlah	273.848.803.000	265.276.602.233

B.5.3 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp203.739.227.822,00 dan Rp254.015.649.661,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp50.276.421.839,00) atau (19,79%) dibandingkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan alokasi belanja prioritas selain pagu belanja modal gedung dan bangunan.

Tabel B.5.3.1 Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Realisasi Bruto 31 Desember 2023 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Gedung dan Bangunan	147.823.326.634	21.682.444	147.801.644.190	207.887.195.857	(60.085.551.667)
Bahan Baku Gedung dan Bangunan	7.416.950	0	7.416.950	11.156.800	(3.739.850)
Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	13.910.000	0	13.910.000	8.900.000	5.010.000
Perencanaan dan Pengawasan	5.807.172.659	10.000.000	5.797.172.659	3.208.574.823	2.588.597.836
Perjalanan	36.733.000	0	36.733.000	466.574.408	(429.841.408)
Penambahan Nilai	50.113.464.273	31.113.250	50.082.351.023	42.433.247.773	7.649.103.250
Jumlah	203.802.023.516	62.795.694	203.739.227.822	254.015.649.661	(50.276.421.839)

Tabel B.5.3.2 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Eselon I untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

Eselon I	Anggaran	Realisasi Netto (Rp)
SETJEN	594.167.000	589.859.315
DITJEN TP	563.009.000	562.709.000
DITJEN HORTI	3.998.030.000	3.972.833.526

Eselon I	Anggaran	Realisasi Netto (Rp)
DITJEN BUN	84.996.515.000	27.927.949.492
DITJEN PKH	103.484.672.000	99.385.157.261
BSIP	25.088.187.000	24.789.624.227
BPPSDMP	13.396.303.000	13.377.722.360
BARANTAN	33.414.547.000	33.133.372.641
Jumlah	265.535.430.000	203.739.227.822

B.5.4 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.228.418.520,00 dan Rp27.204.461.956,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp20.976.043.436,00) atau (77,11%) dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan alokasi belanja prioritas selain pagu belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Tabel B.5.4.1 Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	Realisasi Bruto 31 Desember 2023 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Jalan dan Jembatan	2.906.133.620	0	2.906.133.620	15.020.193.300	(12.114.059.680)
Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	0	0	0	27.500.000	(27.500.000)
Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	123.356.760	0	123.356.760	659.551.100	(536.194.340)
Perjalanan Jalan dan Jembatan	0	0	0	167.318.797	(167.318.797)
Irigasi	252.994.840	0	252.994.840	4.055.289.000	(3.802.294.160)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi	0	0	0	262.900.000	(262.900.000)
Belanja Modal Perjalanan Irigasi	0	0	0	11.573.347	(11.573.347)
Jaringan	838.506.000	0	838.506.000	1.933.637.130	(1.095.131.130)
Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	1.760.511.000	0	1.760.511.000	3.830.131.852	(2.069.620.852)
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0	0	0	595.705.000	(595.705.000)
Penambahan Nilai Jaringan	346.916.300	0	346.916.300	640.662.430	(293.746.130)
Jumlah	6.228.418.520	0	6.228.418.520	27.204.461.956	(20.976.043.436)

Tabel B.5.4.2 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan per Eselon I untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

Eselon I	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)
DITJEN TP	54.000.000	53.994.840
DITJEN BUN	233.035.000	232.085.000
DITJEN PKH	2.375.770.000	2.371.724.700

Eselon I	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto
		(Rp)
BSIP	485.953.000	485.408.080
BPPSDMP	181.932.000	173.685.000
BARANTAN	2.918.968.000	2.911.520.900
Jumlah	6.249.658.000	6.228.418.520

B.5.5 BELANJA MODAL LAINNYA

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.888.108.460,00 dan Rp44.062.596.707,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp40.174.488.247,00) atau (91,18%) dibandingkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan alokasi belanja prioritas selain pada belanja modal lainnya.

**Tabel B.5.5.1 Perbandingan Belanja Modal Lainnya
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian Belanja Modal Lainnya	Realisasi Bruto 31 Desember 2023 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Belanja Modal Lainnya	3.659.099.019	0	3.659.099.019	43.520.286.284	(39.861.187.265)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	229.009.441	0	229.009.441	542.310.423	(313.300.982)
Jumlah	3.888.108.460	0	3.888.108.460	44.062.596.707	(40.174.488.247)

Tabel B.5.5.2 Realisasi Belanja Modal Lainnya per Eselon I

Eselon I	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)
SETJEN	234.000.000	232.113.125
ITJEN	1.187.869.000	1.151.799.722
DITJEN TP	238.620.000	238.620.000
DITJEN HORTI	100.000.000	99.500.000
DITJEN BUN	193.062.000	193.062.000
DITJEN PKH	154.000.000	151.500.000
DITJEN PSP	396.000.000	395.054.000
BPPSDMP	1.430.290.000	1.426.459.613
Jumlah	3.933.841.000	3.888.108.460

B.5.6 BELANJA MODAL BLU

Realisasi Belanja Modal BLU untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.036.453.699,00 dan Rp10.468.639.782,00. Realisasi Belanja Modal BLU untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp567.813.917,00 atau 5,42% dibandingkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan BLU yang diiringi dengan kebijakan investasi untuk BLU berupa gedung dan bangunan.

**Tabel B.5.6 Perbandingan Belanja Modal BLU untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian Belanja Modal BLU	Realisasi Bruto 31 Desember 2023 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Peralatan dan Mesin	5.958.949.892	0	5.958.949.892	6.796.349.782	(837.399.890)
Gedung dan Bangunan	5.077.503.807	0	5.077.503.807	3.480.790.000	1.596.713.807
Lainnya	0	0	0	191.500.000	(191.500.000)
Jumlah	11.036.453.699	0	11.036.453.699	10.468.639.782	567.813.917

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**ASET LANCAR****C.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp324.945.830,00 dan Rp619.103.780,00 dengan rincian Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut.

Tabel C.1.1 Perbandingan Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian Eselon I	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen TP	0	19.188.000	(19.188.000)	(100,00)
2	Ditjen Horti	650.500	0	650.500	~
3	Ditjen Bun	298.374.330	0	298.374.330	~
4	Ditjen PKH	0	584.317.780	(584.317.780)	(100,00)
5	Ditjen PSP	0	15.598.000	(15.598.000)	(100,00)
6	BSIP	25.921.000	0	25.921.000	~
	Jumlah	324.945.830	619.103.780	(294.157.950)	(47,51)

Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp324.945.830,00 telah dilakukan penyetoran ke rekening Kas Negara dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.1.2 Daftar Setoran Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian Eselon I	Uraian Satker	31 Desember 2023 (Rp)	Tanggal Setor	Penyetoran	NTPN
1	Ditjen Horti	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat	650.500	3 Jan 2024	650.500	D30C07NAP6H1NDSI
2	Ditjen Bun	Kantor Pusat Ditjen Perkebunan	298.374.330	8 Jan 2024	298.374.330	9349C6QT9C050IKF
3	BSIP	Kantor Pusat BSIP	25.921.000	2 Jan 2024	25.921.000	36C1E7NAP6GO66KM
	Jumlah		324.945.830		324.945.830	

Rincian daftar saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan daftar rekening Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 disajikan pada **Lampiran C.1.1** dan **C.1.2**.

C.2 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.266.479,00 yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di Bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari

pelaksanaan tugas pemerintahan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Untuk saldo per 31 Desember 2023 sudah nihil, sedangkan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.266.479,00 sudah dilakukan penyetoran ke kas negara yang berasal dari Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan (425331) pada satker BBKP Belawan dengan NTPN 1F1477QLUFMNE2AA tanggal 27 April 2023.

Rincian daftar saldo Kas di Bendahara Penerimaan dan Daftar daftar rekening Bendahara Penerimaan dapat disajikan pada **Lampiran C.2.1** dan **C.2.2**.

C.3 KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.719.292.438,00 dan Rp6.098.880.883,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas sebagai berikut.

Tabel C.3.1 Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022

Keterangan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.218.895.091	1.378.916.969	(160.021.878)	(11,60)
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	2.197.485.245	4.312.675.828	(2.115.190.583)	(49,05)
Kas Lainnya di BLU	302.912.102	407.288.086	(104.375.984)	(25,63)
Jumlah	3.719.292.438	6.098.880.883	(2.379.588.445)	(39,02)

Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I sebagai berikut.

Tabel C.3.2 Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Eselon I	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Setjen	346.393.516	1.135.615.877	(789.222.361)	(69,50)
2	Ditjen TP	326.405.712	765.962.180	(439.556.468)	(57,39)
3	Ditjen Horti	17.957.672	0	17.957.672	~
4	Ditjen Bun	598.824.707	380.000	598.444.707	157.485,45
5	Ditjen PKH	302.912.102	409.236.901	(106.324.799)	(25,98)
6	BSIP	2.126.798.729	3.632.521.209	(1.505.722.480)	(41,45)
7	BPPSDMP	0	155.164.716	(155.164.716)	(100,00)
	Jumlah	3.719.292.438	6.098.880.883	(2.379.588.445)	(39,02)

Rincian daftar saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 per Satker disajikan pada **Lampiran C.3.1**.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 pada tabel diatas dapat dijelaskan pada beberapa Eselon I yakni sebagai berikut.

1. Setjen sebesar Rp346.393.516,00 yang terdiri dari Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp267.547.000,00 dan Kas Lainnya dari Hibah sebesar Rp78.846.516,00 dengan penjelasan sebagai berikut.
 - a. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp267.547.000,00 merupakan uang makan bulan Desember 2023 yang berada di masing-masing Bendahara Pembantu Biro-

biro lingkup Satker Sekretariat Jenderal. Uang makan tersebut dibagikan ke pegawai pada bulan Januari 2024 saat absen pegawai sudah definitif.

- b. Kas Lainnya dari Hibah sebesar Rp78.846.516,00 yang berada pada Satker Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang merupakan hibah langsung yang terdiri dari proyek hibah sebagai berikut.

Tabel C.3.3 Rincian Proyek Hibah pada Setjen

NO	NAMA PROJECT	DONOR	NO REGISTER	PERIODE	Nilai/Saldo
1	<i>Inclusive Agriculture Value Chain Financing (Indo Finance)</i>	IFPRI	2DCBX28A	4 Februari 2019-31 Desember 2022 diperpanjang s.d 31 Desember 2023	520.764
2	<i>Development of Area Wide Management Approach For Fruit Flies in Mango For Indonesia Philipines Australia and The Asia Pasific Region(Indo Wam)</i>	ACIAR	2QKBB1PA	5 Maret 2019-30 Juni 2023 diperpanjang s.d 30 Juni 2024	78.106.257
3	<i>Understanding the drivers of successful and inclusive rural regional transformation: Sharing experiences and policy advice in Bangladesh ChinaIndonesia and Pakistan (IndoTransform)</i>	ACIAR	2NX53DSA	<i>date sign 11 December 2019 date effective 01 January 2020 - closing date 31 December 2023</i>	219.495
Jumlah					78.846.516

2. Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp326.405.712,00 merupakan pajak transaksi bulan Desember 2023, yang dibayarkan di bulan Januari 2024 pada Satker Pusat Ditjen Tanaman Pangan.

Tabel C.3.4 Rekapitulasi Pajak yang Sudah di setor ke Kas Negara pada Ditjen Bun

Uraian Pajak	Nilai Pajak	Ket.
PPN	117.223.751	Seluruhnya sudah disetor ke Kas Negara di bulan Januari 2024
PPH 21	113.344.250	
PPH 22	19.935.616	
PPH 23	75.902.095	
Total	326.405.712	

Rincian setoran pajak beserta dengan NTPN pada Ditjen Tanaman Pangan per 31 Desember 2023 disajikan pada **Lampiran C.3.2**.

3. Ditjen Horti sebesar Rp17.957.672,00 merupakan sisa pengembalian belanja perjalanan dinas pegawai TA 2023 pada Satker Pusat Ditjen Hortikultura sudah dilakukan penyetoran ke Kas Negara di bulan Februari 2024, sebagaimana yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel C.3.5 Rincian Sisa Perjalan Dinas Pegawai yang sudah disetor ke Kas Negara

NO	URAIAN	NTPN	TANGGAL BAYAR	NILAI (Rp)
1	Pengembalian perjalanan dalam rangka penilaian kebun / survailence TA 2023 an. Slamet Ari dkk	991C23CIFJUD341E	12 FEBRUARI 2024	361.050
2	Penerimaan monitoring registrasi kebun dan lahan usaha ke lokasi TA 2023 an. Slamet Ari dkk	F278055DF935T6U8	12 FEBRUARI 2024	3.257.145
3	Pengembalian perjalanan dinas biasa dalam rangka promosi produk TA 2023 an. Ofi Nidaussoleha dkk	E99752G4VPC0LRPT	12 FEBRUARI 2024	3.580.350
4	Pengembalian perjalanan dinas dalam rangka identifikasi / koordinasi / persiapan / pembinaan sarana pascapanen TA 2023 an. Bambang Sugiharto dkk	E47D96U8EU7UN1IG	12 FEBRUARI 2024	1.900.000

NO	URAIAN	NTPN	TANGGAL BAYAR	NILAI (Rp)
5	Pengembalian perjalanan pimpinan dalam rangka moneyv kegiatan PPHH TA 2023 an. Hanang dkk	8CB460NA0477ROQK	12 FEBRUARI 2024	7.058.627
6	Pengembalian monitoring registrasi kebun dan lahan usaha ke lokasi TA 2023 an. Dina Martha dkk	F7B076U8EU7UN72K	12 FEBRUARI 2024	388.500
7	Pengembalian perjalanan dinas biasa dalam rangka penilaian kebun / surveillance TA 2023 an. Slamet Ari dkk	906876U8EU7UN8QF	12 FEBRUARI 2024	1.372.000
8	Pengembalian monitoring registrasi kebun dan lahan usaha ke lokasi TA 2023 an. Hotman Fajar dkk	4EF292G4VPC0MDK3	12 FEBRUARI 2024	40.000
TOTAL				17.957.672

4. Ditjen Bun sebesar Rp598.824.707,00 merupakan Pengembalian sisa LS Tahun 2023 yang disetorkan tanggal 08/01/2024 dengan NTPN: 5A56C3CIFJRACHRV sebesar Rp14.944.305,00 dan pajak yang belum disetor sebesar Rp583.880.402,00 yang telah disetorkan ditahun 2024 pada Satker Pusat Ditjen Perkebunan, berikut ini disajikan rekapitulasi pajak yang sudah dilakukan penyetoran sebagai berikut.

Tabel C.3.6 Rekapitulasi Pajak yang Sudah di setor ke Kas Negara pada Ditjen Bun

Uraian	PPN	PPH 21	PPH 22	PPH 23	JUMLAH PAJAK
- Bulan Januari 2024	339.280.299	67.384.842	43.089.467	66.063.911	515.818.519
- Bulan Februari 2024	28.668.428	453.000	3.909.331	5.404.217	38.434.976
- Bulan Maret 2024	11.465.270	8.070.000	2.231.354	1.805.320	23.571.944
- Bulan April 2024	2.782.790	435.000	1.675.770	1.161.403	6.054.963
Total	382.196.787	76.342.842	50.905.922	74.434.851	583.880.402

5. Ditjen PKH sebesar Rp302.912.102,00 berupa Kas Lainnya di BLU yang berada pada Satker Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari yang merupakan kas yang berasal dari penerimaan yang belum dilakukan pengesahan penerimaan.
6. BSIP sebesar Rp2.126.798.729,00 yang terdiri dari Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp8.160.000,00 dan Kas Lainnya dari Hibah sebesar Rp2.118.638.729,00 dengan penjelasan sebagai berikut :
- Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp8.160.000,00 terdapat pada satker Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa yang merupakan dana kerjasama pengamanan Aset BMN yang ditransfer dari Sekretariat BSIP pada tanggal 29 Desember 2023.
 - Kas Lainnya dari Hibah sebesar Rp2.118.638.729,00 merupakan dana hibah luar negeri yang terdapat di 12 (dua belas) satker BSIP antara lain sebagai berikut:
 - Satker Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian memiliki saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah sebesar Rp461.802.853,00 merupakan dana hibah Luar Negeri dalam bentuk uang dari Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI) dengan nama *proyek Improvement of Rural Agricultural Technology Extension System in Asia*.
 - Satker Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen memiliki saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah sebesar Rp497.350.652,00 merupakan dana hibah Luar

- Negeri dalam bentuk uang yang bersumber dari AFACI dengan nama proyek *Establishment of Asian Food Composition Database*.
- 3) Satker Balai Besar Pengujian Standar Sumber Daya Lahan Pertanian memiliki Kas Lainnya di K/L dari Hibah sebesar Rp3.000,00. Sisa saldo ini merupakan sisa dana hibah yang bersumber dari (AFACI) dengan nama proyek *Development of Soil Atlas of Asia and National Soil Information of Indonesia*. Sisa dana hibah tersebut dilakukan penyetoran pada tanggal 22 Januari tahun 2024 (NTPN B5DE27NAP6MMURPG) sesuai arahan dari KPPN Hibah dan penyetoran tersebut baru dilakukan setelah periode pelaporan karena terkendala oleh proses revisi DIPA hibah.
 - 4) Satker Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah dan Obat memiliki saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah sebesar Rp30.800.000,00 merupakan sisa dana hibah Luar Negeri dalam bentuk uang dari Hirata Corporation dengan nama proyek *Bioprospecting of Indonesian Medicinal Plants for Functional Foods Cosmetics Toiletries and Pharmaceuticals Uses*.
 - 5) Satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan memiliki saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah sebesar Rp1.936.626,00 merupakan sisa dana hibah Luar Negeri dari ACIAR dengan nama proyek *Improving Cattle Production and Smallholder Livelihoods in Crop-Based Farming Systems in Indonesia*. Sisa dana hibah ini telah disetorkan namun masih tercatat dalam neraca satker disebabkan karena double pencatatan saldo pada modul Bendahara sebesar sisa saldo tersebut.
 - 6) Satker Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias memiliki saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah sebesar Rp12.475.048,00 merupakan sisa dana hibah Luar Negeri dalam bentuk uang dari Sakata Cooperation dengan nama proyek *Cooperation Expedition Evaluation and Breeding Program for New Ornamental Plants* (CEEBCP).
 - 7) Satker Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk memiliki saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah sebesar Rp34.352.991,00. Saldo hibah ini merupakan dana hibah Luar Negeri dari ICRAF dan UNL-USA dengan nama proyek *Improving the Management of Peatlands and the Capacities of Stakeholders in Indonesia* (Peat-IMPACTS Indonesia) and *Climate Change Adaptation and Mitigation Under Smallholder Plantation In Indonesia*.
 - 8) Satker Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat memiliki saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah sebesar Rp240.235,00 merupakan sisa dana hibah Luar Negeri dalam bentuk uang dari Hirata Corporation dengan nama proyek *Bio-Prospective of Indonesian Undomesticated-Nicotiana Hibiscus Ceiba Ricinus and Sesame Plants as New Resources of Novel Bioactive Compounds for Pharmaceuticals Toiletry and Cosmetic Products*.
 - 9) Satker Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang memiliki saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah sebesar Rp1.324.402,00 merupakan sisa dana hibah Luar Negeri dari AVDRC dan Hirata Corporation dengan nama proyek *International Mungbean Improvement Network (IMIN)2 dan Exploration and Mass Production Technology for Maximizing Beneficial Compounds of Indigenous Under Utilized Legume*.

- 10) Satker Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika memiliki saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah sebesar Rp73.788,00 merupakan sisa dana hibah Luar Negeri dalam bentuk uang dari Hirata Corporation dengan nama proyek *Development of Potent Food Supplement from Citrus and Its Wild Relative*.
- 11) Satker Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Tanaman Padi yakni memiliki saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah sebesar Rp607.277.000,00. Sisa dana hibah tersebut berasal dari AFACI dengan nama proyek *High Yielding Stress Tolerant Rice Varieties Suitable for AFACI Member Countries*.
- 12) Satker Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran memiliki saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah sebesar Rp471.002.134,00. Sisa dana hibah tersebut berasal Onion NZ dengan nama proyek *Agriculture standardization toward sustainable shallot production in Indonesia*.

Daftar Rekening Penampung Lainnya (RPL) per 31 Desember 2023 pada Eselon I dapat disajikan pada Lampiran C.3.3.

C.4 KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp26.032.774.492,00 dan Rp20.467.014.941,00 yang merupakan kas berada dibawah tanggung jawab Bendahara BLU yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tupoksi masing-masing satuan kerja.

Daftar secara rinci nama satker dan Saldo Kas di Bendahara pada BLU per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel C.4.1. Perbandingan Rincian Kas dan Bank pada BLU

NO.	Uraian Satker	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pusat Veteriner Farma Surabaya	17.376.363.421	6.157.500.335	11.218.863.086	182,20
2	Balai Inseminasi Buatan Lembang	1.708.055.887	7.330.376.167	(5.622.320.280)	(76,70)
3	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	6.948.355.184	6.979.138.439	(30.783.255)	(0,44)
	Jumlah	26.032.774.492	20.467.014.941	5.565.759.551	27,19

Rincian mutasi tambah dan kurang pada Kas Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut :

Tabel C.4.2. Rincian Mutasi tambah dan kurang Kas dan Bank pada BLU

URAIAN	Pusat Veteriner Farma Surabaya	Balai Inseminasi Buatan Lembang	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	TOTAL
Saldo 31 Desember 2022	6.157.500.335	7.330.376.167	6.979.138.439	20.467.014.941
MUTASI TAMBAH				
Penerimaan	24.972.457.606	28.752.973.663	33.784.212.115	87.509.643.384
Reklas Dari Investasi jangka pendek	0	0	21.000.000.000	21.000.000.000
TOTAL MUTASI TAMBAH	24.972.457.606	28.752.973.663	54.784.212.115	108.509.643.384
MUTASI KURANG				

URAIAN	Pusat Veteriner Farma Surabaya	Balai Inseminasi Buatan Lembang	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	TOTAL
Belanja Barang	13.753.594.520	21.000.293.943	44.153.541.671	78.907.430.134
Belanja Modal	0	375.000.000	10.661.453.699	11.036.453.699
Reklas ke Investasi Jangka Pendek	0	13.000.000.000	0	13.000.000.000
TOTAL MUTASI KURANG	13.753.594.520	34.375.293.943	54.814.995.370	102.943.883.833
Saldo 31 Desember 2023	17.376.363.421	1.708.055.887	6.948.355.184	26.032.774.492

C.5 INVESTASI JANGKA PENDEK – BADAN LAYANAN UMUM

Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum merupakan akun hasil dari reklasifikasi Kas dan Bank BLU yang sudah disahkan yang berbentuk Deposito dan Investasi Jangka Pendek. Saldo Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp131.432.327.661,00 dan Rp139.432.327.661,00. Rincian Investasi Jangka Pendek pada BLU per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel C.5.1. Perbandingan Rincian Investasi Jangka Pendek - BLU per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Pusat Veteriner Farma	47.500.000.000	47.500.000.000	0	0,00
2	Balai Inseminasi Buatan Lembang	31.432.327.661	18.432.327.661	13.000.000.000	70,53
3	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	52.500.000.000	73.500.000.000	(21.000.000.000)	(28,57)
	Jumlah	131.432.327.661	139.432.327.661	(8.000.000.000)	(5,74)

Penurunan Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum sebesar (Rp8.000.000.000,00) dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kenaikan pada satker Balai Inseminasi Buatan Lembang sebesar Rp13.000.000.000,00 berasal dari penerimaan yang diinvestasikan dalam bentuk deposito;
2. Penurunan pada satker Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari sebesar (Rp21.000.000.000,00) dikarenakan adanya penarikan dana dari rekening deposito ke rekening operasional BLU yang diperuntukan untuk keperluan operasional satker.

Adapun rincian rekening deposito dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Rincian Rekening Deposito Satker Pusat Veteriner Farma sebesar Rp47.500.000.000,00 sebagai berikut :

Tabel C.5.2. Rekening Deposito Satker Pusat Veteriner Farma

NO	BANK	NO. REKENING	NILAI
1	BRI	097601004255406	7.500.000.000
2	BTN	00058014000392888	5.000.000.000
3	BJB	A821851-2021IDR000384	4.000.000.000
4	BJB	A811833-2020IDR000892	6.000.000.000
5	BTN	0005801400038779	5.000.000.000
6	BTN	0005801400039149	7.500.000.000
7	BJB	0167DEP2022IDR000181	7.500.000.000

NO	BANK	NO. REKENING	NILAI
8	BJB	0187DEP2022IDR000920	5.000.000.000
	Jumlah		47.500.000.000

- Rincian Rekening Deposito Satker BIB Lembang sebesar Rp31.432.327.661,00 sebagai berikut:

Tabel C.5.3. Rekening Deposito Satker BBIB Lembang

NO	BANK	NO. REKENING	NILAI
1	BRI	0337.01.005956.40.7	6.000.000.000
2	Bank Muamalat Indonesia	1200009250	4.000.000.000
3	Bank Muamalat Indonesia	1020021488	5.000.000.000
4	Bank Banten Jawa Barat Syariah	80415744132	7.432.327.661
5	Bank Syariah Indonesia	7000000181120110	9.000.000.000
	JUMLAH DEPOSITO		31.432.327.661

- Rincian Rekening Deposito Satker BBIB Singosari sebesar Rp52.500.000.000,00 sebagai berikut:

Tabel C.5.4. Rekening Deposito Satker BBIB Singosari

NO	BANK	NO. REKENING	NILAI
1	BTN Cab.Malang	00012.01.40.012252.2	10.000.000.000
2	BTN Cab.Malang	00012-01.40.012487.5	21.500.000.000
3	BSI Cab.Malang	7000000171096717	1.000.000.000
4	BRI Cab.Lawang	055401003233405	5.000.000.000
5	BRI Cab.Lawang	055401003255407	7.000.000.000
6	BRI Cab.Lawang	055401003287404	3.000.000.000
7	BSI Cab.Lawang	7000000181270203	5.000.000.000
		Jumlah	52.500.000.000

C.6 BELANJA DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp41.402.424.980,00 dan Rp84.760.518.417,00. Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel C.6.1 Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I

No	Uraian Eselon I	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Setjen	346.779.716	511.228.365	(164.448.649)	(32,17)
2	Ditjen TP	1.839.375.520	3.576.022.375	(1.736.646.855)	(48,56)
3	Ditjen Bun	0	3.021.217.506	(3.021.217.506)	(100,00)
4	Ditjen PKH	0	10.042.309.861	(10.042.309.861)	(100,00)
5	Ditjen PSP	39.216.269.744	67.135.875.956	(27.919.606.212)	(41,59)
6	BPPSDMP	0	378.000.000	(378.000.000)	(100,00)
7	Barantan	0	95.864.354	(95.864.354)	(100,00)
	Jumlah	41.402.424.980	84.760.518.417	(43.358.093.437)	(51,15)

Berikut ini disajikan penjelasan rincian mutasi penambahan dan pengurang atas Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel C.6.2 Rincian Mutasi Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I

No	Uraian Eselon I	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Setjen	511.228.365	346.779.716	511.228.365	346.779.716
2	Ditjen TP	3.576.022.375	1.619.375.520	3.356.022.375	1.839.375.520
3	Ditjen Bun	3.021.217.506	0	3.021.217.506	0
4	Ditjen PKH	10.042.309.861	0	10.042.309.861	0
5	Ditjen PSP	67.135.875.956	101.039.375.900	128.958.982.112	39.216.269.744
6	BPPSDMP	378.000.000	0	378.000.000	0
7	Barantan	95.864.354	0	95.864.354	0
	Jumlah	84.760.518.417	103.005.531.136	146.363.624.573	41.402.424.980

Berdasarkan rincian mutasi Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dapat disajikan per Satker pada **Lampiran C.6**.

C.7 UANG MUKA BELANJA (*Prepayment*)

Saldo Uang Muka Belanja per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp4.003.020,00. Uang Muka Belanja merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca yang berasal dari belanja pegawai yang telah dibayarkan dan membebani DIPA tahun berjalan. Saldo Uang Muka Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.003.020,00 berasal dari satuan kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang dimana ada pegawainya an. Agus Ali Hamzah mengajukan persekot gaji ke KPPN atas kepindahannya dari Kepala Bagian Tata Usaha BKP Kelas I Kupang yang dimutasi menjadi Kepala Bagian Tata Usaha BKP Kelas I Semarang sesuai dengan SK Nomor 675/Kpts/KP.230/A/11/2021 tanggal 15 November 2021. saldo sebesar Rp4.003.020,00 tersebut sudah diselesaikan pada tahun 2023.

C.8 PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp131.249.200,00 dan Rp69.176.300,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel C.8.1. Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per Eselon I

No	Eselon I	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	BSIP	47.510.700	34.121.300	13.389.400	39,24
2	BPPSDMP	83.738.500	35.055.000	48.683.500	138,88
	Jumlah	131.249.200	69.176.300	62.072.900	89,73

Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 pada tabel di atas merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 sebesar Rp131.249.200,00 terdapat pada 2 (dua) Satker yakni.

1. Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu Malang Jawa Timur sebesar Rp83.738.500,00

merupakan hasil penjualan susu dan telur yang belum di terima pembayarannya per 31 Desember 2023, dan sudah dilakukan penyetoran ke Kas Negara di bulan Januari 2024, sebagaimana yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel C.8.2. Rincian Penjualan Susu dan Telur yang sudah disetor ke Kas Negara

NO	URAIAN	NTPN	TANGGAL BAYAR	NILAI (Rp)
1	Hasil Penjualan Susu Kambing	BB32861QV3IBCH66	4 Januari 2024	2.662.500
2	Hasil Penjualan Telur Ayam Layer	0E9786U8EU4UFCVF	11 Januari 2024	36.148.000
3	Hasil Penjualan Susu Sapi	9FC907QLUONGD4KE	17 Januari 2024	44.928.000
TOTAL				83.738.500

- Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat sebesar Rp47.510.700,00 berupa Pendapatan yang berasal dari penerimaan Rumah Dinas type 36 type 60 type 70 dan type 200 sebesar Rp3.710.700,00 sudah dilakukan penyetoran ke Kas Negara di Tahun 2024 oleh pegawai yang bersangkutan serta sewa lahan Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (IP2TP) Sukarami sebesar Rp43.800.000,00.

C.9 PIUTANG BUKAN PAJAK

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp16.040.870.339,00 dan Rp14.714.379.286,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada Kementerian Pertanian per Eselon I per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel C.9.1 Rincian Piutang PNBPer Eselon I per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Eselon I	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Setjen	641.930.802	2.033.109.394	(1.391.178.592)	(68,43)
2	Itjen	14.541.856	50.700.000	(36.158.144)	(71,32)
3	Ditjen TP	372.002.693	374.496.226	(2.493.533)	(0,67)
4	Ditjen Horti	772.951.057	837.356.513	(64.405.456)	(7,69)
5	Ditjen Bun	1.209.897.852	1.420.967.501	(211.069.649)	(14,85)
6	Ditjen PKH	10.068.303.515	6.550.038.185	3.518.265.330	53,71
7	Ditjen PSP	0	349.927.130	(349.927.130)	(100,00)
8	BSIP	2.947.035.664	2.781.409.899	165.625.765	5,95
9	BPPSDMP	2.550.000	70.270.000	(67.720.000)	(96,37)
10	Barantan	11.656.900	246.104.438	(234.447.538)	(95,26)
Jumlah		16.040.870.339	14.714.379.286	1.326.491.053	9,01

Berikut ini disajikan penjelasan rincian mutasi penambahan dan pengurang atas Piutang PNBPer 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel C.9.2 Rincian Mutasi Piutang Bukan Pajak per Eselon I

No	Uraian Eselon I	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Setjen	2.033.109.394	17.291.038	1.408.469.630	641.930.802
2	Itjen	50.700.000	14.541.856	50.700.000	14.541.856

No	Uraian Eselon I	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3	Ditjen TP	374.496.226	586.000	3.079.533	372.002.693
4	Ditjen Horti	837.356.513	119.700	64.525.156	772.951.057
5	Ditjen Bun	1.420.967.501	43.190.595	254.260.244	1.209.897.852
6	Ditjen PKH	6.550.038.185	4.010.225.447	491.960.117	10.068.303.515
7	Ditjen PSP	349.927.130	0	349.927.130	0
8	BSIP	2.781.409.899	307.821.056	142.195.291	2.947.035.664
9	BPPSDMP	70.270.000	56.229.814	123.949.814	2.550.000
10	Barantan	246.104.438	35.356.848	269.804.386	11.656.900
	Jumlah	14.714.379.286	4.485.362.354	3.158.871.301	16.040.870.339

Berdasarkan rincian mutasi Piutang Bukan Pajak per debitur per 31 Desember 2023 dapat disajikan per Satker pada **Lampiran C.9**.

C.10 BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN / TUNTUTAN GANTI RUGI

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp9.889.014.663,00 dan Rp11.337.073.488,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Eselon I per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel C.10.1. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Eselon I

No	Eselon I	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Setjen	1.744.080.514	1.744.080.514	0	0,00
2	Ditjen TP	252.404.318	252.404.318	0	0,00
3	Ditjen Horti	4.636.951.194	4.969.433.488	(332.482.294)	(6,69)
4	Ditjen Bun	2.157.596.990	2.254.970.169	(97.373.179)	(4,32)
5	Ditjen PKH	238.948.270	271.628.322	(32.680.052)	(12,03)
6	Ditjen PSP	103.779.250	931.301.750	(827.522.500)	(88,86)
7	BSIP	755.254.127	913.254.927	(158.000.800)	(17,30)
	Jumlah	9.889.014.663	11.337.073.488	(1.448.058.825)	(12,77)

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel C.10.2 Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Bagian Lancar TP	94.625.000	105.000.000
Bagian Lancar TGR	9.794.389.663	11.232.073.488
Jumlah	9.889.014.663	11.337.073.488

Berikut ini disajikan penjelasan rincian mutasi penambahan dan pengurang atas Piutang PNB per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel C.10.3 Rincian Mutasi Bagian Lancar TP/TGR per Eselon I

No	Uraian Eselon I	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Setjen	1.744.080.514	0	0	1.744.080.514
2	Ditjen TP	252.404.318	0	0	252.404.318
3	Ditjen Horti	4.969.433.488	13.578.834	346.061.128	4.636.951.194
4	Ditjen Bun	2.254.970.169	0	97.373.179	2.157.596.990
5	Ditjen PKH	271.628.322	0	32.680.052	238.948.270
6	Ditjen PSP	931.301.750	105.379.250	932.901.750	103.779.250
7	BSIP	913.254.927	0	158.000.800	755.254.127
	Jumlah	11.337.073.488	118.958.084	1.567.016.909	9.889.014.663

Berdasarkan rincian mutasi penambahan dan pengurang Bagian Lancar TP/TGR per debitur per 31 Desember 2023 dapat disajikan per Satker pada **Lampiran C.10**.

C.11 PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BADAN LAYANAN UMUM

Nilai Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp586.350.000,00 dan Rp372.661.858,00. Dari saldo Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023 berada pada lingkup Ditjen PKH pada Satker berikut ini.

- 1) Satker Pusat Veteriner Farma Surabaya sebesar Rp304.000.000,00 merupakan piutang atas penjualan vaksin;
- 2) Satker Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari sebesar Rp282.350.000,00 merupakan piutang atas kegiatan jasa layanan penjualan semen beku dan

Berikut ini rincian Piutang Badan Layanan Umum per debitur per 31 Desember 2023 dapat disajikan pada **Lampiran C.11**.

C.12 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - PIUTANG LANCAR

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp16.311.867.536,00) dan (Rp17.606.621.213,00). Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.12. Rincian Penyisihan Piutang Lancar

No	Eselon I	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Piutang Bukan Pajak					
1	Setjen	(458.583.567)	(738.888.019)	280.304.452	(37,94)
2	Itjen	0	(253.500)	253.500	(100,00)
3	Ditjen TP	(243.937.226)	(243.937.226)	0	0,00
4	Ditjen Horti	(243.120.621)	(243.442.648)	322.027	(0,13)
5	Ditjen Bun	(1.014.767.283)	(1.021.001.062)	6.233.779	(0,61)
6	Ditjen PKH	(6.517.061.890)	(6.487.445.794)	(29.616.096)	0,46
7	Ditjen PSP	0	(1.749.936)	1.749.936	(100,00)
8	BSIP	(1.666.178.084)	(1.552.730.849)	(113.447.235)	7,31

No	Eselon I	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
9	Barantan	(58.285)	(1.230.522)	1.172.237	(95,26)
Jumlah		(10.143.706.956)	(10.290.679.556)	146.972.600	(1,43)
Bagian Lancar TP/TGR					
1	Setjen	(1.744.080.514)	(1.744.080.514)	0	0,00
2	Ditjen TP	(252.404.318)	(252.404.318)	0	0,00
3	Ditjen Horti	(1.783.436.803)	(2.002.668.161)	219.231.358	(10,95)
4	Ditjen Bun	(1.961.953.608)	(2.059.326.787)	97.373.179	(4,73)
5	Ditjen PKH	(238.948.270)	(271.628.322)	32.680.052	(12,03)
6	Ditjen PSP	(7.527.925)	(931.301.750)	923.773.825	(99,19)
7	BSIP	(176.877.392)	(52.668.496)	(124.208.896)	235,83
Jumlah		(6.165.228.830)	(7.314.078.348)	1.148.849.518	(15,71)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU					
1	Ditjen PKH	(2.931.750)	(1.863.309)	(1.068.441)	57,34
Jumlah		(2.931.750)	(1.863.309)	(1.068.441)	57,34
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih		(16.311.867.536)	(17.606.621.213)	1.294.753.677	(7,35)

Rincian atas penyisihan piutang PNPB dan Bagian Lancar TP/TGR serta Piutang dari Kegiatan Operasional BLU disajikan pada **Lampiran C.12.1 C.12.2 dan C.12.3**.

C.13 PERSEDIAAN

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.147.055.866.962,00 dan Rp1.557.988.427.879,00. Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual.dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berikut ini disajikan perbandingan rincian persediaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 pada tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel C.13.1 Rincian Persediaan per Eselon I per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Eselon I	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Setjen	1.214.127.771	1.680.046.373	(465.918.602)	(27,73)
2	Itjen	436.198.223	542.477.735	(106.279.512)	(19,59)
3	Ditjen TP	18.717.959.081	50.172.599.308	(31.454.640.227)	(62,69)
4	Ditjen Horti	7.812.579.206	44.913.157.624	(37.100.578.418)	(82,61)
5	Ditjen Bun	32.410.616.407	14.171.268.616	18.239.347.791	128,71
6	Ditjen PKH	930.197.847.224	1.334.398.366.798	(404.200.519.574)	(30,29)
7	Ditjen PSP	116.397.680.714	73.917.828.260	42.479.852.454	57,47
8	BSIP	12.199.218.675	10.894.450.680	1.304.767.995	11,98
9	BPPSDMP	502.797.817	844.056.610	(341.258.793)	(40,43)
10	BKP	0	23.100.000	(23.100.000)	(100,00)
11	Barantan	27.166.841.844	26.431.075.875	735.765.969	2,78
Jumlah		1.147.055.866.962	1.557.988.427.879	(410.932.560.917)	(26,38)

Rincian jenis persediaan pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.13.2 Rincian Jenis Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Persediaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Barang Konsumsi	212.532.092.653	297.230.591.478	(84.698.498.825)	(28,50)
Bahan untuk Pemeliharaan	1.180.889.238	345.285.430	835.603.808	242,00
Suku Cadang	19.673.311.227	40.464.991.808	(20.791.680.581)	(51,38)
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	279.538.700	12.941.729.691	(12.662.190.991)	(97,84)
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	10.987.986.956	14.193.830.168	(3.205.843.212)	(22,59)
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	121.902.894.214	111.715.131.690	10.187.762.524	9,12
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.183.288.120	0	1.183.288.120	~
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	12.422.427.950	14.156.928.687	(1.734.500.737)	(12,25)
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	12.776.466.944	27.508.778.046	(14.732.311.102)	(53,55)
Bahan Baku	104.268.989.995	79.082.402.062	25.186.587.933	31,85
Persediaan Lainnya	649.847.980.965	960.348.758.819	(310.500.777.854)	(32,33)
Jumlah	1.147.055.866.962	1.557.988.427.879	(410.932.560.917)	(26,38)

Berdasarkan tabel C.13.2 diatas, dapat dilihat rincian jenis persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.147.055.866.962,00 pada **Lampiran C.13.1**.

Berikut ini disajikan rincian mutasi penambahan dan pengurang atas Persediaan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel C.13.3 Rincian Mutasi Jenis Persediaan

Uraian Persediaan	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Barang Konsumsi	297.230.591.478	18.173.531.533.750	18.258.230.032.575	212.532.092.653
Amunisi	0	96.000	96.000	0
Bahan untuk Pemeliharaan	345.285.430	3.964.963.131	3.129.359.323	1.180.889.238
Suku Cadang	40.464.991.808	8.639.185.897	29.430.866.478	19.673.311.227
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	14.080.800	14.080.800	0
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	12.941.729.691	23.199.542.847	35.861.733.838	279.538.700
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	14.193.830.168	477.951.109.997	481.156.953.209	10.987.986.956
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	111.715.131.690	1.461.903.633.525	1.451.715.871.001	121.902.894.214

Uraian Persediaan	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	152.115.500	152.115.500	0
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	351.437.340.267	350.254.052.147	1.183.288.120
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	14.156.928.687	3.072.710.347.990	3.074.444.848.727	12.422.427.950
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	27.508.778.046	1.319.131.946.866	1.333.864.257.968	12.776.466.944
Bahan Baku	79.082.402.062	248.357.830.023	223.171.242.090	104.268.989.995
Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0	31.886.461.940	31.886.461.940	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0	1.000.000	1.000.000	0
Persediaan Lainnya	960.348.758.819	433.437.083.536	743.937.861.390	649.847.980.965
Jumlah	1.557.988.427.879	25.613.292.708.748	26.024.225.269.665	1.147.055.866.962

Berdasarkan tabel C.13.3 diatas, dapat dilihat rincian mutasi jenis persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.147.055.866.962,00 pada **Lampiran C.13.2**.

Selanjutnya sebagai informasi terhadap rincian jenis persediaan yang signifikan berada pada Ditjen PKH pada akun persediaan lainnya. Berikut ini uraian persediaan lainnya per Eselon I pada tabel dibawah ini.

Tabel C.13.4 Rincian saldo akun Persediaan Lainnya per Eselon 1

No	Eselon I	Nilai
1	Setjen	456.994.650
2	Ditjen TP	158.887.259
3	Ditjen PKH	647.184.419.406
4	BSIP	1.668.239.650
5	BPPSDMP	379.440.000
	Jumlah	649.847.980.965

Berdasarkan tabel C.13.4, Persediaan Lainnya pada Kementerian Pertanian sebesar Rp649.847.980.965,00 dari nilai tersebut diantaranya yang signifikan merupakan persediaan pada Ditjen PKH berupa vaksin.

Sedangkan untuk rincian jenis persediaan yang signifikan pada barang konsumsi berada pada Ditjen PKH. Berikut ini uraian barang konsumsi per Eselon I pada tabel dibawah ini.

Tabel C.13.5 Rincian saldo akun Barang Konsumsi per Eselon 1

No	Eselon I	Nilai
1	Setjen	732.011.361
2	Itjen	435.592.223
3	Ditjen TP	296.473.175
4	Ditjen Horti	1.502.754.487
5	Ditjen Bun	22.095.775.992
6	Ditjen PKH	159.157.398.811
7	BSIP	1.036.854.003
8	BPPSDMP	108.390.757
9	Barantan	27.166.841.844
	Jumlah	212.532.092.653

Berdasarkan tabel C.13.5 diatas, terhadap rincian barang konsumsi pada Kementerian Pertanian sebesar Rp212.532.092.653,00 dari nilai tersebut diantaranya merupakan terdapat persediaan yang signifikan pada Ditjen PKH berupa Pengadaan Eartag Penandaan Ternak APBN dalam rangka kegiatan pendukung wabah PMK pada Ditjen PKH.

Berdasarkan Tabel C.13.2 di atas persediaan seluruhnya sebesar Rp1.147.055.866.962,00 diantaranya terdapat Persediaan dari Belanja 526 sebesar Rp159.552.602.884,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.13.6 Rincian saldo akun Persediaan 526 per Eselon 1

No	Eselon I	Nilai
1	Ditjen TP	17.658.848.450
2	Ditjen Horti	6.263.856.329
3	Ditjen Bun	10.314.840.415
4	Ditjen PSP	116.397.680.714
5	BSIP	8.917.376.976
	Jumlah	159.552.602.884

Rincian masing-masing persediaan MAK 526 per akun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel C.13.7 Rincian Persediaan MAK 526 per Akun

Akun	Uraian	Nilai
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah	279.538.700
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah	10.987.986.956
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah	121.902.894.214
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.183.288.120
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah	12.422.427.950
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	12.776.466.944
	JUMLAH	159.552.602.884

ASET TETAP

Nilai Buku Aset Tetap Kementerian Pertanian per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp78.030.901.881.449,00 dan Rp78.816.478.962.291,00. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel C.14 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022

No,	Eselon 1	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Tanah	71.036.443.125.565	71.600.346.406.337	(563.903.280.772)	(0,79)
2	Peralatan dan Mesin	6.622.466.201.161	6.702.567.581.322	(80.101.380.161)	(1,20)
3	Gedung dan Bangunan	6.832.953.144.759	6.613.026.927.147	219.926.217.612	3,33
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	712.722.433.678	705.569.673.197	7.152.760.481	1,01
5	Aset Tetap Lainnya	68.900.441.840	88.117.077.446	(19.216.635.606)	(21,81)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	74.324.781.149	111.938.594.334	(37.613.813.185)	(33,60)
8	Akumulasi Penyusutan	(7.316.908.246.703)	(7.005.087.297.492)	(311.820.949.211)	4,45
	Jumlah	78.030.901.881.449	78.816.478.962.291	(785.577.080.842)	(1,00)

C. 14 TANAH

Tanah yang dimiliki Kementerian Pertanian per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp71.036.443.125.565,00 dan Rp71.600.346.406.337,00. Mutasi Aset Tetap Tanah sebagai berikut.

Tabel C.14.1. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah per 31 Desember 2023

URAIAN	NILAI
Saldo Tanah 31 Desember 2022	71.600.346.406.337
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	653.361.417.000
Pembelian	341.706.200
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	122.040.001
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	31.908.212.730
Reklasifikasi Masuk	116.105.819.150
Saldo Awal	301.920.439.490
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.786.761.200
Hibah Masuk	43.304.242.113
Pengembangan Melalui KDP	1.248.188.700
Total Mutasi Tambah	1.150.098.826.584
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	660.550.067.000
Koreksi Pencatatan	2.896.422.200
Hibah Keluar	29.398.204.816
Reklasifikasi Keluar	116.051.080.000
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	350.781.995.340
Penghentian Aset Dari Penggunaan	323.175.197.000
Penghapusan	24.452.733.000
Perubahan BMN Ke Properti Investasi	206.696.408.000
Total Mutasi Kurang	1.714.002.107.356
Saldo Tanah 31 Desember 2023	71.036.443.125.565

Dari mutasi kurang Penghentian Aset dari Penggunaan terdapat pada Eselon I Badan Karantina, Satker Karantina Kelas I Denpasar berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sebesar Rp323.090.400.000,00 seluas 25.800 m².

Kronologis atas peristiwa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar selama ini meminjam pakai tanah milik Pemda Kabupaten Badung sesuai dengan bukti kepemilikan sertifikat tanah tersebut. Hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh KPKNL setempat pada tahun 2013, merekomendasikan tanah tersebut harus dicatat oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar, Kementerian Pertanian. Ternyata pada tahun 2022 Pemda Kabupaten Badung mencatat tanah tersebut pada Laporan Keuangan PEMDA.

Untuk menghindari pencatatan ganda pada Laporan Keuangan Kementerian Pertanian maka dilakukanlah Penghentian Aset dari Penggunaan, untuk selanjutnya Badan Karantina Indonesia memproses lebih lanjut tanah tersebut sesuai dengan kondisi dan peraturan yang berlaku.

Adapun rincian pencatatan belanja modal Tanah adalah sebagai berikut.

Tabel C.14.2. Rincian Pencatatan Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2023

Keterangan	Akun Belanja	Nilai
Belanja Modal Pembebasan Tanah	531112	232.145.000
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	531114	2.000.000
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	531115	398.539.100

Keterangan	Akun Belanja	Nilai
Belanja Modal Tanah	531111	2.467.760.800
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	531113	6.000.000
Total Belanja		3.106.444.900
Pembelian		341.706.200
Total di Catat		341.706.200
Selisih Kurang Catat		2.764.738.700

Pada tabel di atas, terdapat selisih kurang catat antara belanja modal Tanah dengan pencatatan pada Aset Tetap Tanah sebesar Rp2.764.738.700,00 disebabkan senilai tersebut dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.14.3. Rincian Selisih Kurang Catat Belanja Modal Tanah dengan Aset Tanah per 31 Desember 2023

Akun Belanja	Eselon 1	satker	Keterangan	Nilai
531111	01812	237970	Pengembangan KDP	(1.477.200.000)
531111	01812	499500	Pengembangan KDP	(624.066.600)
531111	01812	499500	Perolehan/Penambahan KDP	(256.933.000)
531111 Total				(2.358.199.600)
531114	01803	020072	Perolehan/Penambahan KDP	(2.000.000)
531114 Total				(2.000.000)
531115	01806	239420	Pengembangan KDP	(189.503.700)
531115	01806	239420	Perolehan/Penambahan KDP	(9.035.400)
531115	01812	237788	Pengembangan KDP	(195.940.000)
531115	01812	237788	Perolehan/Penambahan KDP	(4.060.000)
531115 Total				(398.539.100)
531113	01803	020072	Perolehan/Penambahan KDP	(6.000.000)
531113 Total				(6.000.000)
Total				(2.764.738.700)

Tabel C.14.4. Rincian Tanah berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Eselon 1	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Setjen	6.341.700.292.000	6.341.700.292.000	0	0,00
2	Ditjen TP	1.259.764.248.577	1.403.737.174.577	(143.972.926.000)	(10,26)
3	Ditjen Horti	307.675.861.000	307.675.861.000	0	0,00
4	Ditjen Bun	1.848.544.230.571	1.748.357.354.393	100.186.876.178	5,73
5	Ditjen PKH	9.430.557.865.765	9.444.458.621.665	(13.900.755.900)	(0,15)
6	Ditjen PSP	138.000.571.000	0	138.000.571.000	~
7	BSIP	42.875.152.506.066	43.201.389.036.916	(326.236.530.850)	(0,76)
8	BPPSDMP	7.432.315.289.080	7.432.315.289.080	0	0,00
9	Barantan	1.402.732.261.506	1.720.712.776.706	(317.980.515.200)	(18,48)
	Jumlah	71.036.443.125.565	71.600.346.406.337	(563.903.280.772)	(0,79)

C.15 PERALATAN DAN MESIN

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing - masing sebesar Rp6.622.466.201.161,00 dan Rp6.702.567.581.322,00.

Rincian mutasi tambah dan kurang atas aset tetap Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut.

Tabel C.15.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

URAIAN	NILAI
Saldo Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022	6.702.567.581.322
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	103.581.326.353
Pembelian	244.856.460.223
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	4.871.987.710
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	621.078.095
Reklasifikasi Masuk	16.726.182.024
Perolehan Lainnya	3.504.097.644
Saldo Awal	4.077.880.100
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	13.710.430.000
Hibah Masuk	5.476.640.346
Pengembangan Melalui KDP	74.956.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	21.716.784.111
Koreksi Manual	27.000
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	4.299.188.000
Total Mutasi Tambah	423.517.037.606
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	103.034.918.019
Koreksi Pencatatan	3.942.887.980
Hibah Keluar	27.926.596.639
Reklasifikasi Keluar	18.437.180.024
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	997.603.946
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	247.601.940.846
Penghapusan	14.637.624.396
Koreksi Manual	3.571.400
Likuidasi Keluar	67.901.926.517
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	19.134.168.000
Total Mutasi Kurang	503.618.417.767
Saldo Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023	6.622.466.201.161
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.525.493.360.270)
Nilai Buku Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023	1.096.972.840.891

Berikut ini disajikan rincian pencatatan dari realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023.

Tabel C.15.2. Rincian Pencatatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

Keterangan	Akun Belanja	Nilai
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	532111	263.876.648.862
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	532121	1.271.680.930
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	537112	5.958.949.892
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	532118	48.737.441
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	532112	79.535.000
Total Belanja		271.235.552.125
Pembelian		244.856.460.223
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)		21.716.784.111

Total di Catat		266.573.244.334
Selisih Kurang Catat		4.662.307.791

Pada tabel di atas, terdapat selisih kurang catat antara belanja modal Peralatan dan Mesin dengan pencatatan pada Modul Aset Tetap sebesar Rp4.662.307.791,00 yang disebabkan hal-hal sebagai berikut.

1. Dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp1.202.640.800,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.15.3. Rincian Selisih Kurang Catat Pencatatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan modul Aset Tetap per 31 Desember 2023

Akun Belanja	Es1	Satker	Keterangan	Nilai Keluar
532111	01809	648669	Pengembangan KDP	(214.341.000)
532111	01810	417413	Pengembangan KDP	(558.600.000)
532111	01810	417413	Perolehan/Penambahan KDP	(239.400.000)
532111	01812	649259	Perolehan/Penambahan KDP	(109.978.800)
532111 Total				(1.122.319.800)
532118	01809	648669	Pengembangan KDP	(5.365.000)
532118 Total				(5.365.000)
532121	01812	237970	Pengembangan KDP	(57.040.000)
532121	01812	237970	Perolehan/Penambahan KDP	(17.916.000)
532121 Total				(74.956.000)
Total				(1.202.640.800)

2. Dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dicatat pada Barang ekstrakomptabel sebesar Rp3.400.186.205,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.15.4. Rincian Selisih Kurang Catat pada Barang Ekstrakomptabel per 31 Desember 2023

Akun Belanja	Eselon1	Satker	Jenis Aset	Akun Akrua	Nilai
532111	01801	451005	EKSTRA	Peralatan dan Mesin	(1.858.000)
532111	01804	625875	EKSTRA	Peralatan dan Mesin	(10.275.000)
532111	01805	567408	EKSTRA	Peralatan dan Mesin	(3.225.148.000)
532111	01805	567717	EKSTRA	Peralatan dan Mesin	(43.226.730)
532111	01806	239519	EKSTRA	Peralatan dan Mesin	(16.665.000)
532111	01806	411956	EKSTRA	Peralatan dan Mesin	(480.000)
532111	01808	633656	EKSTRA	Peralatan dan Mesin	(3.474.000)
532111	01809	237572	EKSTRA	Peralatan dan Mesin	(1.998.000)
532111	01809	567460	EKSTRA	Peralatan dan Mesin	(1.046.175)
532111	01810	412069	EKSTRA	Peralatan dan Mesin	(16.800.000)
532111	01812	649259	EKSTRA	Peralatan dan Mesin	(1.498.500)

Akun Belanja	Eselon1	Satker	Jenis Aset	Akun Akrua	Nilai
532111	01812	649441	EKSTRA	Peralatan dan Mesin	(50.000.000)
532111 Total					(3.372.469.405)
532118	01809	648669	EKSTRA	Peralatan dan Mesin	(2.320.000)
532118 Total					(2.320.000)
537112	01806	411956	EKSTRA	Peralatan dan Mesin	(4.972.800)
537112	01806	411956	EKSTRA	Gedung Bangunan	(20.424.000)
537112 Total					(25.396.800)
Total					(3.400.186.205)

3. Terdapat pengembalian belanja dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.868.241,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.15.5. Rincian Pengembalian belanja dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

Satker	Akun	Pengembalian Belanja
238247	532111	999
238251	532111	60.000
239661	532111	5.056.800
237725	532111	3.662.000
528860	532111	4.088.442
Total		12.868.241

4. Terdapat kesalahan pencatatan Peralatan dan Mesin bukan berasal dari belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp275.090.000,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel C.15.6. Rincian kesalahan Pencatatan bukan dari belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dicatat pada Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

AKUN BELANJA	ESELON 1	SATKER	NILAI
526112	01803	269110	132.740.000
526112	01810	412005	75.850.000
526112 Total			208.590.000
536111	01810	237814	11.000.000
536111	01810	412069	55.500.000
536111 Total			66.500.000
Total			275.090.000

5. Kesalahan pencatatan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dicatat bukan pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp347.439.027,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.15.7. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dicatat bukan pada Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

Akun Belanja	Eselon 1	satker	Akun Aset	Nilai Masuk
532111	01801	418328	134113	(126.000.000)
532111	01803	010082	162151	(70.300.000)
532111	01805	567521	163139	(122.191.027)

Akun Belanja	Eselon 1	satker	Akun Aset	Nilai Masuk
532111	01804	625875	135121	(1.500.000)
532111	01808	633656	135121	(2.448.000)
532111 Total				(322.439.027)
532121	01812	526462	135111	(25.000.000)
532121 Total				(25.000.000)
Total				(347.439.027)

Adapun rincian saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel C.15.8 Rincian Peralatan dan Mesin berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2023 dan 2022

No,	Eselon 1	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Setjen	528.960.674.466	537.719.654.956	(8.758.980.490)	(1,63)
2	Itjen	41.739.519.608	40.144.672.434	1.594.847.174	3,97
3	Ditjen TP	431.949.687.589	542.420.355.088	(110.470.667.499)	(20,37)
4	Ditjen Horti	103.568.051.864	125.434.652.174	(21.866.600.310)	(17,43)
5	Ditjen Bun	486.368.179.934	444.620.396.320	41.747.783.614	9,39
6	Ditjen PKH	1.374.131.817.233	1.300.616.055.893	73.515.761.340	5,65
7	Ditjen PSP	136.635.563.271	143.086.253.327	(6.450.690.056)	(4,51)
8	BSIP	1.502.142.924.379	1.512.956.538.089	(10.813.613.710)	(0,71)
9	BPPSDMP	688.413.318.555	684.555.790.625	3.857.527.930	0,56
10	BKP	0	67.901.926.517	(67.901.926.517)	(100,00)
11	Barantan	1.328.556.464.262	1.303.111.285.899	25.445.178.363	1,95
	Jumlah	6.622.466.201.161	6.702.567.581.322	(80.101.380.161)	(1,20)

C.16 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.832.953.144.759,00 dan Rp6.613.026.927.147,00.

Rincian mutasi tambah dan kurang atas aset tetap Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

Tabel C.16.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung Bangunan per 31 Desember 2023

URAIAN	NILAI
Saldo Gedung Bangunan 31 Desember 2022	6.613.026.927.147
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	92.120.020.149
Pembelian	7.501.931.733
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	7.646.151.330
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	16.014.072.443
Reklasifikasi Masuk	49.072.227.197
Perolehan Lainnya	3.953.102.090
Saldo Awal	24.854.929.840
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	109.114.128.192
Hibah Masuk	13.803.476.153
Pengembangan Melalui KDP	77.893.934.841
Penyelesaian Pembangunan Langsung	1.052.998.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	10.454.857.937

Koreksi Susulan	3.688.010.549
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	4.574.989.681
Perubahan PI ke BMN	4.307.690.250
Total Mutasi Tambah	426.052.520.385
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	63.188.383.395
Koreksi Pencatatan	38.870.812.626
Hibah Keluar	17.277.572.230
Reklasifikasi Keluar	49.988.414.197
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	2.416.072.523
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	24.226.248.362
Penghapusan	216.174.000
Koreksi Susulan	1.161.641.907
Likuidasi Keluar	261.660.000
Perubahan BMN Ke Properti Investasi	8.519.323.533
Total Mutasi Kurang	206.126.302.773
Saldo Gedung Bangunan 31 Desember 2023	6.832.953.144.759
Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan 31 Desember 2023	(1.436.405.035.005)
Nilai Buku Gedung Bangunan 31 Desember 2023	5.396.548.109.754

Berikut ini disajikan rincian pencatatan dari realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023.

Tabel C.16.2. Rincian Pencatatan Belanja Modal Gedung Bangunan per 31 Desember 2023

Keterangan	Akun Belanja	Nilai
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	533115	5.797.172.659
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	533121	50.082.351.023
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	533111	147.801.644.190
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	537113	5.077.503.807
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	533113	13.910.000
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	533118	36.733.000
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	533112	7.416.950
Total Belanja		208.816.731.629
Pembelian		7.501.931.733
Penyelesaian Pembangunan Langsung		1.052.998.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)		10.454.857.937
Total di Catat		19.009.787.670
Selisih Kurang Catat		189.806.943.959

Pada tabel di atas, terdapat selisih kurang catat antara belanja modal Gedung dan Bangunan dengan pencatatan yang dicatat pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp189.806.943.959,00 yang disebabkan hal-hal sebagai berikut.

1. Terdapat belanja modal Gedung Bangunan yang dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp165.715.057.318,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.16.3. Rincian Belanja Modal Gedung Bangunan dicatat sebagai KDP per 31 Desember 2023

Akun Belanja	Eselon 1	Keterangan	Nilai Masuk
533111	01805	Pengembangan KDP	(17.242.866.717)
533111	01805	Perolehan/Penambahan KDP	(6.791.493.680)
533111	01806	Pengembangan KDP	(36.592.213.560)
533111	01806	Perolehan/Penambahan KDP	(34.800.318.983)
533111	01809	Pengembangan KDP	(7.534.479.515)

Akun Belanja	Eselon 1	Keterangan	Nilai Masuk
533111	01809	Perolehan/Penambahan KDP	(471.263.000)
533111	01810	Pengembangan KDP	(3.297.374.000)
533111	01810	Perolehan/Penambahan KDP	(165.000.000)
533111	01812	Perolehan/Penambahan KDP	(67.200.000)
533111	01812	Pengembangan KDP	(7.115.084.652)
533111	01812	Perolehan/Penambahan KDP	(1.002.987.259)
533111 Total			(115.080.281.366)
533112	01809	Pengembangan KDP	(7.416.950)
533112 Total			(7.416.950)
533113	01809	Pengembangan KDP	(13.910.000)
533113 Total			(13.910.000)
533115	01805	Pengembangan KDP	(840.247.800)
533115	01806	Pengembangan KDP	(1.356.145.960)
533115	01806	Perolehan/Penambahan KDP	(846.316.240)
533115	01809	Pengembangan KDP	(661.620.845)
533115	01809	Perolehan/Penambahan KDP	(209.268.500)
533115	01810	Pengembangan KDP	(708.740.960)
533115	01810	Perolehan/Penambahan KDP	(325.541.500)
533115 Total			(4.947.881.805)
533118	01809	Pengembangan KDP	(36.623.000)
533118	01809	Perolehan/Penambahan KDP	(110.000)
533118	01812	Pengembangan KDP	(14.952.402)
533118 Total			(51.685.402)
533121	01805	Perolehan/Penambahan KDP	(185.312.613)
533121	01805	Perolehan/Penambahan KDP	(449.601.457)
533121	01806	Pengembangan KDP	(1.504.123.900)
533121	01806	Perolehan/Penambahan KDP	(676.949.100)
533121	01809	Pengembangan KDP	(10.898.929.955)
533121	01809	Perolehan/Penambahan KDP	(1.627.695.943)
533121	01810	Pengembangan KDP	(7.986.725.000)
533121	01810	Perolehan/Penambahan KDP	(177.075.000)
533121	01812	Pengembangan KDP	(17.080.470.697)
533121	01812	Perolehan/Penambahan KDP	(1.809.169.723)
533121	01812	Perolehan/Penambahan KDP	(22.625.000)
533121 Total			(42.418.678.388)
537113	01806	Pengembangan KDP	(3.136.062.607)
537113	01806	Perolehan/Penambahan KDP	(59.140.800)
537113 Total			(3.195.203.407)
Total			(165.715.057.318)

2. Terdapat belanja modal Gedung Bangunan yang dicatat sebagai Ekstrakomtabel sebesar Rp145.745.200,00.

Tabel C.16.4. Rincian Belanja Modal Gedung Bangunan dicatat sebagai Ekstrakomtabel per 31 Desember 2023

Akun Belanja	Eselon 1	Satker	Akun Aset	Nilai Keluar
533111	01804	625875	133111	(24.295.000)
533111	01810	417405	133111	(2.768.100)
533111	01812	649441	133111	(6.000.000)

Akun Belanja	Eselon 1	Satker	Akun Aset	Nilai Keluar
533111				(33.063.100)
Total				
533121	01812	393012	133111	(8.400.000)
533121	01812	393012	133111	(35.390.000)
533121	01812	499465	133111	(37.384.800)
533121	01812	567371	133111	(7.770.000)
533121	01812	649291	133111	(13.374.300)
533121	01812	649441	133111	(19.363.000)
533121				(121.682.100)
Total				(154.745.200)

3. Kesalahan pencatatan dari belanja modal Gedung Bangunan yang dicatat sebagai bukan Gedung Bangunan sebesar Rp597.785.015,00.

Tabel C.16.5. Rincian Kesalahan Pencatatan GB dicatat bukan sebagai Gedung Bangunan per 31 Desember 2023

Akun Belanja	Eselon 1	Satker	Akun Aset	Nilai
533111	01801	649195	134112	(42.275.904)
533111	01806	239413	134112	(90.000.000)
533111				(132.275.904)
Total				
533115	01809	634015	134111	(17.504.700)
533115				(17.504.700)
Total				
533121	01801	451005	135111	(448.004.411)
533121				(448.004.411)
Total				(597.785.015)

4. Kesalahan pencatatan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dicatat sebagai Gedung Bangunan pada Eselon 1 Ditjen Hortikultura Satker Pusat Sebesar Rp122.191.027,00.
5. Terdapat Belanja Modal Gedung Bangunan yang di Catat sebagai Dana di Rekening Penampungan (Kementerian/Lembaga sebesar Rp11.340.000,00).

Tabel C.16.6. Rincian Belanja Modal Gedung Bangunan dicatat sebagai Dana Di Rekening Penampungan

Eselon 1	Satker	Nilai
01806	239455	577.581.180
01806	567282	22.138.608.338
01809	411971	11.340.000
01809	412007	209.114.129
01809	567673	618.779.500
Total		23.555.423.147

6. Terdapat pengembalian belanja modal Gedung Bangunan sebanyak 8 Satker dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.16.7. Rincian Pengembalian Belanja Modal Gedung Bangunan per 31 Desember 2023

Eselon 1	Kode Satker	Akun Belanja	Nilai Pengembalian
01804	625875	533111	11.841.586

Eselon 1	Kode Satker	Akun Belanja	Nilai Pengembalian
01812	237860	533111	6.965.900
01812	499465	533111	646.161
01812	649437	533111	2.228.797
01810	239661	533115	10.000.000
01810	239661	533121	5.029.000
01812	237800	533121	22.596.400
01812	237800	533121	3.487.850
Total			62.795.694

Adapun rincian saldo Gedung dan Bangunan berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel C.16.8 Rincian Gedung dan Bangunan per Eselon I per 31 Desember 2023 dan 2022

No,	Eselon 1	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Setjen	873.680.783.784	868.582.952.742	5.097.831.042	0,59
2	Itjen	329.071.000	329.071.000	0	0,00
3	Ditjen TP	200.771.665.145	211.838.054.712	(11.066.389.567)	(5,22)
4	Ditjen Horti	120.521.908.440	119.680.273.170	841.635.270	0,70
5	Ditjen Bun	433.631.754.928	369.326.072.247	64.305.682.681	17,41
6	Ditjen PKH	854.260.333.576	797.413.105.249	56.847.228.327	7,13
7	Ditjen PSP	9.600.461.068	2.033.736.930	7.566.724.138	372,06
8	BSIP	2.033.683.425.673	2.017.563.723.496	16.119.702.177	0,80
9	BPPSDMP	1.110.533.215.529	1.054.148.364.266	56.384.851.263	5,35
10	BKP	0	261.660.000	(261.660.000)	(100,00)
11	Barantan	1.195.940.525.616	1.171.849.913.335	24.090.612.281	2,06
	Jumlah	6.832.953.144.759	6.613.026.927.147	219.926.217.612	3,33

C.17 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp712.722.433.678,00 dan Rp705.569.673.197,00.

Rincian mutasi tambah dan kurang atas aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut.

Tabel C.17.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023

URAIAN	NILAI
Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2022	705.569.673.197
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	17.777.401.485
Pembelian	1.281.435.944
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	950.667.694
Reklasifikasi Masuk	3.136.749.833
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	2.696.480.400
Pengembangan Melalui KDP	2.285.479.700
Penyelesaian Pembangunan Langsung	639.258.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	972.240.380
Koreksi Susulan	81.723.000
Total Mutasi Tambah	29.821.436.436
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	17.777.401.485
Koreksi Pencatatan	231.884.700
Hibah Keluar	34.175.000
Reklasifikasi Keluar	300.314.833
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	536

Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	3.589.260.901
Penghapusan	735.638.500
Total Mutasi Kurang	22.668.675.955
Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2023	712.722.433.678
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	(351.269.707.349)
Nilai Buku 31 Desember 2023	361.452.726.329

Berikut ini disajikan rincian pencatatan dari belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tabel dibawah ini:

Tabel C.17.2. Rincian Pencatatan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023

Keterangan	Akun Belanja	Nilai
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	534141	1.760.511.000
Belanja Modal Irigasi	534121	252.994.840
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	534111	2.906.133.620
Belanja Modal Jaringan	534131	838.506.000
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	534115	123.356.760
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	534161	346.916.300
Total Belanja		6.228.418.520
Pembelian		1.281.435.944
Penyelesaian Pembangunan Langsung		639.258.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)		972.240.380
Total di Catat		2.892.934.324
Selisih Kurang Catat		(3.335.484.196)

Pada tabel di atas, terdapat selisih kurang catat antara belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan dengan pencatatan yang dicatat pada Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar (Rp3.335.484.196,00) yang disebabkan hal - hal sebagai berikut.

1. Terdapat Belanja Jalan Jaringan dan Jembatan yang dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar (Rp3.563.786.740,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.17.3. Rincian Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan dicatat sebagai KDP per 31 Desember 2023

Akun Belanja	Eselon 1	Satker	Keterangan	Nilai
534111	01806	238823	Pengembangan KDP	(9.950.000)
534111	01806	238823	Perolehan/Penambahan KDP	(189.050.000)
534111	01806	239441	Pengembangan KDP	(9.967.800)
534111	01806	239441	Perolehan/Penambahan KDP	(189.388.200)
534111	01812	237860	Pengembangan KDP	(233.398.000)
534111	01812	237860	Perolehan/Penambahan KDP	(19.675.000)
534111	01812	237910	Pengembangan KDP	(212.342.400)
534111	01812	237910	Perolehan/Penambahan KDP	(4.360.000)
534111	01812	238205	Pengembangan KDP	(1.111.900.000)
534111	01812	238205	Perolehan/Penambahan KDP	(99.500.000)
534111	01812	526615	Pengembangan KDP	(219.012.500)
534111	01812	526615	Perolehan/Penambahan KDP	(18.487.500)
534111 Total				(2.317.031.400)
534115	01806	239455	Pengembangan KDP	(54.593.340)
534115 Total				(54.593.340)

Akun Belanja	Eselon 1	Satker	Keterangan	Nilai
534131	01805	567338	Perolehan/Penambahan KDP	(35.000.000)
534131	01812	526615	Pengembangan KDP	(2.000.000)
534131	01812	526615	Perolehan/Penambahan KDP	(38.000.000)
534131	01812	649458	Pengembangan KDP	(6.332.450)
534131	01812	649458	Perolehan/Penambahan KDP	(120.316.550)
534131 Total				(201.649.000)
534141	01806	238823	Pengembangan KDP	(9.925.000)
534141	01806	238823	Perolehan/Penambahan KDP	(188.575.000)
534141	01806	239413	Perolehan/Penambahan KDP	(200.000.000)
534141	01806	239455	Pengembangan KDP	(217.197.150)
534141	01806	239455	Perolehan/Penambahan KDP	(374.815.850)
534141 Total				(990.513.000)
Total				(3.563.786.740)

2. Kesalahan pencatatan Jalan, Jaringan dan Jembatan yang dicatat bukan dari belanja Jalan Jaringan dan Jembatan sebesar Rp288.249.264,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.17.4. Rincian Kesalahan Pencatatan Jalan Irigasi dan Jaringan bukan dari Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023

Akun Belanja	Eselon 1	Satker	Nilai
532111	01801	418328	126.000.000
532111 Total			126.000.000
533111	01801	649195	42.275.904
533111	01806	239413	90.000.000
533111 Total			132.275.904
533115	01806	239455	29.973.360
533115 Total			29.973.360
Total			288.249.264

Adapun rincian saldo Jalan Irigasi dan Jaringan berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel C.17.5 Rincian Jalan. Irigasi dan Jaringan berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Eselon 1	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Setjen	22.535.033.013	22.492.757.109	42.275.904	0,19
2	Itjen	164.500.000	164.500.000	0	0,00
3	Ditjen TP	7.825.163.162	7.836.695.072	(11.531.910)	(0,15)
4	Ditjen Horti	6.982.215.729	8.482.820.264	(1.500.604.535)	(17,69)
5	Ditjen Bun	16.800.226.053	16.614.841.053	185.385.000	1,12
6	Ditjen PKH	165.381.935.788	165.242.437.204	139.498.584	0,08
7	Ditjen PSP	71.454.000	71.454.000	0	0,00
8	BSIP	301.709.108.141	297.899.253.603	3.809.854.538	1,28
9	BPPSDMP	89.945.211.012	88.348.326.012	1.596.885.000	1,81
10	Barantan	101.307.586.780	98.416.588.880	2.890.997.900	2,94
	Jumlah	712.722.433.678	705.569.673.197	7.152.760.481	1,01

C.18 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp68.900.441.840,00 dan Rp88.117.077.446,00.

Rincian mutasi tambah dan kurang atas aset tetap lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel C.18.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023

URAIAN	NILAI
Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2022	88.117.077.446
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	54.739.150
Pembelian	2.457.972.243
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	25.805.000
Perolehan Lainnya	1.664.704.180
Saldo Awal	25.000.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	25.000.000
Pembelian Aset Tetap Renovasi	83.186.811
Total Mutasi Tambah	4.336.407.384
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	6.748.601.831
Koreksi Pencatatan	498.004.411
Hibah Keluar	39.480.000
Reklasifikasi Keluar	263.989.150
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	8.636.788
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	15.956.604.685
Penghapusan	36.226.125
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	1.500.000
Total Mutasi Kurang	23.553.042.990
Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2023	68.900.441.840
Akumulasi Penyusutan Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2023	(3.740.144.079)
Nilai Buku Per Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2023	65.160.297.761

Berikut ini disajikan rincian pencatatan Aset Tetap Lainnya terhadap belanja modal Aset Tetap Lainnya disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel C.18.2. Rincian Pencatatan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023

Keterangan	Akun Belanja	Nilai
Belanja Modal Lainnya	536111	3.659.099.019
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	536121	229.009.441
Total Belanja		3.888.108.460
Pembelian		2.457.972.243
Pembelian Aset Tetap Renovasi		83.186.811
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)		25.000.000
Total di Catat		2.566.159.054
Selisih Kurang Catat		(1.321.949.406)

Dari tabel di atas terdapat selisih kurang catat antara belanja modal Aset Tetap Lainnya dengan pencatatan yang dicatat pada Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.321.949.406,00 yang disebabkan hal-hal sebagai berikut.

1. Terdapat Belanja Modal Lainnya yang dicatat bukan dari Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp1.500.556.566,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.18.3. Rincian Belanja Modal Lainnya dicatat bukan dari Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023

Akun Belanja	Eselon 1	Satker	Akun Akruai	Nilai
536111	01801	451005	162151	(98.443.125)
536111	01803	020072	162191	(197.550.000)
536111	01804	625875	162151	(50.000.000)
536111	01804	625875	162151	(49.500.000)
536111	01806	238776	162151	(146.500.000)
536111	01806	567282	162191	(5.000.000)
536111	01808	633656	162151	(197.054.000)
536111	01808	633656	162151	(198.000.000)
536111	01810	237814	132111	(11.000.000)
536111	01810	412069	132111	(79.500.000)
536111	01810	412069	162151	(164.000.000)
536111	01810	412069	162191	(50.000.000)
536111	01810	412081	162191	(25.000.000)
536111 Total				(1.271.547.125)
536121	01802	238247	162151	(229.009.441)
536121 Total				(229.009.441)
Total				(1.500.556.566)

2. Terdapat Belanja Modal Lainnya yang dicatat sebagai Ekstrakomtabel pada Eselon 1 BPSDMP satker Polbangtan Bogor sebesar Rp93.500.000,00.
3. Terdapat Koreksi SPM sebesar (Rp204.845.251,00) terdapat di Eselon1 Ditjen TP pada Satker Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura DKI Jakarta sebesar (Rp41.070.000,00) dan Eselon1 BPSDMP pada Satker Sekretariat SDMP sebesar (Rp163.775.251,00).
4. Kesalahan pencatatan Pencatatan Aset Tetap Lainnya bukan dari belanja Modal Lainnya sebesar Rp476.952.411,00.

Tabel C.18.4. Rincian Pencatatan Aset Tetap Lainnya bukan dari Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023

Akun Belanja	Eselon 1	Satker	Akun Akruai	Nilai
532111	01804	625875	135121	1.500.000
532111	01808	633656	135121	2.448.000
532111 Total				3.948.000
532121	01812	526462	135111	25.000.000
532121 Total				25.000.000
533121	01801	451005	135111	364.817.600
533121	01801	451005	135111	83.186.811
533121 Total				448.004.411
Total				476.952.411

Adapun rincian saldo Aset Tetap Lainnya berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel C.18.5 Rincian Aset Tetap Lainnya per Eselon I per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Eselon 1	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Setjen	7.887.638.871	9.872.841.871	(1.985.203.000)	(20,11)

No.	Eselon 1	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / Penurunan	%
2	Itjen	107.231.970	107.231.970	0	0,00
3	Ditjen TP	2.893.357.950	5.464.606.150	(2.571.248.200)	(47,05)
4	Ditjen Horti	52.169.850	93.449.850	(41.280.000)	(44,17)
5	Ditjen Bun	9.393.178.112	23.607.333.345	(14.214.155.233)	(60,21)
6	Ditjen PKH	12.347.745.802	12.922.253.119	(574.507.317)	(4,45)
7	Ditjen PSP	1.615.951.567	333.240.000	1.282.711.567	384,92
8	BSIP	11.283.239.779	11.606.129.503	(322.889.724)	(2,78)
9	BPPSDMP	22.664.017.543	22.357.185.802	306.831.741	1,37
10	Barantan	655.910.396	1.098.235.236	(442.324.840)	(40,28)
	Jumlah	68.900.441.840	88.117.077.446	(19.216.635.606)	(21,81)

Berdasarkan tabel C.18.5 di atas, dari total Aset Tetap Lainnya sebesar Rp68.900.441.840,00 terdiri dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp32.452.166.274,00 dan Aset Tetap Renovasi sebesar Rp36.448.275.566,00. Adapun rincian jenis Aset Tetap Renovasi dapat disajikan per eselon I disajikan pada **Lampiran C.18**.

C.19 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp74.324.781.149,00 dan Rp111.938.594.334,00.

Rincian mutasi tambah dan kurang atas aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut.

Tabel C.19.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023

URAIAN	NILAI
Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2022	111.938.594.334
Mutasi Tambah	
Perolehan/Penambahan KDP	51.945.439.348
Pengembangan KDP	121.814.663.460
Perolehan Lainnya KDP	1.386.899.714
Reklasifikasi Masuk KDP	1.469.791.818
Koreksi Nilai KDP Bertambah	2.084.966.557
Total Mutasi Tambah	178.701.760.897
Mutasi Kurang	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	127.312.887.792
Pengembangan Melalui KDP	81.502.559.241
Koreksi Pencatatan KDP	813.174.120
Penghapusan/Penghentian KDP	5.154.717.793
Reklasifikasi Keluar KDP	1.469.791.818
Koreksi Nilai KDP Berkurang	62.443.318
Total Mutasi Kurang	216.315.574.082
Nilai Buku Per Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2023	74.324.781.149

Rincian mutasi tambah dan kurang atas aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per Kelompok Barang adalah sebagai berikut.

Tabel C.19.2 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

URAIAN	SALDO 1 JANUARI 2023	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Tanah Dalam Pengerjaan	160.650.000	3.383.745.513	3.544.395.513	0

URAIAN	SALDO 1 JANUARI 2023	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	12.524.989.308	1.687.266.000	14.209.350.308	2.905.000
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	92.027.259.929	169.636.364.284	193.557.243.161	68.106.381.052
Jalan Dalam Pengerjaan	5.987.977.097	3.414.736.100	3.414.736.100	5.987.977.097
Irigasi Dalam Pengerjaan	1.237.718.000	378.000.000	1.423.200.000	192.518.000
Jaringan Dalam Pengerjaan	0	201.649.000	166.649.000	35.000.000
	111.938.594.334	178.701.760.897	216.315.574.082	74.324.781.149

Adapun rincian saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel C.19.3. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Eselon I per 31 Desember 2023 dan 2022

No,	Eselon 1	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Ditjen Bun	1.719.841.857	39.693.813.259	(37.973.971.402)	(95,67)
2	Ditjen PKH	67.168.559.243	49.888.452.685	17.280.106.558	34,64
3	BSIP	4.332.570.451	8.144.672.389	(3.812.101.938)	(46,80)
4	BPPSDMP	77.200.000	1.142.398.000	(1.065.198.000)	(93,24)
5	Barantan	1.026.609.598	13.069.258.001	(12.042.648.403)	(92,14)
	Jumlah	74.324.781.149	111.938.594.334	(37.613.813.185)	(33,60)

Berdasarkan tabel C.19.3, berikut ini disajikan rincian Kontruksi Dalam Pengerjaan per eselon I disajikan pada **Lampiran C.19**.

C.20 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Kementerian Pertanian per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.316.908.246.703,00 dan Rp7.005.087.297.492,00

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel C.20 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Eselon 1	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Tanah	71.036.443.125.565		71.036.443.125.565
2	Peralatan dan Mesin	6.622.466.201.161	5.525.493.360.270	1.096.972.840.891
3	Gedung dan Bangunan	6.832.953.144.759	1.436.405.035.005	5.396.548.109.754
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	712.722.433.678	351.269.707.349	361.452.726.329
5	Aset Tetap Lainnya	68.900.441.840	3.740.144.079	65.160.297.761
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	74.324.781.149		74.324.781.149
	Jumlah	85.347.810.128.152	7.316.908.246.703	78.030.901.881.449

C. 21 PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai

(oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Berdasarkan hasil identifikasi, tanah dan/atau bangunan yang memenuhi kriteria properti investasi terdapat pada 3 Eselon I yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Hortikultura dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Berikut ini adalah daftar tanah dan/atau bangunan yang memenuhi kriteria properti investasi:

Berikut ini disajikan daftar usulan Tanah dan Bangunan Kriteria Properti Investasi sebagai berikut.

Tabel C.21.1 Daftar Usulan Tanah dan Bangunan Kriteria Properti Investasi

Gedung dan Bangunan					
No	Satuan Kerja	Nama Barang	NUP	Luas	Nilai Perolehan
Sekretariat Jenderal					
1	Biro Umum dan Pengadaan	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1	1.887	4.075.803.500
2	Biro Umum dan Pengadaan	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2	50	231.886.750
Ditjen Hortikultura					
1	Direktorat Jenderal Hortikultura	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	384	2.153.825.283
Total					2.153.825.283
Ditjen Hortikultura					
1	Direktorat Jenderal Hortikultura	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	384	2.153.825.283
Total					2.153.825.283
BSIP					
1	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	15	192	392.668.000
2	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	235	621.509.000
3	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1	77	311.368.000
4	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	3	340	732.263.000
Total					2.057.808.000
Tanah					
No	Satuan Kerja	Nama Barang	NUP	Luas	Nilai Perolehan
BSIP					
1	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	Tanah Sawah Irigasi	2	33.780	33.533.406.000
2	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	Tanah Sawah Irigasi	5	100.940	89.982.963.000
3	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	Tanah Sawah Irigasi	7	78.940	72.182.736.000
4	BBPSI VETERINER	Tanah Persil Lainnya	2	1.980	4.358.650.000
5	BBPSI VETERINER	Tanah Persil Lainnya	4	346	522.507.000
6	BBPSI VETERINER	Tanah Persil Lainnya	5	274	413.778.000
7	BBPSI VETERINER	Tanah Persil Lainnya	6	281	424.349.000

8	BBPSI VETERINER	Tanah Persil Lainnya	7	384	579.893.000
9	BBPSI VETERINER	Tanah Persil Lainnya	8	313	472.673.000
10	BBPSI VETERINER	Tanah Persil Lainnya	10	281	394.740.000
11	BBPSI VETERINER	Tanah Persil Lainnya	11	96	131.555.000
12	BBPSI VETERINER	Tanah Persil Lainnya	12	65	93.772.000
13	BBPSI VETERINER	Tanah Persil Lainnya	13	168	242.364.000
14	BBPSI VETERINER	Tanah Persil Lainnya	14	331	499.855.000
15	BBPSI VETERINER	Tanah Persil Lainnya	15	101	145.707.000
16	BBPSI VETERINER	Tanah Persil Lainnya	16	90	147.543.000
17	BBPSI VETERINER	Tanah Persil Lainnya	17	147	240.987.000
18	BBPSI VETERINER	Tanah Persil Lainnya	18	186	304.923.000
19	BBPSI VETERINER	Tanah Persil Lainnya	19	154	222.167.000
20	BBPSI VETERINER	Tanah Persil Lainnya	20	151	217.840.000
21	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN SEREALIA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	10.000	1.584.000.000
Total					206.696.408.000

- (1) Pada Sekretariat Jenderal terdapat 2 NUP tanah dan/atau bangunan yang masuk kriteria properti investasi, yang tercatat pada Biro Umum dan Pengadaan. Gedung Pertokoan / Koperasi / Pasar Permanen nup 1 pemanfaatannya saat ini disewakan kepada beberapa pihak ketiga, dan untuk Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen nup 2 saat ini disewakan seluruhnya.
- (2) Pada Direktorat Jenderal Hortikultura terdapat Bangunan Gedung Kantor Permanen nup 3 yang 81.65% luasannya disewakan. Bangunan tersebut terdapat di Jl. Ragunan No.19.
- (3) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian memiliki 20 nup Tanah dan/atau bangunan yang mempunyai kriteria properti investasi. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah pada BPSIT Serealia disewa seluruhnya oleh koperasi. Bangunan Gedung Kantor Permanen pada BPSI Tanaman Industri dan Penyegar dimanfaatkan dengan cara disewa seluruhnya oleh koperasi. Tanah Sawah Irigasi pada BBPSI Padi yang beralamat di Jln. Raya Cigadung No. 112 – Kuningan disewa oleh Koperasi Rukun Usaha - Kuningan untuk produksi benih seluas 92.6 % dari luas keseluruhan. Tanah persil lainnya sebanyak 17 NUP pada BBPSI Veteriner seluruhnya disewa oleh pihak ketiga.

Setelah dilakukan identifikasi atas Aset Tetap yang memenuhi kriteria Properti Investasi, pada TA 2023 sudah dilakukan reklasifikasi menjadi Properti Investasi pada Eselon I Direktorat Hortikultura dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Untuk Eselon I Sekretariat Jenderal belum dilakukan reklasifikasi menjadi Properti Investasi karena belum didukung oleh dokumen pendukung berupa Perjanjian kerjasama antara Satker dengan Pihak Ketiga, dan Persetujuan Tarif PNPB dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat.

Saldo Properti Investasi yang dimiliki Kementerian Pertanian per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp210.908.041.283,00 dan Rp0,00.

Rincian per unit Eselon I atas Properti Investasi sebagai berikut:

Tabel C.21.2 Properti Investasi per Eselon I per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Ditjen Horti	2.153.825.283	0	2.153.825.283	~
2	BSIP	208.754.216.000	0	208.754.216.000	~
	Jumlah	210.908.041.283	0	210.908.041.283	~

Berdasarkan tabel C.21, berikut ini disajikan rincian Properti Investasi per jenis nama barang Gedung dan Bangunan per eselon I disajikan pada **Lampiran C.21**.

C. 22 AKUMULASI PENYUSUTAN PROPERTI INVESTASI

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Invetasi yang dimiliki Kementerian Pertanian per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp724.423.597,00 dan Rp0,00.

Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per Eselon I per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel C.22.1. Akumulasi Properti Investasi per Eselon I per 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Ditjen Horti	401.241.984	0	401.241.984	~
2	BSIP	323.181.613	0	323.181.613	~
	Jumlah	724.423.597	0	724.423.597	~

Berikut ini disajikan, rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per Akun per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel C.22.2 Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Per Akun Aset Tetap

No	Eselon 1	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Tanah	206.696.408.000	0	206.696.408.000
2	Gedung dan Bangunan	4.211.633.283	724.423.597	3.487.209.686
	Jumlah	210.908.041.283	724.423.597	210.183.617.686

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Akuntansi nomor 09 Revisi ke-2 tentang Akuntansi Barang Milik Negara Yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi Pada Kementerian/Lembaga halaman 22-23 dinyatakan bahwa pencatatan reklasifikasi BMN yang memenuhi karakteristik Properti Investasi masa transisi harus sesuai ketentuan, yaitu:

Aset Tetap yang diubah (*reklasifikasi*) menjadi Properti Investasi saat ditransaksikan pada periode 14 (koreksi setelah LK *Unaudited*) pada aplikasi SAKTI secara otomatis nilai aset tetap maupun akumulasi penyusutannya berpindah menjadi akun Properti Investasi dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi. Namun, Beban Penyusutan Properti Investasi tidak berpindah dalam arti tetap berada pada Beban Penyusutan Aset Tetap karena transaksi penyusutan pada aplikasi SAKTI secara otomatis hanya dilaksanakan pada periode 6 (Semester I) dan 12 (Semester II) yang merupakan kelemahan sistem dari aplikasi SAKTI.

PIUTANG JANGKA PANJANG**C.23 TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (TP/TGR)**

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.125.449.950,00 dan Rp12.190.727.812,00. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tabel C.23. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Eselon I

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Ditjen TP	4.003.005.410	11.963.678.512	(7.960.673.102)	(66,54)
2	Ditjen Bun	170.096.414	155.956.300	14.140.114	9,07
3	Ditjen PSP	871.301.750	0	871.301.750	~
4	BSIP	81.046.376	71.093.000	9.953.376	14,00
	Jumlah	5.125.449.950	12.190.727.812	(7.065.277.862)	(57,96)

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per Unit Eselon I dapat dilihat pada **Lampiran C.23**.

C.24 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH – TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (TP/TGR)

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.350.935.830,00 dan Rp10.834.681.892,00. Penyisihan piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan TagihanTuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang perhitungan.

Tabel C.24. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per Eselon I

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Ditjen TP	2.211.101.108	10.719.121.645	(8.508.020.537)	(79,37)
2	Ditjen Bun	135.297.981	115.204.782	20.093.199	17,44
3	Ditjen PSP	4.131.509	0	4.131.509	~
4	BSIP	405.232	355.465	49.767	14,00
	Jumlah	2.350.935.830	10.834.681.892	(8.483.746.062)	(78,30)

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per Unit Eselon I dapat dilihat pada **Lampiran C.24**.

C.25 PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.463.666.008,00 dan Rp11.802.725.065,00. Piutang Jangka Panjang Lainnya digunakan untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh

tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah.

Tabel C.25. Piutang Jangka Panjang Lainnya per Eselon I

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Ditjen TP	6.551.754.429	8.362.015.409	(1.810.260.980)	(21,65)
2	Ditjen Bun	209.691.570	247.354.970	(37.663.400)	(15,23)
3	Ditjen PKH	0	4.624.190	(4.624.190)	(100,00)
4	Ditjen PSP	354.998.746	67.952.816	287.045.930	422,42
5	BSIP	3.347.221.263	3.120.777.680	226.443.583	7,26
	Jumlah	10.463.666.008	11.802.725.065	(1.339.059.057)	(11,35)

Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya per Unit Eselon I dapat dilihat pada **Lampiran C.25**.

C.26 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH – PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.594.356.498,00 dan Rp6.581.653.113,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang perhitungan.

Tabel C.26. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per Eselon I

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Ditjen TP	5.247.094.379	4.264.944.574	982.149.805	23,03
2	Ditjen Bun	1.048.459	2.083.519	(1.035.060)	(49,68)
3	Ditjen PKH	0	23.121	(23.121)	(100,00)
4	Ditjen PSP	1.951.900	339.764	1.612.136	474,49
5	BSIP	2.344.261.760	2.314.262.135	29.999.625	1,30
	Jumlah	7.594.356.498	6.581.653.113	1.012.703.385	15,39

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per Unit Eselon I dapat dilihat pada **Lampiran C.26**.

ASET LAINNYA

C.27 ASET TAK BERWUJUD

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp133.766.533.472,00 dan Rp134.682.092.867,00. Aset Tak Berwujud terdiri dari Hak Cipta, Paten, *Software*, Lisensi, Hasil Kajian/Penelitian, dan Aset Tak Berwujud Lainnya.

Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel C.27.1 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Hak Cipta	28.025.000	28.025.000	0	0

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
2	Paten	512.872.250	512.872.250	0	0
3	Software	38.517.652.068	39.566.138.273	(1.048.486.205)	(2,65)
4	Lisensi	8.030.751.290	8.030.751.290	0	0
5	Hasil Kajian/Penelitian	24.960.236.864	24.960.236.864	0	0
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	61.716.996.000	61.584.069.000	132.927.000	0,22
Jumlah		133.766.533.472	134.682.092.677	(915.559.205)	(0,68)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:113/Permentan/PL.140/9/2014 Tentang Penatausahaan Aset Tak Berwujud Lingkup Kementerian Pertanian dinyatakan bahwa:

1. Aset Tak Berwujud yang selanjutnya disingkat ATB adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian. Aset ini merupakan hasil kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan.
2. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
3. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Penerima Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Hak Paten dan Hak Cipta tersebut pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Entitas. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.
5. *Software* Komputer adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi (penghubung) atau pengguna (*user*) dan perangkat keras (*hardware*) yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *hard disk*, *external disk*, *flash disk*, *compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. *Software* Komputer yang masuk dalam kategori ATB yaitu *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini dapat digunakan di computer lain.
6. Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan.
7. Hasil Kajian adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/ atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat

diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

Rincian per unit Eselon I atas Aset Tak Berwujud sebagai berikut.

Tabel C.27.2 Aset Tak Berwujud per Eselon I per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Setjen	21.261.935.714	21.312.792.589	(50.856.875)	(0,24)
2	Itjen	3.386.471.969	3.157.462.528	229.009.441	7,25
3	Ditjen TP	829.931.779	628.274.779	201.657.000	32,10
4	Ditjen Horti	4.353.140.125	4.253.640.125	99.500.000	2,34
5	Ditjen Bun	1.764.899.045	1.764.899.045	0	0,00
6	Ditjen PKH	5.646.539.464	5.456.839.912	189.699.552	3,48
7	Ditjen PSP	62.108.153.805	61.713.099.805	395.054.000	0,64
8	BSIP	29.948.319.831	29.966.108.404	(17.788.573)	(0,06)
9	BPPSDMP	1.224.074.000	1.465.774.000	(241.700.000)	(16,49)
10	BKP	0	1.709.676.750	(1.709.676.750)	(100,00)
11	Barantan	3.243.067.740	3.253.524.740	(10.457.000)	(0,32)
Jumlah		133.766.533.472	134.682.092.677	(915.559.205)	(0,68)

Berdasarkan tabel C.27.2 di atas berikut ini disajikan rincian jenis Aset Tak Berwujud per eselon I disajikan pada **Lampiran C.27**.

C.28 DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya yang dimiliki Kementerian Pertanian per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp660.244.080.795,00 dan Rp0,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya ini juga digunakan untuk menampung sejumlah dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan.

Rincian per unit Eselon I atas Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebagai berikut:

Tabel C.28 Dana yang Dibatasi Penggunaannya per Eselon I per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Setjen	1.968.364.976	0	1.968.364.976	~
2	Ditjen TP	476.549.087.340	0	476.549.087.340	~
3	Ditjen Horti	1.286.012.000	0	1.286.012.000	~
4	Ditjen Bun	81.465.758.835	0	81.465.758.835	~

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
5	Ditjen PKH	37.699.758.814	0	37.699.758.814	~
6	Ditjen PSP	54.866.480.500	0	54.866.480.500	~
7	BSIP	3.860.308.590	0	3.860.308.590	~
8	BPPSDMP	2.135.461.028	0	2.135.461.028	~
9	Barantan	412.848.712	0	412.848.712	~
Jumlah		660.244.080.795	0	660.244.080.795	~

C.29 ASET LAIN-LAIN

Saldo Aset Lain-lain yang dimiliki Kementerian Pertanian per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.196.708.929.534,00 dan Rp721.762.443.867,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Pertanian serta dalam proses penghapusan dari BMN, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.29 Rincian Aset Lain-Lain per Eselon I per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Setjen	31.628.182.204	36.181.152.047	(4.552.969.843)	(12,58)
2	Ditjen TP	175.716.898.763	72.772.932.090	102.943.966.673	141,46
3	Ditjen Horti	8.678.274.487	11.913.678.305	(3.235.403.818)	(27,16)
4	Ditjen Bun	236.143.498.370	227.842.532.768	8.300.965.602	3,64
5	Ditjen PKH	80.788.696.463	73.595.955.080	7.192.741.383	9,77
6	Ditjen PSP	17.764.450.615	26.522.792.029	(8.758.341.414)	(33,02)
7	BSIP	111.088.009.886	89.962.403.205	21.125.606.681	23,48
8	BPPSDMP	171.267.363.101	164.035.517.488	7.231.845.613	4,41
9	BKP	0	1.809.310.810	(1.809.310.810)	(100,00)
10	Barantan	363.633.555.645	17.126.170.045	346.507.385.600	2.023,26
Jumlah		1.196.708.929.534	721.762.443.867	474.946.485.667	65,80

Berdasarkan tabel C.29, dari kenaikan nilai Asset Lain-lain pada Eselon I Badan Karantina Pertanian, Satker Karantina Kelas I Denpasar berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Pemda Kabupaten Badung sesuai dengan sertifikat tanah tersebut sebesar Rp323.090.400.000,00 seluas 25.800 m².

Hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh KPKNL setempat pada tahun 2013, merekomendasikan tanah tersebut harus dicatat oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar, Kementerian Pertanian. Ternyata pada tahun 2022 Pemda Kabupaten Badung mencatat tanah tersebut pada Laporan Keuangan Pemda.

Untuk menghindari pencatatan ganda pada Laporan Keuangan Kementerian Pertanian maka dilakukanlah Penghentian Aset dari Penggunaan, untuk selanjutnya Badan Karantina Indonesia memproses lebih lanjut tanah tersebut sesuai dengan kondisi dan peraturan yang berlaku.

C.30 AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI ASET LAINNYA

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya yang dimiliki Kementerian Pertanian per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp504.666.819.036,00 dan Rp351.975.991.000,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.30 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
per 31 Desember 2023**

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Hak Cipta	28.025.000	4.091.088	23.933.912
2	Paten	512.872.250	417.476.216	95.396.034
3	Software	38.517.652.068	35.474.091.941	3.043.560.127
4	Lisensi	8.030.751.290	3.398.125.627	4.632.625.663
5	Hasil Kajian/Penelitian	24.960.236.864	0	24.960.236.864
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	61.716.996.000	141.934.492	61.575.061.508
	Jumlah	133.766.533.472	39.435.719.364	94.330.814.108
B	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya			
1	Dana di Rekening Penampungan(Kementerian/Lembaga	660.244.080.795	0	660.244.080.795
	Jumlah	660.244.080.795	0	660.244.080.795
C	Aset Lain(Lain			
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1.191.191.005.381	461.849.567.797	729.341.437.584
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	5.517.924.153	3.381.531.875	2.136.392.278
	Jumlah	1.196.708.929.534	465.231.099.672	731.477.829.862
	Total	1.990.719.543.801	504.666.819.036	1.486.052.724.765

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 tersaji sebesar Rp576.554.056.055,00 dan Rp12.644.657.760,00.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Kementerian Pertanian per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada di bawah ini.

Tabel C.31 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Utang kepada Pihak Ketiga	570.431.876.383	8.461.936.556	561.969.939.827	6641,15
Pendapatan Diterima Dimuka	4.886.947.728	3.430.923.893	1.456.023.835	42,44
Uang Muka Dari KPPN	324.945.830	619.103.780	(294.157.950)	(47,51)
Utang Jangka Pendek Lainnya	910.286.114	132.693.531	777.592.583	586
Jumlah	576.554.056.055	12.644.657.760	563.909.398.295	4.459,67

C.31 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp570.431.876.383,00 dan Rp8.461.936.556,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang Pihak Ketiga per Eselon I disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 31.1 Rincian Utang Pihak Ketiga per Eselon I

NO	Eselon I	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Setjen	3.696.104.992	1.974.284.704	1.721.820.288	87,21
2	Itjen	21.052.241	70.503.283	(49.451.042)	(70,14
3	Ditjen TP	440.551.137.921	241.514.296	440.309.623.625	182.312,03
4	Ditjen Horti	1.084.384.448	155.911.904	928.472.544	595,51
5	Ditjen Bun	45.331.859.814	150.822.753	45.181.037.061	29.956,38
6	Ditjen PKH	15.439.034.429	1.876.156.712	13.562.877.717	722,91
7	Ditjen PSP	54.914.526.698	85.393.640	54.829.133.058	64.207,51
8	BSIP	4.129.901.942	733.479.089	3.396.422.853	463,06
9	BPPSDMP	3.476.846.976	1.007.330.484	2.469.516.492	245,15
10	BKP	0	599.034.380	(599.034.380)	(100
11	Barantan	1.787.026.922	1.567.505.311	219.521.611	14,00
Jumlah		570.431.876.383	8.461.936.556	561.969.939.827	6.641,15

Pada Kementerian Pertanian, utang kepada pihak ketiga terdiri dari belanja pegawai yang masih harus dibayar, belanja barang yang masih harus dibayar, belanja modal yang masih harus dibayar, utang kepada pihak ketiga BLU dan utang kepada pihak ketiga lainnya. Berikut ini disajikan Perbandingan Utang Pihak Ketiga pada tabel dibawah ini sebagai berikut.

Tabel C.31.2 Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022

Ket Akun	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	663.480.546	1.119.347.626	(455.867.080)	(40,73)
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	447.347.494.237	6.254.094.100	441.093.400.137	7.052,87
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	2.143.676.141	0	2.143.676.141	~
Utang kepada Pihak Ketiga BLU	302.912.102	1.062.671.820	(759.759.718)	(71,50)
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	119.974.313.357	25.823.010	119.948.490.347	464.502,36
Jumlah	570.431.876.383	8.461.936.556	561.969.939.827	6.641,15

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga di masing(masing unit Eselon I disajikan pada lampiran C.31.

C.32 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.886.947.728,00 dan Rp3.430.923.893,00. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBP yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Pendapatan Diterima Dimuka antara lain merupakan pendapatan sewa ruangan untuk mesin ATM, kantin, dan sewa tanah.

Berikut ini disajikan Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka pada tabel dibawah ini sebagai berikut.

Tabel 32.1 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per Eselon I

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Setjen	2.855.821.936	2.563.668.115	292.153.821	11,40
2	Ditjen Horti	87.243.334	0	87.243.334	~
3	Ditjen PKH	229.700.000	403.466.266	(173.766.266)	(43,07)
4	BSIP	1.293.274.962	114.187.965	1.179.086.997	1.032,58
5	BPPSDMP	420.907.496	349.601.547	71.305.949	20,40
Jumlah		4.886.947.728	3.430.923.893	1.456.023.835	42,44

Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Tabel C.32.2 Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	4.657.247.728	3.027.457.627	1.629.790.101	53,83
Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka	229.700.000	83.350.000	146.350.000	175,58
Pendapatan diterima dimuka BLU	0	320.116.266	(320.116.266)	(100,00)
Jumlah	4.886.947.728	3.430.923.893	1.456.023.835	42,44

Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga di masing(masing unit Eselon I disajikan pada lampiran C.32.

C.33 UANG MUKA DARI KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp324.945.830,00 dan Rp619.103.780,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.34 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp910.286.114,00 dan Rp132.693.531,00. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor. Utang yang berasal dari

potongan/pungutan pajak oleh bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut, namun belum disetorkan ke Kas Negara.

Tabel 34.1 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per Eselon I

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Ditjen TP	326.405.712	0	326.405.712	~
2	Ditjen Bun	583.880.402	380.000	583.500.402	153.552,74
3	Ditjen PKH	0	1.948.815	(1.948.815)	(100,00)
4	BPPSDMP	0	130.364.716	(130.364.716)	(100,00)
	Jumlah	910.286.114	132.693.531	777.592.583	586,01

EKUITAS

C.35 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp80.516.531.240.504,00 dan Rp81.133.139.180.726,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Apabila dibandingkan perbedaan nilai atas Pendapatan LRA dan LO Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel D.1 Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) periode 31 Desember 2023 (dalam Rupiah)

URAIAN	LRA	LO	SELISIH	REFERENSI
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	605.998.892.770	600.447.388.467	(5.551.504.303)	Tabel D.1.2
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	7.063.175.040	7.063.175.040	0	Tabel D.11.2
Pendapatan dari Non Operasional Lainnya	75.174.790.256	173.228.245.847	98.053.455.591	Tabel D.14.2
JUMLAH	688.236.858.066	780.738.809.354	92.501.951.288	

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp600.447.388.467,00 dan Rp596.715.294.488,00.

Tabel D.1.1 Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan Operasional (LO) periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

Uraian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	21.923.003.900	2.295.853.000	854,90
Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran	109.260.000	0	~
Pendapatan Penyediaan Barang	1.171.992.630	880.007.190	33,18
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	50.675.174.632	65.087.696.050	(22,14)
Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa	0	28.830.000	(100,00)
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	542.168.200	3.121.880.210	(82,63)
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	6.696.234.433	4.199.648.923	59,45
Pendapatan Lain-lain BLU	682.405.272	111.067.429	514,41
Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU	27.000.000	0	~
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	40.933.413.314	43.266.962.398	(5,39)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	232.549.706	459.859.350	(49,43)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.212.797.710	5.692.228.645	9,15
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	7.776.000	23.338.500	(66,68)
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	2.211.000	(100,00)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	5.301.283.000	5.656.785.000	(6,28)
Pendapatan Perizinan Pertanian	24.469.265.000	19.980.255.000	22,47
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	40.820.520.431	29.597.517.275	37,92
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	321.351.086.248	315.995.976.956	1,69

Uraian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Pendapatan Pendidikan Lainnya	306.894.546	499.284.500	(38,53)
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	8.123.081.914	9.351.729.003	(13,14)
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	129.212.000	102.100.000	26,55
Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	70.110.000	1.729.835.000	(95,95)
Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	107.288.000	0	~
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	3.774.504.000	9.172.923.600	(58,85)
Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	91.217.000	285.373.000	(68,04)
Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	1.656.698.414	2.196.351.709	(24,57)
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya	4.833.160	4.459.853.333	(99,89)
Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	2.462.766.438	5.473.712.327	(55,01)
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	46.100.000	903.030.000	(94,89)
Pendapatan Jasa Lainnya	53.781.264.006	54.884.082.340	(2,01)
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	262.608	0	~
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	12.174.768	26.951.526	(54,83)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	8.647.133.567	10.470.169.681	(17,41)
Pendapatan Denda Lainnya	1.291.065	5.940.359	(78,27)
Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan	34.031.500	0	~
Pendapatan Anggaran Lain-lain	42.595.005	753.841.184	(94,35)
Jumlah	600.447.388.467	596.715.294.488	0,63

Tabel D.1.2 Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) periode 31 Desember 2023 (dalam Rupiah)

Uraian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	22.193.003.900	21.923.003.900	(270.000.000)
Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran	109.260.000	109.260.000	0
Pendapatan Penyediaan Barang	1.383.720.838	1.171.992.630	(211.728.208)
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	55.875.850.741	50.675.174.632	(5.200.676.109)
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	542.168.200	542.168.200	0
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	6.696.234.433	6.696.234.433	0
Pendapatan Lain-lain BLU	682.405.272	682.405.272	0
Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU	27.000.000	27.000.000	0
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	40.570.595.864	40.933.413.314	362.817.450
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	242.246.925	232.549.706	(9.697.219)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7.829.198.411	6.212.797.710	(1.616.400.701)
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	7.776.000	7.776.000	0
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	5.306.583.000	5.301.283.000	(5.300.000)
Pendapatan Perizinan Pertanian	24.615.615.000	24.469.265.000	(146.350.000)
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	40.820.367.931	40.820.520.431	152.500
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	321.353.443.827	321.351.086.248	(2.357.579)
Pendapatan Pendidikan Lainnya	306.894.546	306.894.546	0

Uraian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	8.417.581.914	8.123.081.914	(294.500.000)
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	129.212.000	129.212.000	0
Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	70.110.000	70.110.000	0
Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	107.288.000	107.288.000	0
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	3.774.504.000	3.774.504.000	0
Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	91.217.000	91.217.000	0
Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	1.667.985.123	1.656.698.414	(11.286.709)
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya	4.833.160	4.833.160	0
Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	2.462.766.438	2.462.766.438	0
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	46.100.000	46.100.000	0
Pendapatan Jasa Lainnya	53.781.264.006	53.781.264.006	0
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	262.608	262.608	0
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	12.174.768	12.174.768	0
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	6.784.235.442	8.647.133.567	1.862.898.125
Pendapatan Denda Lainnya	1.923.898	1.291.065	(632.833)
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	8.443.020	0	(8.443.020)
Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan	34.031.500	34.031.500	0
Pendapatan Anggaran Lain-lain	42.595.005	42.595.005	0
Jumlah	605.998.892.770	600.447.388.467	(5.551.504.303)

Terdapat perbedaan nilai atas, LRA dengan LO Pendapatan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada LO periode 31 Desember 2023 sebesar Rp5.551.504.303,00. Rincian penjelasan perbedaan tersebut disajikan pada **Lampiran D.1.1**.

D.2 BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Saldo Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.033.477.576.430,00 dan Rp2.252.266.670.039,00. Rincian Beban Pegawai disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel D.2.1 Perbandingan Beban Pegawai periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Uraian Beban Pegawai	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Beban Gaji Pokok PNS	701.218.486.487	782.391.839.478	(10,38)
Beban Pembulatan Gaji PNS	10.471.523	16.680.195	(37,22)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	51.108.868.881	56.857.814.461	(10,11)
Beban Tunj. Anak PNS	15.257.914.032	16.440.880.469	(7,20)
Beban Tunj. Struktural PNS	7.235.319.444	7.877.309.640	(8,15)
Beban Tunj. Fungsional PNS	86.652.742.035	116.578.679.730	(25,67)

Uraian Beban Pegawai	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Beban Tunj. PPh PNS	3.392.653.536	5.972.641.947	(43,20)
Beban Tunj. Beras PNS	40.853.712.708	44.945.627.669	(9,10)
Beban Uang Makan PNS	89.949.136.250	103.911.689.162	(13,44)
Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	2.700.000	3.000.000	(10,00)
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	1.963.425.000	1.985.565.000	(1,12)
Beban Tunjangan Umum PNS	15.252.043.214	17.275.661.572	(11,71)
Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	165.405.300	163.405.000	1,22
Beban Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara	420.000.000	420.000.000	0,00
Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1.356.067.350	1.360.367.775	(0,32)
Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	3.814.812	329.000	1.059,52
Beban Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang Berhenti Atau Telah Berakhir Masa Jabatannya	0	580.454.000	(100,00)
Beban Gaji Pokok PPPK	2.095.773.158	49.586.400	4.126,51
Beban Pembulatan Gaji PPPK	35.150	144	24.309,72
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	99.007.013	4.958.640	1.896,66
Beban Tunjangan Anak PPPK	23.244.265	1.983.456	1.071,91
Beban Tunjangan Struktural PPPK	0	66.000.000	(100,00)
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	310.768.333	0	~
Beban Tunjangan Beras PPPK	113.574.690	3.476.160	3.167,25
Beban Uang Makan PPPK	461.796.950	492.000	93.761,17
Beban Uang Lembur	49.499.805.300	48.165.547.650	2,77
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	942.019.453.271	1.029.593.021.945	(8,51)
Beban Gaji dan Tunjangan	20.961.911.408	17.599.658.546	19,10
Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	6.900.000	0	~
Beban Tunjangan Umum PPPK	1.800.000	0	~
Beban Uang Lembur PPPK	65.658.000	0	~
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2.975.088.320	0	~
Jumlah	2.033.477.576.430	2.252.266.670.039	(9,71)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat penurunan beban pegawai pada TA 2023 dibandingkan dengan TA 2022. Hal ini secara signifikan dipengaruhi oleh tidak ada realisasi uang penghargaan bagi wakil Menteri yang berhenti/pensiun, uang duka PNS, terdapat beberapa pegawai yang pensiun, dan adanya peralihan/mutasi pegawai dari Kementerian Pertanian ke Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Jika dibandingkan realisasi belanja pegawai termasuk belanja pegawai BLU (sebesar Rp26.558.240.692,00) periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp2.039.223.545.295,00 dengan beban pegawai sebesar Rp2.033.477.576.430,00 terdapat selisih realisasi kurang sebesar Rp5.745.968.865,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel D.2.2 Penjelasan Atas Selisih Realisasi Belanja Dengan Beban Pegawai (dalam Rupiah)

Penjelasan Transaksi	Jumlah	Eselon I
Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2022 pada Tahun 2023	(762.210.826)	Itjen, Ditjen PKH, BSIP, BPPSDMP, Barantan

Penjelasan Transaksi	Jumlah	Eselon I
Pencatatan Beban Pegawai Tahun 2023 yang akan dibayarkan Tahun 2024	473.552.896	Itjen, Ditjen PKH, BSIP, BPPSDMP
Setoran Sisa Uang Makan Tahun 2022 yang Sudah disetor ke kas negara tahun 2023	57.154.200	Setjen
Pencatatan sisa Uang Makan tahun 2023 yang sudah disetor ke kas Negara tahun 2024	(78.144.500)	Setjen, Itjen
Belanja Pegawai Dibayar Dimuka Tahun 2022 yang merupakan kelebihan Pembayaran Tukin Tahun 2022 dan sudah diperhitungkan sebagai pengurang TUKIN bulan Januari tahun 2023	511.228.365	Setjen
Pencatatan Belanja Pegawai Dibayar Dimuka Tahun 2023 yang merupakan kelebihan Pembayaran Tukin Tahun 2023 dan sudah diperhitungkan sebagai pengurang tukin bulan Januari tahun 2024	(346.779.716)	Setjen
Uang Muka Belanja Pegawai (prepayment)	(4.440.000)	Ditjen TP
Koreksi Beban Gaji dan Tunjangan BLU	(5.596.329.284)	Ditjen PKH
Jumlah	(5.745.968.865)	

Pencatatan Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar tahun 2022 sebesar Rp1.119.347.626,00 dan beban pegawai tahun 2022 yang dibayarkan pada tahun 2023 sebesar Rp762.210.826,00 terdapat selisih Rp357.136.800,00 yang merupakan belanja uang makan pada satker Setjen Kementerian Pertanian dan telah dibayarkan ke pegawai pada tahun 2023. Sedangkan saldo akhir Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar yang dicatat tahun 2023 sebesar Rp663.480.546,00 dan pencatatan di Laporan Operasional sebesar Rp473.552.896,00 terdapat selisih sebesar Rp189.927.650,00 yang merupakan belanja uang makan pada satker Setjen Kementerian Pertanian tahun 2023 yang akan dibayarkan tahun 2024.

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Saldo Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp886.795.155.413,00 dan Rp1.064.956.867.501,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel D.3.1 Perbandingan Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

Uraian Beban Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Beban Persediaan konsumsi	342.604.508.277	286.003.341.040	19,79
Beban Persediaan bahan baku	143.235.898.462	187.255.848.638	(23,51)
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	1.000.000	20.000.000	(95,00)
Beban Persediaan Lainnya	400.953.748.674	591.677.677.823	(32,23)
Jumlah	886.795.155.413	1.064.956.867.501	(16,73)

Kementerian Pertanian telah mempunyai kebijakan akuntansi persediaan, namun untuk penyajian nilai persediaan benih/bibit/hewan saat ini masih dalam proses pembahasan, baik sistem akuntansi yang mengatur rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari identifikasi transaksi keuangan yang akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyajian nilai persediaan benih/bibit/hewan, penjurnalan baik di buku jurnal maupun buku besar, sampai penyajiannya dalam laporan keuangan.

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Saldo Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.326.030.259.187,00 dan Rp3.139.896.830.334,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa periode 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel D.4.1 Perbandingan Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

Uraian Beban Barang dan Jasa	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	380.221.056.296	363.061.280.331	4,73
Beban Pengadaan Bahan Makanan	15.513.136.835	10.296.089.667	50,67
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	24.541.940.318	23.164.507.763	5,95
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.544.962.432	3.269.317.089	(22,16)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	89.108.294.540	94.082.810.000	(5,29)
Beban Barang Operasional Lainnya	27.775.027.234	23.880.687.828	16,31
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2.241.726.547	22.684.498.950	(90,12)
Beban Bahan	409.640.642.932	416.223.102.519	(1,58)
Beban Honor Output Kegiatan	227.900.948.417	373.777.705.547	(39,03)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.264.311.092.069	1.132.797.239.412	11,61
Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	566.000.000	124.100.000	356,08
Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	0	925.000.000	(100,00)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	59.427.500	3.385.476.113	(98,24)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	235.760.448	0	~
Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	1.586.340.000	0	~
Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	667.661.000	945.332.323	(29,37)
Beban Langganan Listrik	99.627.920.249	89.576.881.136	11,22
Beban Langganan Telepon	6.075.251.457	5.585.473.964	8,77
Beban Langganan Air	5.413.984.232	5.273.595.736	2,66
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.643.208.408	21.425.807.245	10,35
Beban Jasa Pos dan Giro	207.361.038	81.392.461	154,77
Beban Jasa Konsultan	47.611.215.437	65.445.040.102	(27,25)
Beban Sewa	78.070.711.565	71.906.361.322	8,57
Beban Jasa Profesi	62.560.800.349	61.791.505.005	1,24
Beban Jasa Lainnya	528.253.420.536	281.690.880.091	87,53

Uraian Beban Barang dan Jasa	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	736.431.580	8.678.388.533	(91,51)
Beban Barang	9.956.709.976	9.847.653.869	1,11
Beban Jasa	5.495.068.437	3.621.204.792	51,75
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	620.291.300	204.121.900	203,88
Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomtabel BLU	10.246.900.000	0	~
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	321.084.905	265.060.636	21,14
Beban Aset Ekstrakomtabel Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.504.700	0	~
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	232.981.650	45.639.045.000	(99,49)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU	25.396.800	12.543.000	102,48
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan - BLU	0	43.228.000	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya - BLU	0	191.500.000	(100,00)
Jumlah	3.326.030.259.187	3.139.896.830.334	5,93

Jika dibandingkan realisasi belanja barang dan jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp3.009.425.585.281,00 dengan beban barang dan jasa sebesar Rp3.326.030.259.187,00 terdapat selisih sebesar **Rp316.604.673.906,00**. Rincian penjelasan selisih tersebut disajikan pada **Lampiran D.4.1**.

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Saldo Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp331.382.987.078,00 dan Rp324.418.095.597,00.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel D.5.1 Perbandingan Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

Uraian Beban Pemeliharaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	109.816.515.917	103.609.945.284	5,99
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	1.235.090.704	1.016.947.312	21,45
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	9.644.117.052	11.437.154.384	(15,68)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	157.869.683.125	152.813.652.684	3,31
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	79.268.250	86.327.900	(8,18)
Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	76.014.695	140.770.212	(46,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.013.771.858	4.636.326.801	8,14
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	721.557.480	652.618.117	10,56
Beban Pemeliharaan Irigasi	525.816.300	757.405.300	(30,58)
Beban Pemeliharaan Jaringan	6.851.810.143	6.151.313.011	11,39
Beban Pemeliharaan Lainnya	3.145.124.302	2.289.357.178	37,38
Beban Pemeliharaan	4.806.335.602	11.333.622.686	(57,59)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2.961.104.043	3.562.955.567	(16,89)

Uraian Beban Pemeliharaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Beban Persediaan suku cadang	28.634.009.507	25.191.203.091	13,67
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	2.768.100	738.496.070	(99,63)
Jumlah	331.382.987.078	324.418.095.597	2,15

Jika dibandingkan realisasi belanja pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp312.523.290.564,00 dengan beban pemeliharaan sebesar Rp331.382.987.078,00 terdapat **selisih** sebesar **Rp18.859.696.514,00**.

Adapun penjelasan atas selisih realisasi belanja dengan beban pemeliharaan sebagai berikut.

Tabel D.5.2 Penjelasan Atas Selisih Realisasi Belanja Dengan Beban Pemeliharaan
(dalam Rupiah)

Penjelasan Transaksi	Jumlah	Eselon I
Ralat SPM/SP2D ke 536111 (Belanja Modal Lainnya)	151.775.251	BPPSDMP
Dicatat sebagai Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	(106.100.930)	Ditjen Horti, Ditjen PKH
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan yang telah dicatat dan dikeluarkan di Persediaan	(2.857.402.426)	Setjen, Itjen, Ditjen TP, Ditjen Horti, Ditjen Bun, Ditjen PKH, Ditjen PSP, BSIP, BPPSDMP
Persediaan bahan untuk pemeliharaan yang dikeluarkan tahun 2023	2.964.979.043	Setjen, Itjen, Ditjen TP, Ditjen Horti, Ditjen Bun, Ditjen PKH, Ditjen PSP, BSIP, BPPSDMP
Persediaan suku cadang yang dikeluarkan tahun 2023	28.643.489.507	Setjen, Ditjen TP, Ditjen Horti, Ditjen PKH, BSIP
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	2.768.100	BPPSDMP
Ralat SPM/SP2D ke 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran) satker Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	420.000	BSIP
Koreksi Nilai Pemeliharaan Gedung dan Bangunan satker Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta	(310.631.000)	Ditjen PKH
Koreksi Nilai Pemeliharaan Gedung dan Bangunan satker Ditjen Hortikultura	24.295.000	Ditjen Horti
Pencatatan Belanja dibayar dimuka eksploitasi BBM di SPBU PT.Puri Ampera yang baru dimanfaatkan Tahun 2023 satker Barantan	50.864.354	Barantan
Koreksi atas Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang digunakan untuk renovasi gedung dan membeli peralatan mesin pada satker Ditjen Tanaman Pangan dan satker Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan & Hortikultura DKI Jakarta	(777.650.433)	Ditjen TP
Koreksi atas Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang digunakan untuk renovasi gedung dan membeli peralatan mesin pada satker Ditjen PSP	(5.533.122.205)	Ditjen PSP
Koreksi atas Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang digunakan untuk renovasi gedung pada satker Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi Sukamandi, Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner-Bogor, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias Segunung, Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang Malang	(1.175.010.000)	BSIP

Penjelasan Transaksi	Jumlah	Eselon I
Koreksi atas Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang digunakan untuk pembelian peralatan dan mesin pada satker Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Jakarta	(14.130.000)	BSIP
Koreksi atas Belanja Pemeliharaan terhadap pendapatan perolehan aset lainnya pada satker Balai Inseminasi Buatan Lembang	(2.191.492.747)	Dtjen PKH
Koreksi atas Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan Beban Persediaan suku cadang terhadap pendapatan perolehan aset lainnya pada satker Balai Inseminasi Buatan Lembang	(13.355.000)	Dtjen PKH
JUMLAH	18.859.696.514	

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Saldo Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.925.998.619.374,00 dan Rp1.947.668.838.497,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel D.6.1 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

Uraian Beban Perjalanan Dinas	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Beban Perjalanan Biasa	1.198.539.268.335	1.233.093.330.190	(2,80)
Beban Perjalanan Tetap	40.205.139.491	38.811.292.945	3,59
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	54.522.572.336	48.132.309.565	13,28
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	93.586.630.121	77.210.964.982	21,21
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	510.864.441.374	527.194.371.439	(3,10)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	13.362.818.459	8.722.579.629	53,20
Beban Perjalanan Tetap - Luar Negeri	29.607.019	0	~
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	10.422.008.827	12.048.207.805	(13,50)
Beban Perjalanan	4.466.133.412	2.440.481.942	83,00
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	15.300.000	(100,00)
Jumlah	1.925.998.619.374	1.947.668.838.497	(1,11)

Jika dibandingkan realisasi belanja perjalanan dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp1.925.996.053.752,00 dengan beban perjalanan dinas sebesar Rp1.925.998.619.374,00 terdapat **selisih** sebesar **Rp2.565.622,00**.

Adapun penjelasan atas selisih realisasi belanja dengan beban pemeliharaan sebagai berikut.

Tabel D.6.2 Penjelasan Atas Selisih Realisasi Belanja Dengan Beban Perjalanan Dinas (dalam Rupiah)

Penjelasan Transaksi	Jumlah	Eselon I
Piutang Lainnya yang merupakan sisa perjalanan dinas tahun 2023 dan disetor pada Tahun 2024	(14.016.706)	Itjen

Penjelasan Transaksi	Jumlah	Eselon I
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang merupakan sisa perjalanan dinas tahun 2023 yang disetor pada Tahun 2024 satker kantor Pusat Ditjen Hortikultura	(17.957.672)	Ditjen Hortikultura
Ralat SPM/SP2D ke 521219 (Belanja Belanja Barang Non Operasional Lainnya) sebesar 500.000 satker Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Ralat SPM/SP2D ke 521219 sebesar 6.400.000 dan ke 521211 (Belanja Bahan) sebesar 14.950.000 satker Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung	21.850.000	Ditjen TP
Ralat SPM/SP2D ke 521211 (Belanja Bahan) sebesar 750.000 satker Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (TP) dan Ralat SPM/SP2D ke 521211 sebesar 700.000 satker Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (DK)	1.450.000	Ditjen Hortikultura
Ralat SPM/SP2D ke 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya) sebesar 6.240.000 satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Selatan dan Ralat SPM/SP2D ke 522151 (Belanja Jasa Profesi) sebesar 5.000.000 satker Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP)	11.240.000	BSIP
Jumlah	2.565.622	

D.7 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan uang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.092.483.740.231,00 dan Rp6.009.501.289.152,00.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat (bantuan pemerintah) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel D.7.1 Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

Uraian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	790.000.000	1.424.291.000	(44,53)
Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	71.717.931.690	65.041.228.706	10,27
Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	124.224.010.784	379.459.281.687	(67,26)
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	626.250.000	0	~
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	591.483.855.620	752.571.242.791	(21,40)
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	35.775.000	537.646.881.308	(99,99)

Uraian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	1.000.000	3.846.000	(74,00)
Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	59.702.705.556	82.423.430.372	(27,57)
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	469.679.719.331	421.165.556.441	11,52
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.427.109.231.917	1.127.854.471.647	26,53
Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	126.556.000	(100,00)
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	327.088.299.723	385.936.466.780	(15,25)
Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	6.852.475.429	5.324.621.015	28,69
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	3.013.172.485.181	2.250.523.415.405	33,89
Jumlah	6.092.483.740.231	6.009.501.289.152	1,38

D.8 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp656.216.315.304,00 dan Rp695.624.931.933,00.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel D.8.1 Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	379.929.359.837	407.677.010.497	(6,81)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	222.193.668.096	232.669.755.318	(4,50)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	23.349.636.552	22.682.720.471	2,94
Beban Penyusutan Irigasi	10.863.197.537	11.013.208.964	(1,36)
Beban Penyusutan Jaringan	5.528.428.818	5.918.065.732	(6,58)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.321.137.670	1.965.977.549	(32,80)
Beban Amortisasi Hak Cipta	400.362	400.362	0,00
Beban Amortisasi Paten	36.313.321	38.148.151	(4,81)
Beban Amortisasi Software	3.442.435.391	5.034.606.136	(31,62)
Beban Amortisasi Lisensi	803.075.175	803.075.174	0,00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	22.906.613	23.053.863	(0,64)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	1.061.913	(100,00)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	8.725.755.932	7.797.847.803	11,90
Jumlah	656.216.315.304	695.624.931.933	(5,67)

Nilai Beban Penyusutan Aset Tetap di atas, termasuk Beban Penyusutan Aset Properti Investasi. Sesuai dengan Petunjuk Teknis Akuntansi nomor 09 Revisi Ke-2 tentang Akuntansi Barang Milik Negara Yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi Pada Kementerian/Lembaga halaman 22-23 dinyatakan bahwa pencatatan reklasifikasi BMN yang memenuhi karakteristik Properti Investasi masa transisi harus sesuai ketentuan, yaitu : Aset Tetap yang dirubah (reklasifikasi) menjadi Properti Investasi saat ditransaksikan pada periode 14 (koreksi setelah LK Unaudited) pada aplikasi SAKTI secara otomatis seluruh nilai aset tetap maupun akumulasi penyusutannya berpindah menjadi akun Properti Investasi dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi. Namun, Beban Penyusutan Properti Investasi tidak berpindah dalam arti tetap berada pada Beban Penyusutan Aset Tetap karena transaksi penyusutan pada aplikasi SAKTI secara otomatis hanya dilaksanakan pada periode 6 dan 12 (saat penyusunan LK Unaudited).

Perbandingan antara Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan Mutasi Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebagai berikut. (dalam Rupiah).

Tabel D.8.2 Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan Mutasi Penyusutan

No	Penjelasan	Saldo
1	Beban Penyusutan dan amortisasi (LO)	656.216.315.304
2	Mutasi Penyusutan dan Amortisasi :	464.511.777.247
	a. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi akhir tahun	7.821.575.065.739
	b. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi awal tahun	7.357.063.288.492
	Selisih Beban dan Mutasi Penyusutan dan Amortisasi	191.704.538.057

Rincian selisih Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan Mutasi Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp191.704.538.057,00 di atas, dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel D.8.3 Selisih Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan Mutasi Penyusutan Per Akun

Uraian Transaksi	Jumlah	Eselon I
Transfer Keluar	64.594.336.289	Setjen, Itjen, Ditjen TP, Ditjen Perkebunan, Ditjen PKH, Ditjen PSP, BSIP, BPPSDMP, BKP, Barantan
Transfer Masuk	(25.869.263.251)	Setjen, Itjen, Ditjen Perkebunan, Ditjen PKH, Ditjen PSP, BSIP, BPPSDMP, Barantan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	20.168.791.295	Setjen, Ditjen TP, Ditjen Perkebunan, Ditjen PKH, Ditjen PSP, BSIP, BPPSDMP, Barantan
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	6.115.000	BSIP
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	240.500.000	Setjen
Beban Kerugian Pelepasan Aset	131.839.635.127	Setjen, Itjen, Ditjen TP, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Ditjen PKH, Ditjen PSP, BSIP, BPPSDMP, BKP, Barantan
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	724.423.597	Ditjen Hortikultura, BSIP
Total	191.704.538.057	

D.9 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp894.302.408,00 dan Rp1.356.783.695,00.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel D.9.1 Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

Uraian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Beban Penyisihan Piutang PNPB	168.411.785	(103.065.073)	(263,40)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(6.392.433)	108.121.510	(105,91)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(45.306.378)	878.720.890	(105,16)
Beban Penyisihan Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	1.068.441	885.214	20,70
Beban Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	0	-26.328	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	85.930.433	(62.014.465)	(238,57)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	690.590.560	514.835.831	34,14
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	19.326.116	(100,00)
Jumlah	894.302.408	1.356.783.695	(34,09)

Perbandingan antara Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan Mutasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel D.9.2 Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan Mutasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih periode yang berakhir 31 Desember 2023

No	Penjelasan	Saldo
1	Beban Penyisihan Piutang (LO)	894.302.408
2	Mutasi Penyisihan Piutang (Neraca) :	-8.765.796.354
	a. Penyisihan Piutang Akhir Tahun	26.257.159.864
	b. Penyisihan Piutang Awal Tahun	35.022.956.218
	Selisih Beban dan Mutasi Penyisihan Piutang	9.660.098.762

Rincian selisih Mutasi Penyusutan dan Amortisasi dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp9.660.098.762,00 di atas, dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel D.9.3 Rincian Selisih Mutasi Penyusutan dan Amortisasi dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian Transaksi	Jumlah	Eselon I
Jurnal Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB dengan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	4.892.707,00	Ditjen PKH
Jurnal Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya dengan Piutang Lainnya	272.166.570,00	Setjen, Ditjen Perkebunan
Jurnal Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dengan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	27.791.174,00	Ditjen Perkebunan, Ditjen PKH

Uraian Transaksi	Jumlah	Eselon I
Jurnal Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi dengan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	8.474.516.242,00	Ditjen TP
Jurnal Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya dengan Piutang Jangka Panjang lainnya	139.438.500,00	Ditjen Perkebunan
Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB sebesar 53.821.915, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya sebesar -19.194.069, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi sebesar 926.720.241, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi sebesar -5.408.570, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar -236.216.777	719.722.740,00	Setjen, Ditjen TP, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Ditjen PKH, Ditjen PSP, BSIP
Jurnal Beban Penyisihan Piutang PNB dengan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	19.570.829,00	Ditjen Peternakan
Koreksi Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.000.000,00	Ditjen Hortikultura
Total	9.660.098.762,00	

D.10. Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar periode sampai dengan 31 Desember 2023 turun sebesar Rp83.816.284.115,00. Defisit ini turun sebesar Rp1.958.757.958,00 atau 2,28% dari 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp85.775.042.073,00. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp7.063.175.040,00 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp90.879.459.155,00.

D.11. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.063.175.040,00. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp3.780.870.532,00 atau 34,87% dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp10.844.045.572,00. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari Eselon I yaitu ketika Pendapatan yang diterima dari pelepasan aset non lancar lebih besar dari nilai buku aset non lancar yang dilepas. Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel D.11.1 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per Eselon I periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

Uraian	Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	Ditjen Perkebunan	14.699.999	0	~
	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	3.225.000	(100,00)
	Badan PPSPDMP	20.109.000	218.000	9.124,31
	Badan Karantina Pertanian	248.993.829	274.000.288	(9,13)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Sekretariat Jenderal	280.210.949	751.282.894	(62,70)
	Ditjen Tanaman Pangan	442.586.509	398.368.696	11,10
	Ditjen Hortikultura	85.835.999	596.375.470	(85,61)
	Ditjen Perkebunan	382.076.968	316.507.085	20,72
	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	65.194.738	697.855.914	(90,66)

Uraian	Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
	Ditjen PSP	697.139.748	4.979.000	13.901,60
	BSIP	657.157.944	710.089.868	(7,45)
	Badan PPSDMP	603.627.871	1.676.851.341	(64,00)
	Badan Karantina Pertanian	761.187.222	1.081.274.106	(29,60)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	Sekretariat Jenderal	0	29.777.444	(100,00)
	Inspektorat Jenderal	86.781.989	220.970.298	(60,73)
	Ditjen Tanaman Pangan	0	4.200.000	(100,00)
	Ditjen Perkebunan	8.900.123	247.915.989	(96,41)
	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.250.357.599	2.614.230.013	(13,92)
	BSIP	136.644.494	648.904.602	(78,94)
	Badan PPSDMP	318.194.060	435.608.453	(26,95)
	Badan Ketahanan Pangan	0	48.222.111	(100,00)
	Badan Karantina Pertanian	3.475.999	83.189.000	(95,82)
Jumlah		7.063.175.040	10.844.045.572	(34,87)

Tabel D.11.2 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) periode 31 Desember 2023 (dalam Rupiah)

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	LRA	LO	Selisih
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	283.802.828	283.802.828	0
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	3.975.017.948	3.975.017.948	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2.804.354.264	2.804.354.264	0
Jumlah	7.063.175.040	7.063.175.040	0

Tidak terdapat selisih realisasi pendapatan pelepasan aset non lancar pada laporan realisasi anggaran (LRA) dengan laporan operasional (LO) periode yang berakhir pada 31 Desember 2023.

D.12. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban yang terbentuk dari berkurangnya Aset Non Lancar (Aset Tetap dan Aset Lainnya), karena Satuan Kerja melakukan pelepasan Aset Non Lancar kepada pihak lain, seperti masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak lainnya, maupun karena kondisi aset non lancar tersebut. Pelepasan Aset tersebut dapat berupa penghapusan, barang hilang dan barang rusak berat yang diusulkan dihapus.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar selama periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp90.879.459.155,00. Beban ini mengalami penurunan sebesar Rp5.739.628.490,00 atau 5,94% dibanding 31 Desember 2022 sebesar Rp96.619.087.645,00.

Perbandingan Beban Pelepasan Aset Non Lancar per Eselon I untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel D.12.1 Perbandingan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Per Eselon I periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% Naik/ (Turun)
Sekretariat Jenderal	5.743.364.309	913.944.476	528,42
Ditjen Tanaman Pangan	5.143.060.448	638.393.105	705,63

Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% Naik/ (Turun)
Ditjen Hortikultura	4.069.204.905	8.924.830.000	(54,41)
Ditjen Perkebunan	44.186.244.967	46.661.204.882	(5,30)
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	18.332.633.256	18.780.082.618	(2,38)
Ditjen PSP	78.335.513	910.899	8.499,80
BSIP	6.029.190.815	4.068.831.572	48,18
Badan PSDMP	1.032.437.294	6.177.246.751	(83,29)
Badan Ketahanan Pangan	0	2.656.641.980	(100,00)
Badan Karantina Pertanian	6.264.987.648	7.797.001.362	(19,65)
Jumlah	90.879.459.155	96.619.087.645	(0,06)

Untuk rincian penjelasan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2023 dan 2022 dapat disajikan pada **Lampiran D.12.1**

D.13. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp156.193.448.305,00. Nilai tersebut turun sebesar (Rp101.557.671.855,00) atau 39,40% dibanding 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp257.751.120.160,00. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp173.228.245.847,00 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp17.034.797.542,00.

D.14. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp173.228.245.847,00. Nilai tersebut turun sebesar (Rp138.821.980.619,00) atau 44,49% dibanding 31 Desember 2022 sebesar Rp312.050.226.466,00. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel D.14.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	112.514.088	797.887.562	(85,90)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	1.457.444.582	116.481.000	1.151,23
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	1.711.664.664	2.559.225.741	(33,12)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.991.790.275	1.657.626.796	20,16
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	63.348.073.835	34.848.193.438	81,78
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	173.225.603	0	~
Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	500.000	4.100.000	(87,80)
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	25.424.700	0	~
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	6.158.752	3.463.205	77,83
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	96.244.696.001	207.950.910.927	(53,72)

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	8.156.753.347	64.112.337.797	(87,28)
Jumlah	173.228.245.847	312.050.226.466	(44,49)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan pengembalian dana kegiatan perluasan sawah di Kab. Muna Tahun 2013 sesuai LHATT Irjen Kementan RI Nomor 96/RC.240/H/08/2014 Tanggal 6 Agustus 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel D.14.2 Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) periode yang berakhir 31 Desember 2023 (dalam Rupiah)

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	345.250.512	112.514.088	(232.736.424)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	150.857.700	1.457.444.582	1.306.586.882
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	2.488.260.162	1.711.664.664	(776.595.498)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	2.029.906.697	1.991.790.275	(38.116.422)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	67.079.459.470	63.348.073.835	(3.731.385.635)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	3.055.131.015	173.225.603	(2.881.905.412)
Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	500.000	500.000	0
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	25.424.700	25.424.700	0
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	0	6.158.752	6.158.752
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	96.244.696.001	96.244.696.001
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	8.156.753.347	8.156.753.347
Jumlah	75.174.790.256	173.228.245.847	98.053.455.591

Jika dibandingkan realisasi pendapatan kegiatan non operasional lainnya pada laporan realisasi anggaran (LRA) sebesar Rp75.174.790.256,00 dengan laporan operasional (LO) sebesar Rp173.228.245.847,00 periode yang berakhir pada 31 Desember 2023, terdapat selisih sebesar Rp98.053.455.591,00. Rincian penjelasan perbedaan tersebut disajikan pada **Lampiran D.14.1**. Sedangkan untuk rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per akun per Eselon I disajikan pada **Lampiran D.14.2**.

D.15. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17.034.797.542,00. Beban ini mengalami penurunan sebesar Rp37.264.308.764,00 atau 68,63% dibandingkan pada periode yang sama 31 Desember 2022 sebesar Rp54.299.106.306,00. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel D.15.1 Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

Uraian	Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis	Sekretariat Jenderal	0	2.722.847	(100,00)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Sekretariat Jenderal	0	640.000	(100,00)
	Ditjen Tanaman Pangan	0	20.119.756.330	(100,00)

Uraian	Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
	Ditjen Hortikultura	110.925.500	5.475.000	1.926,04
	Ditjen Perkebunan	224.939.250	177.270.000	26,89
	Ditjen Peternakan dan Keswan	15.094.330.000	30.779.217.696	(50,96)
	Ditjen PSP	0	117.909.085	(100,00)
	BSIP	183.437.000	649.519.700	(71,76)
	Badan PPSDMP	62.600.000	0	~
	Badan Karantina Pertanian	0	85.138.912	(100,00)
Beban Persediaan Rusak/Usang	Ditjen Hortikultura	157.197.505	239.140.841	(34,27)
	Ditjen Perkebunan	144.827.840	0	~
	Ditjen Peternakan dan Keswan	528.128.150	1.535.146.795	(65,60)
	BSIP	296.599.600	509.314.173	(41,76)
	Badan PPSDMP	31.020.000	0	~
	Badan Karantina Pertanian	195.266.023	75.138.619	159,87
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	BSIP	5.526.674	2.716.308	103,46
Jumlah		17.034.797.542	54.299.106.306	(68,63)

D.16. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel D.16.1 Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

Uraian Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR	-83.816.284.115	-85.775.042.073	(2,28)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	7.063.175.040	10.844.045.572	(34,87)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	90.879.459.155	96.619.087.645	(5,94)
SURPLUS/DEFISIT PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0	~
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	~
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	~
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	156.193.448.305	257.751.120.160	(39,40)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	173.228.245.847	312.050.226.466	(44,49)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	17.034.797.542	54.299.106.306	(68,63)
Jumlah	72.377.164.190	171.976.078.087	(57,91)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**E.1 EKUITAS AWAL**

Saldo ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp81.133.139.180.726,00 dan Rp81.196.032.107.834,00.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Saldo Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah sebesar Rp14.580.454.402.768,00 dan Rp14.666.998.934.173,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

E.3.1 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 8.597.293.463,00 dan (Rp23.393.099.911,00). Perbandingan Koreksi Nilai Persediaan Per Eselon I untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel E.3.1. Perbandingan Koreksi Nilai Persediaan Per Eselon I
periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Ditjen Tanaman Pangan	(2)	(18.109.866.769)	(100,00)
Ditjen Hortikultura	456.811.089	(81.555)	(560.226,40)
Ditjen Perkebunan	3.397.890.066	1.003.646.048	238,55
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.379.476.900	(6.760.450.921)	(149,99)
Ditjen PSP	9.737.900	34.634.048	(71,88)
BSIP	1.347.601.350	422.278.500	219,13
Badan PPSDMP	0	(15.000)	(100,00)
Badan Karantina Pertanian	5.776.160	16.755.738	(65,53)
Jumlah	8.597.293.463	(23.393.099.911)	(136,75)

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 disajikan pada **Lampiran E.3.1**.

E.3.2 KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI

Saldo Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp1.140.968.000,00) dan Rp1.039.664.632,00. Koreksi atas reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Tabel E.3.2. Perbandingan Koreksi Atas Reklasifikasi Per Eselon I
periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Sekretariat Jenderal	240.500.000	779.056.850	(69,13)
Ditjen Tanaman Pangan	0	698.745.875	(100,00)

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	(1.341.520.000)	(462.570.625)	190,01
BSIP	(1.998.000)	(1.130.000)	76,81
Badan PPSPDMP	(37.950.000)	35.562.532	(206,71)
Badan Karantina Pertanian	0	(10.000.000)	(100,00)
Jumlah	(1.140.968.000)	1.039.664.632	(209,74)

Rincian Koreksi Atas Reklasifikasi untuk tahun 2023 disajikan pada **Lampiran E.3.2**.

E.3.3 KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

Saldo Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp35.820.657.747,00) dan (Rp14.866.570.214,00). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Tabel E.3.3. Perbandingan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Per Eselon I periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Sekretariat Jenderal	(284.425.000)	(949.387.241)	(70,04)
Inspektorat Jenderal	0	(76.792.760)	(100,00)
Ditjen Tanaman Pangan	(680.538.485)	(2.167.489.125)	(68,60)
Ditjen Hortikultura	(224.043.750)	(653.994.684)	(65,74)
Ditjen Perkebunan	1.086.760.274	(80.315.242.698)	(101,35)
Ditjen Peternakan dan Keswan	(16.614.733.575)	(59.773.675.589)	(72,20)
Ditjen PSP	1.147.940.258	(784.438.973)	(246,34)
BSIP	(21.896.107.588)	146.584.262.829	(114,94)
Badan PPSPDMP	(83.103.896)	(17.965.790.345)	(99,54)
Badan Karantina Pertanian	1.727.594.015	1.235.978.372	39,78
Jumlah	(35.820.657.747)	(14.866.570.214)	140,95

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk tahun 2023 disajikan pada **Lampiran E.3.3**.

E.3.4 KOREKSI LAIN-LAIN

Saldo Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp10.843.899.843,00) dan (Rp387.811.180.815,00).

Tabel E.3.4. Perbandingan Koreksi Lain-lain Per Eselon I periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Sekretariat Jenderal	(968.784.824)	0	~
Ditjen Tanaman Pangan	(2.080.386.509)	(184.547.555.793)	(98,87)
Ditjen Hortikultura	(10.890.442)	(3)	363.014.633,33

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Ditjen Perkebunan	2.039.750	0	~
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	26.456.400.475	41.886.127.175	(36,84)
Ditjen PSP	(34.443.967.800)	(247.431.329.284)	(86,08)
BSIP	201.689.507	2.281.577.090	(91,16)
Jumlah	(10.843.899.843)	(387.811.180.815)	(97,20)

Rincian Koreksi Lain-lain untuk tahun 2023 disajikan pada **Lampiran E.3.4**.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Saldo Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14.003.054.694.673,00 dan Rp15.029.137.193.373,00. Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel E.4 Transaksi Antar Entitas periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Uraian Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Ditagikan ke Entitas Lain	14.215.138.900.212	15.574.536.228.109	(8,73)
Diterima dari Entitas Lain	(600.727.214.682)	(630.674.197.339)	(4,75)
Transfer Keluar	(1.144.377.148.829)	(1.018.066.980.034)	12,41
Transfer Masuk	1.132.204.104.258	1.026.082.080.284	10,34
Pengesahan Hibah Langsung	344.288.990.361	76.033.272.165	352,81
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(18.249.879)	(33.285.125)	(45,17)
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	56.545.313.232	1.260.075.313	4.387,46
Jumlah	14.003.054.694.673	15.029.137.193.373	(6,83)

E.4.1 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN / DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain (DDEL/DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 DDEL sebesar Rp600.727.214.682,00 sedangkan DKEL sebesar Rp14.215.138.900.212,00.

E.4.2 TRANSFER KELUAR/TRANSFER MASUK

Saldo transfer keluar dan transfer masuk yang tercatat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah transfer keluar sebesar Rp1.144.377.148.829,00 dan transfer masuk sebesar Rp1.132.204.104.258,00. Transfer Keluar/Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN. Rincian saldo transfer masuk dan transfer keluar dapat disajikan pada **Lampiran E.4.2.1 dan E.4.2.2**.

Jika dibandingkan saldo transfer keluar dan transfer masuk dengan tetap memperhitungkan akumulasi penyusutan terdapat selisih sebesar Rp12.173.044.571,00. Selisih tersebut merupakan akumulasi atas selisih transfer masuk dan transfer keluar. Rincian selisih disajikan pada **Lampiran E.4.2.3**.

Terkait dengan selisih transfer masuk dan transfer keluar dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Satker Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (018.01.451005) melakukan **transfer keluar** ke Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara berupa Aset Tetap Renovasi (Gedung dan Bangunan) beserta penyusutannya sebesar Rp2.048.066.289,00
2. Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (01808.633656) melakukan **transfer keluar** ke Kementerian Pertahanan satker Denmabesad (01222.344530) berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp443.825.100,00 beserta penyusutannya sebesar -Rp443.825.100,00
3. Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (01808.633656) melakukan **transfer keluar** ke Kementerian Pertahanan satker Korem-032/Wbr Dam-I/Bb (01222.685571) berupa Peralatan dan Mesin beserta penyusutannya sebesar Rp223.851.204,00
4. Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (01808.633656) melakukan **transfer keluar** ke Kementerian Pertahanan satker Korem-043/Gatam Dam-Ii/Swj (01222.685902) berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp250.000.000,00 beserta penyusutannya sebesar -Rp250.000.000,00
5. Satker Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (237221) melakukan **transfer keluar** ke Kantor Kementerian Agama Kota Depok berupa Tanah sebesar Rp7.188.650.000,00
6. Satker Badan Ketahanan Pangan (01811.452332) melakukan **transfer keluar** ke Badan Pangan Nasional (12501.690590) berupa Barang Konsumsi, Software, Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam operasi pemerintahan, Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Penyusutannya sebesar Rp31.273.738.843,00
7. Satker Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang (01812.237352) melakukan **transfer keluar** ke Kementerian Pertahanan satker Zidam Iv/Dip (01222.344234) berupa Gedung dan Bangunan beserta penyusutannya sebesar Rp400.602.228,00
8. Satker Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa mendapatkan **transfer masuk** dari Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I, Kementerian PU (03307.420149) berupa Peralatan dan Mesin beserta penyusutannya sebesar Rp308.176.986,00 dan Gedung Bangunan beserta penyusutannya sebesar Rp10.097.535.463,00
9. Satker Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari (01810.417428) mendapatkan **transfer masuk** berupa Peralatan Mesin beserta penyusutannya sebesar Rp392.069.316,00 dan Gedung Bangunan beserta penyusutannya sebesar Rp9.486.048.665,00 dari Kementerian PU satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I (03307.420149)
10. Satker Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang - Jabar (239701) mendapatkan **transfer masuk** berupa Peralatan Mesin beserta penyusutannya sebesar Rp987.802.673,00 dan Gedung Bangunan beserta penyusutannya sebesar Rp7.690.230.900,00 dari Kementerian Perdagangan satker Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (09001.568263)

E.4.3 PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DAN PENGEMBALIAN HIBAH LANGSUNG

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung secara bruto sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp344.288.990.361,00 yang terdapat pada satker:

1. Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang, Badan Karantina Pertanian berupa Hibah Tanah senilai Rp38.007.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Alor dengan BAST Nomor 359/PL.130/A/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 dengan rincian tanah seluas 369 m² yang terletak di RT 04 RW 03 Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
2. Pusat Data & Sistem Informasi Pertanian sebesar Rp3.448.222.200,00 berupa hibah jasa dari *FAO* dan *EFIS*;
3. Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian sebesar Rp1.120.353.031,00 berupa hibah uang dari *ACIAR* dan *IFPRI*;
4. Direktorat Jenderal Perkebunan (238830KP) berupa hibah jasa sebesar EURO3.727.669,69 ekuivalen Rp60.079.150.607 sesuai dengan BAST No. SASCI/VI/2023/219 tanggal 7 Juni 2023 dari *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH* yang merupakan perusahaan internasional Jerman berupa Proyek *Sustainable Agricultural Supply Chains In Indonesia* (SASCI). Pelaksanaan kegiatan berupa jasa konsultasi untuk memperkuat kapasitas kelembagaan untuk memperluas dan penyebarluasan konsep dan metodologi terkait praktik Agroforestri Berkelanjutan di Kalimantan kepada para petani swadaya di Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah Republik Federal Jerman telah memberikan dukungan kepada petani kelapa sawit di kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
5. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, Bogor mendapatkan hibah sebesar Rp3.742.356.000,00 yang terdiri dari hibah uang sebesar Rp448.410.000 tahun ke-3 dari *AFACI*, Korea untuk Proyek *Establishment of Asia Food Compotision Database* dengan no register 2EGMQPNA dan hibah barang sebesar Rp3.293.946.000 berupa Mesin Proses Biotani dari *Green Building* sesuai BAST Nomor B-1213/PL.310/H.10/08/2023 dengan no register 2KUWD9SA;
6. Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura mendapat hibah sebesar Rp553.416.887,00 yang terdiri dari hibah uang sebesar Rp60.204.750,00 dari *University of Queensland* untuk Proyek *BBTV Mitigation: Community Management in Nigeria and Screening Wild Banana Progenitors for Resistance* dengan no register 2CGN1NRA dan hibah uang sebesar Rp493.212.137,00 dari *ACIAR* untuk Proyek *Development of Area-Wide Management Approaches for Fruit Flies in Mango for the Indonesia, Philippine, Australia and the Asia Pacific Region* dengan no register 27BZVLEA;
7. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran, Lembang mendapat hibah sebesar Rp915.197.634,00 yang terdiri dari hibah uang sebesar Rp273.673.634,00 dari *Onions NZ* untuk Proyek *Agriculture standardization toward sustainable shallot production in Indonesia* dengan no register 2WM1TC7A dan hibah uang sebesar Rp641.524.000,00 dari *AFACI* untuk Proyek *Development of Vegetable Varieties in Asia Region* dengan no reegister 2EJ26YRA;
8. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi, Sukamandi mendapat hibah uang sebesar Rp1.353.900.000,00 dari *AFACI* untuk Proyek *High Yielding, Stress Tolerant Rice Varieties Suitable for AFACI Member Countries* dengan no register 25BH64FA;
9. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian, Bogor mendapat hibah uang sebesar Rp289.350.250,00 dari *ACIAR* untuk *Proyek Crop Health and Nutrient Management of Shallot-Chili-Rice Cropping System in Coastal Indonesia* dengan no register 2W2H8PDA
10. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias Cianjur mendapat hibah uang sebesar Rp1.043.441.800,00 dari *Sakata Seed Cooperation* untuk Proyek *Cooperation Expedition*

- Evaluation and Breeding Program for New Ornamental Plants (CEEBP)* dengan no register 2RG22RNA;
11. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang, Malang mendapat hibah uang sebesar Rp111.112.563,00 dari *AVRDC-World Veg Center* untuk Proyek *International Mungbean Improvement Network (IMIN)* dengan no register 272ZYD9A;
 12. Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian, Bogor sebesar Rp459.670.050,00 berupa hibah uang dari *AFACI* untuk Proyek *Improvement of Rural Agricultural Technology Extension System in Asia* dengan no register 28CQ4JVA;
 13. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah Dan Pupuk, Bogor sebesar Rp1.306.441.079,00 berupa hibah uang dari *University of Nebraska, Lincoln* sebesar Rp144.992.500 untuk Proyek *Intensification of smallholder Oil Palm Plantation in Indonesia - Carbon Saving under intensified Management of Indonesia's Smallholder Oil Palm Plantation* dengan no register 2WKT2EGA dan dari *ICRAF* sebesar Rp1.161.448.579 untuk Proyek *Improving the Management of Peatlands and the Capacities of Stakeholders in Indonesia (Peat-IMPACTS Indonesia)* dengan no register 2ULPSRBA;
 14. Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa/Palembang, Badan PPSDMP mendapat hibah berupa barang sebesar Rp13.803.476.153,00 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi 2 Gedung Bangunan milik Pemprov Sumatera Selatan di Jalan Palembang Pangkalan Balai KM.29 Eks Kawasan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan XII Kabupaten Banyuasin dengan luasan Gedung I seluas 326,19 m2 senilai Rp937.822.150 dan Gedung II seluas 503,25 m2 senilai Rp12.865.654.003,00;
 15. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor, Badan PPSDMP mendapat hibah berupa uang untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengajar di NTT Kerjasama dengan *Mastricht School Management (MSM) Program LMSINDO* dari Belanda sebesar Rp675.893.000,00 dengan No. Register 2YVCSRXA;
 16. Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan mendapatkan hibah sebesar - Rp255.349.002.107 dari :
 - a. *FAO Representative for Indonesia*, Proyek *Livestock Emergency Preparedness and Response for Areas at High Risk of Volcanic Eruptions* berupa hibah jasa sebesar Rp2.104.678.400,00 dengan no register 27K875KA dan no dokumen transaksi Manual A 9998723 821000726
 - b. *FAO Representative for Indonesia*, Proyek *Livestock Emergency Preparedness and Response for Areas at High Risk of Volcanic Eruptions* berupa hibah barang sebesar Rp27.612.000,00, dengan no register 27K875KA dan no dokumen transaksi Manual A 9980497 821000727
 - c. Pemerintah Australia, berupa hibah barang Bantuan 500.000 dosis Vaksin *Lumpy Skin Deceases (LSD)* sebesar Rp9.569.100.000,00 dengan no register 2H81HFJA dan no dokumen transaksi Manual A 11771201 845917703
 - d. *FAO Representative for Indonesia*, Proyek *Strengthening National Capacity to Prevent and Control emerging and Re-Emerging Pandemic Threats Including Influenza A in Indonesia (EPT-2)* berupa hibah jasa sebesar Rp241.492.529.361,00 dengan no register 2CFIEZHA dan hibah barang sebesar Rp2.155.082.346,00 dengan no register 2CFTEZHA

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp18.249.879,00 yang berasal dari satker

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP), Sekretariat Jenderal sebesar Rp466.186,00, Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura sebesar Rp25.474,00 dan satker Balai Pengujian Standar Instrumen Pemanis dan Serat Malang, BSIP sebesar Rp17.758.219,00.

E.4.4 PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG TAHUN ANGGARAN YANG LALU (TAYL)

Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa yang diterima pada tahun 2022 dan/atau tahun-tahun sebelumnya namun belum dilakukan pengajuan nomor register dan/atau pengesahan hibah. Pengesahan Hibah Langsung TAYL secara bruto sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp56.545.313.232,00 tersebut terdapat pada satker :

1. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mendapatkan hibah sebesar Rp13.279.078.119,00 dari:
 - a. Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Kedutaan Besar Australia Jakarta berupa hibah Jasa sebesar Rp9.112.455.025,00 dengan nomor register: 71465701 dan no pengesahan: Manual A 9670317 817496789 dan Manual A 9657411 817490597;
 - b. FAO Representative for Indonesia berupa hibah Barang sebesar Rp337.995.200,00 dengan nomor register: 2LDB9W2A
 - c. Lembaga MERCY - USA For Aid and Development, Inc. sebesar Rp3.828.627.894,00 yang terdiri dari hibah jasa sebesar Rp1.228.501.737,00 dan hibah barang sebesar Rp2.600.126.157 dengan nomor register 2XW81CNA
2. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Sulteng, BSIP berupa hibah Tanah di Desa Mlaku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi seluas 26.440 m² dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi sebesar Rp4.564.279.000,00 dengan nomor dokumen: 594.4/03/Setkam bulan Januari 2023 dan nomor pengesahan: Manual A9137309 810256058, periode pengesahan Maret 2023.
3. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan, Ditjen Perkebunan mendapatkan hibah tanah sebesar Rp38.701.956.113,00 yang terletak di Jl. Asrama No.124K Kota Medan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan no register 23SKLK6A.

E.5 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp80.516.531.240.504,00,00 dan Rp81.133.139.180.726,00.



Biro Keuangan dan BMN
Sekretariat Jenderal – Kementerian Pertanian
Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung A Lantai 8
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan - Jakarta Selatan